



UNIVERSITAS INDONESIA

**STANDAR GANDA MENGENAI TERORISME DALAM
KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat meraih gelar M.Si

ISYANA ADRIANI

1006797502

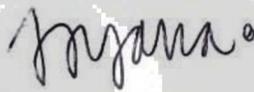
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
PROGRAM STUDI KAJIAN TERORISME DALAM KEAMANAN
INTERNASIONAL
JAKARTA
APRIL 2012**

HALAMAN PENGESAHAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Isyana Adriani

1006797502



26 April 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Isyana Adriani
NPM : 1006797502
Program Studi : Magister Kajian Terorisme
Judul Tesis : Standar Ganda Mengenai Terorisme dalam Kebjikana
Luar Negeri Amerika Serikat

Telah berhasil dipertahankan di hadap Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada program studi Magister Kajian Terorisme, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dra. Suzie Sudarman, MA

Penguji Ahli : Yeremia Lalisang, M.Sc

Ketua Sidang : Dr. Makmur Keliat

Sekretaris Sidang: Asra Virgianita, MA

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Ditetapkan di : Depok, Jawa Barat

Tanggal : 2 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur tak terhingga pada Allah SWT karena hanya atas rahmat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan thesis ini dalam waktu lebih singkat dari biasanya, kurang lebih 1,5 bulan. Thesis ini dibuat dalam rangka memenuhi syarat kelulusan dari Program Pasca Sarjana Kajian Terorisme, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan berbagai pihak mustahil thesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada:

- (1) Dra. Suzie Suparman, MA selaku pembimbing yang telah begitu sabar membimbing penulis sehingga dapat menghasilkan karya tulis yang layak.
- (2) Staff Kajian Wilayah Amerika (KWA) UI, terutama Mbak Diana Supriadi yang begitu sabar menjawab banyak sekali telepon penting mengenai Ibu Suzie.
- (3) Staff Berita Satu TV yang telah begitu pengertian membiarkan penulis pulang lebih awal dan mengambil cuti demi selesainya thesis ini.
- (4) Staff Departemen Hubungan Internasional (HI) Pasca Sarjana FISIP UI yang telah membimbing penulis selama masa studi 1,5 tahun terakhir.
- (5) Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan moral dan material tak terhingga.
- (6) Para sahabat yang telah memberi semangat di saat penulis merasa lelah atau putus asa.

Akhir kata, semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan semua pihak yang membantu. Semoga thesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 26 April 2012

Penulis

ABSTRAK

Nama : Isyana Adriani
Program Studi: Kajian Terorisme
Judul : Standar Ganda Mengenai Terorisme Dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

Tesis ini membahas berbagai kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) menyangkut terorisme sejak serangan 11 September 2011. Jika dibandingkan dengan perlakuan AS terhadap *Irish Republican Army* (IRA), kelompok terorisme asal Irlandia yang telah jauh lebih lama merajalela dan masih termasuk yang terbahaya, perlakuan AS terhadap apapun yang dicurigai berhubungan dengan Al-Qaeda (termasuk negara, organisasi, bahkan warga Muslim di AS sendiri) bisa dibilang tidak manusiawi. IRA bahkan secara terbuka didukung oleh para pejabat pemerintah dan organisasi-organisasi yang diduga menyumbang dana bagi serangan-serangan terorisme IRA tetap berjalan dengan tenang. Tesis ini menjelaskan bahwa rasisme atau nosi etnisitas adalah satu-satunya alasan mengapa AS memihak IRA, meski seperti Al-Qaeda ia juga merupakan kelompok teroris, dan bukannya perdagangan bebas serta keinginan untuk mendominasi.

Kata kunci:

Kebijakan luar negeri AS, *Irish Republican Army* (IRA), rasisme, nosi etnisitas, terorisme

ABSTRACT

Name : Isyana Adriani
Program: Terrorism Studies
Title : Double Standard Regarding Terrorism in American Foreign Policy

This thesis covers USA's different treatments on Irish Republican Army (IRA) and anything that is suspected to have relations with Al-Qaeda, including Muslim countries or countries with most Muslims, Muslim organizations and even Muslims in USA itself. Like Al-Qaeda, IRA is also a terrorist group, hailing from Ireland, which has been around far longer than Al-Qaeda. Like Al-Qaeda as well, IRA has conducted terrorist attacks worldwide, mostly in Ireland, Northern Ireland, The UK and UK colonies all over the world. Yet IRA is openly supported by many American high officials and organizations suspected to channel funds to IRA still operate to date. This thesis offers that the only explanation why The US is far less harsh to IRA than Al-Qaeda is notion of ethnicity or racism, instead of free trade or desire to dominate.

Key words:

Irish Republican Army (IRA), US foreign policy, notion of ethnicity, racism, terrorism

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademis Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isyana Adriani
NPM : 1006797502
Program Studi : Magister Kajian Terorisme
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

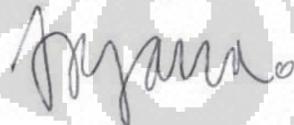
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia *Hak bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty – Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Standar Ganda Mengenai Terorisme dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Salemba
Pada tanggal : 26 April 2012
Yang menyatakan,



Isyana Adriani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	
1.PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. PERMASALAHAN	3
1.3.KERANGKA PERMIKIRAN	3
1.3.1. METODOLOGI	3
1.3.2. HIPOTESA	4
1.4.LITERATURE REVIEW	5
1.5. RENCANA PEMBABAKAN THESIS	7
1.6. TUJUAN DAN SIGNIFIKANSI PENELITIAN	7
2. NOSI ETNISITAS VS KEINGINAN UNTUK MENDOMINASI	9
2.1. PERANG DINGIN, STATE-SPONSORED TERRORISM, SANKSI DAN RASISME	12
2.2. SEJARAH SINGKAT RASISME DI AS	18
2.3. SANKSI DAN RASISME DI LUAR PERANG DINGIN	21
2.4. GWOT DAN RASISME DI DALAM NEGERI	27
2.5. KESIMPULAN	31
3. PERDAGANGAN BEBAS DAN NOSI ETNISITAS	33
3.1. PERDAGANGAN BEBAS, SANKSI DAN RASISME	34
3.2. TERORISME DAN PERDAGANGAN BEBAS: INGGRIS, AS DAN INDONESIA	35
3.3. TERORISME DAN INVESTASI AS DI IRLANDIA UTARA	43
3.4. GENOSIDA DAN KEPENTINGAN NASIONAL DI RWANDA	51
4. PENGARUH LOBI ETNIS DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI	57
4.1. PERAN ETNIS YAHUDI DALAM HUBUNGAN AS DAN ISRAEL	57
4.2. LOBI KETURUNAN IRLANDIA DALAM MASALAH IRLANDIA UTARA	60
4.3. LOBI KETURUNAN PAKISTAN DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI AS	66
4.4. INDIA, PAKISTAN, AS DAN PELOBI PROFESSIONAL	70
4.5. KESIMPULAN	

5. PENGARUH FREE TRADE DALAM KEKERASAN IRA SAAT INI

76

5.1. IRA PASCA 9/11 DAN IMPLEMENTASI PERDAMAIAN	77
5.2. PERDAGANGAN AS DALAM PROSES PERDAMAIAN	80
5.3. YANG SERING TERLUPAKAN: SUARA KORBAN	91
5.4. NOSI ETNISITAS DAN KESIMPULAN	97

6. RAS DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI: SEBUAH KESIMPULAN

101

6.1. HAM, RASISME DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI	107
6.2. MULTIKULTURALISME DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI	110
6.3. PEMBELAJARAN BAGI INDONESIA	113

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pertanyaan mengenai standar ganda dalam terorisme pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) dimulai pada berlangsungnya pengadilan mengenai radikalisasi warga Muslim yang diadakan oleh *The House Homeland Security Committee*. Sidang yang berlangsung pada 10 Maret 2011 tersebut dipimpin oleh kepala Komite, Peter King, seorang anggota *The New York Third Congressional District* asal Partai Republik.¹ Sidang tersebut dilaksanakan berdasarkan laporan-laporan warga yang mengaku anak atau kenalannya berubah menjadi radikal setelah bergabung dengan mesjid atau organisasi Muslim setempat. Diantara pelapor adalah Abdirizak Bihi, direktur *The Somalian Center of Education and Advocacy*, yang melaporkan kasus Farah Beledi, pemuda 27 tahun asal Minnesota yang menghilang di Somalia setelah bergabung dengan Al-Shahab, organisasi radikal dengan koneksi ke Al-Qaeda. Pada Mei 2010, Beledi ditemukan tewas akibat bom bunuh diri di Mogadishu, setelah sebelumnya aktif menyebarkan pesan-pesan jihad pada teman-temannya di AS.²

Banyak yang menyatakan keberatan terhadap sidang ini karena dinilai menghidupkan stereotip tentang warga Muslim dan mengkambinghitamkan mereka atas masalah keamanan nasional, tapi yang menarik perhatian adalah sorotan media terhadap sosok King. Media mengedepankan masa lalu King dimana dia secara terbuka menyatakan dukungan terhadap *Irish Republican Army* (IRA), kelompok teroris asal Irlandia yang berdiri sejak 1919 dan tengah berjuang melepaskan Irlandia Utara dari cengkraman Inggris. Pada tahun 1982 misalnya, sebagai *Nassau County Comptroller* dia menyatakan, “ *We must pledge ourselves*

¹David A. Fahrentold and Michelle Boorstein, “Rep. Peter King’s Muslim Hearings: A Key Moment in An Angry Conversation”, *The Washington Post* (2011): diakses pada 22 Februari 2012, pukul 08:35, <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/03/09/AR2011030902061.html>.

²Eli Saslow, “Muslim Activist in Minnesota Struggles as One-Man Counter Against The Lure of Terrorism”, *The Washington Post* (2011): diakses pada 23 Februari 2012, pukul 10:05, http://www.washingtonpost.com/national/muslim-activist-in-minnesota-struggles-as-one-man-counter-against-lure-of-terrorism/2011/07/04/gIQAwnH53H_story.html.

to help the brave men and women who are fighting against the British imperialism in the streets of Belfast and Derry,” di depan para pendemo pendukung IRA di Long Island. Kemudian pada tahun 1985 dia menyatakan, *“If civilians are killed in a military attack, it is very regrettable, but I will not morally blame IRA for it,”* dalam sebuah pidato di acara peringatan *St. Patrick’s Day* di New York, kampung halamannya. Saat itu dia menjabat sebagai *Grand Marshall of New York*. Lalu pada 2001, tak lama setelah serangan 11 September, King mengatakan dalam sebuah wawancara dengan *The New York Times*, *“I understand why people who are misinformed might see a parallel (between Al-Qaeda and IRA), but the fact is IRA has never attacked the US and my loyalty is for The US.”*³

Pernyataan terakhirnya mengandung masalah, karena meskipun IRA benar tidak pernah menyerang AS secara langsung, banyak orang menduga dana yang dikumpulkan organisasi-organisasi Irlandia seperti *Northern Irish Aid (Noraid)* yang berbasis di New Jersey, digunakan untuk membiayai berbagai serangan teroris IRA. Beberapa serangan tersebut memakan korban warga negara AS, seperti serangan di Harrods, London, pada 17 Desember 1983 yang menewaskan Kenneth Salvesen, asal Chicago. Tujuh tahun kemudian, sebuah serangan bom IRA di *Honorary Artillery Hall* di London menciderai Tom Parker, warga AS lain yang sekarang menjabat *Director of Terrorism, Counter Terrorism and Human Rights* di *Amnesty International*.⁴

1.2. PERMASALAHAN

Letak standar ganda dalam masalah ini adalah King sudah dibiarkan menjabat di Kongres sejak 1993, selain menjabat sebagai *Homeland Security*, dan sebelum kedua jabatan tersebut dia memiliki berbagai jabatan militer. Pemerintah AS maupun Partai Republik tidak pernah mengeluarkan reaksi yang berarti terhadap dukungan King untuk IRA. Sementara jika King menyatakan dukungan untuk Al-Qaeda, sudah pasti dia akan dicopot dari jabatan-jabatan tersebut. Hal ini

³Rachel Rose Hartman, “Rep. Peter King Defends IRA Support, Islamic Radicalism Hearings”, *Yahoo News* (2011): diakses pada 21 Februari, pukul 19:13
<http://news.yahoo.com/blogs/ticket/rep-peter-king-defends-ira-support-islamic-radicalism-20110309-081347-431.html>.

⁴*Ibid.*

membuahkan pertanyaan penelitian: bagaimana standar ganda bisa ada dalam kebijakan luar negeri AS mengenai terorisme?

1.3. KERANGKA PEMIKIRAN

1.4. 1.3.1. METODOLOGI

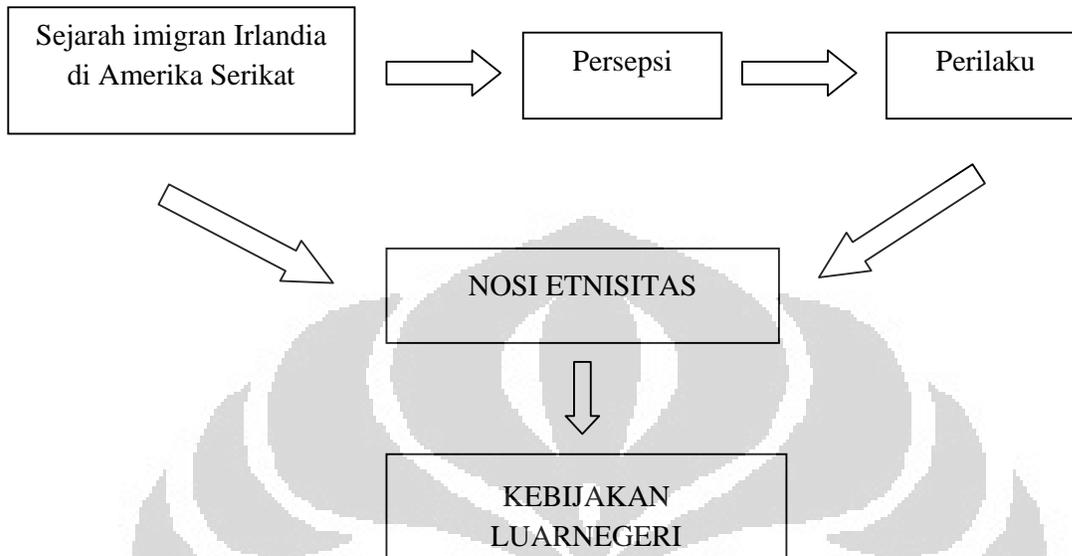
Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif yang akan didasarkan pada teori imigrasi yang dirumuskan Lawrence Fuchs dalam “*American Kaleidoscope: Race, Ethnicity and The Civic Culture*” (1991), yakni *coercive pluralism*, *sojourner pluralism* dan *voluntary pluralism*. *Coercive pluralism* adalah keadaan dimana group etnis yang dominan menekan group etnis yang lemah, dan pemberontakan group etnis yang lemah membahayakan stabilitas negara. Ini dilakukan etnis kulit putih terhadap warga kulit hitam dan penduduk asli, Indian. *Sojourner pluralism* adalah bagian dari *coercive pluralism*, dimana para pekerja dari Asia, Eropa, Kanada dan Karibia yang datang ke AS dieksploitasi secara sistematis oleh pemerintah. Terakhir, ada *voluntary pluralism*, yaitu keadaan dimana semua orang merasa sebagai anggota kebudayaan warga (*civic culture*), dengan rasa aman karena pemerintah tidak akan mencampuri urusan warga dengan tanah leluhur mereka. *Voluntary pluralism* lebih berhasil pada imigran dari Eropa daripada imigran dari Asia, Afrika dan Amerika Latin.⁵

Karena thesis ini akan difokuskan pada sikap terhadap IRA dalam kebijakan luar negeri AS, maka di sini akan dibahas pula sejarah kedatangan imigran Irlandia ke AS untuk menghindari *The Great Potato Famine* pada 1845-1850.⁶ Kemudian sejarah ini akan dihubungkan dengan persepsi dan perilaku masyarakat keturunan Irlandia, yang merupakan mayoritas di AS, mengenai warga dari ras non Kaukasia terutama keturunan Timur Tengah. Sejarah warga keturunan Irlandia yang sudah menjadi mayoritas di beberapa negara bagian seperti Maryland dan Massachussets, sekitar enam tahun dari dimulai eksodus massal ke AS pada 1845 yakni pada 1851, berdampak pada persepsi dan perilaku

⁵Lawrence Fuchs, *The American Kaleidoscope: Race, Ethnicity and The Civic Culture*, (New Hampshire: The University Press of New England, 1990), 1-75.

⁶R.F Foster, *Modern Ireland: 1600-1972*, (London: Penguin 1990), 41

mereka. Inilah yang membentuk nosi etnisitas (*notion of ethnicity*) yang kemudian menjadi aspek penting dari kebijakan luar negeri.



1.3.2. HIPOTESA

Berdasarkan operasionalisasi di atas, didapatkan berbagai hipotesa berikut:

1. IRA tidak pernah mendapat tindakan tegas dari AS karena jika AS memberi sanksi pada IRA atau tidak membantu perjuangan Irlandia Utara, pemerintah akan ditinggalkan warga keturunan Irlandia, yang merupakan mayoritas.
2. Sikap pemerintah AS lebih lunak mengenai IRA karena faktor rasisme. Menurut Fuchs, Pluralisme Sukarela lebih menguntungkan warga kulit putih karena mereka tidak merasa terancam meski tetap menjalankan berbagai kebiasaan sesuai dengan identitas leluhur mereka. Tapi tidak demikian dengan warga kulit berwarna. Meskipun tidak dipaparkan dalam "*American Kaleidoscope: Race, Ethnicity and The Civic Culture*" (1991), kuat dugaan bahwa kulit berwarna tidak dibiarkan mengklaim identitas sebagai warga AS dan group etnis sekaligus karena *early settlers* di AS (yang adalah kulit putih yang membinasakan penduduk Indian) menganggap mereka sebagai ancaman.

3. Selain karena IRA adalah terorisme kulit putih, pemerintah AS lunak terhadap mereka karena ikatan persaudaraan dengan Irlandia dan Irlandia Utara.
4. Perlakuan AS terhadap apapun yang berkulit putih, tidak hanya terorisme, adalah lebih baik dan hal tersebut tidak disebabkan oleh perdagangan bebas atau kepentingan lainnya, melainkan murni rasisme.

1.4. TINJAUAN LITERATUR

Ada beberapa karya tulis yang akan dijadikan acuan dalam thesis ini. Selain “*American Kaleidoscope: Race, Ethnicity and Civic Culture*” karangan Lawrence Fuchs yang menjelaskan mengenai teori pluralisme dan kebudayaan warga seperti telah disebutkan di atas, buku selanjutnya adalah *Encyclopedia of American Foreign Policy Second Edition* (editor Louise B. Ketz, 2002). Bagian “*Race and Ethnicity*” oleh John Snetsinger menjelaskan teori mengapa AS yang tadi nya begitu rasis jadi mulai memperhatikan etnis minoritas selepas Perang Dunia II.⁷ Juga basis AS menguasai Filipina setelah memenangkan perang dengan Spanyol pada 1899, yang ternyata bukan kepentingan ekonomi.⁸ Selain itu, bagian ini juga menceritakan kesuksesan berbagai grup etnis dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri, seperti saat kelompok etnis Yahudi melobi Presiden Harry Truman agar membantu terbentuknya Israel pada 14 Mei 1948. Lobi ini berhasil, padahal populasi etnis Yahudi hanya sekitar 3% dari total penduduk AS.⁹

Dari sisi sejarah sepak terjang AS dalam membantu Irlandia Utara, buku “*Turf War: The Clinton Administration and Northern Ireland*” (2004) karya Timothy J. Lynch menjelaskan bahwa baru setelah Bill Clinton menjadi Presiden pada 1993, Irlandia Utara mendapat tempat penting dalam agenda politik AS. Hal ini terbukti dalam pemberian visa kunjungan pada Gerry Adams, pemimpin partai sayap politik IRA, Sinn Fein, pada 1994.¹⁰ Buku ini seperti lanjutan dari “*American Policy and Northern Ireland: A Saga of Peacebuilding*” (2001) oleh James E.

⁷*Ibid.*, hal. 300

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*, hal. 305

¹⁰Timothy J. Lynch, *The Turf War: The Clinton Administration and Northern Ireland*, (England: Ashgate Publishing Limited, 2004), 91-92

Thomson. Buku ini menjelaskan bahwa presiden-presiden AS sebelum Clinton, seperti Richard Nixon, Gerald Ford dan George H.W. Bush lebih banyak disibukkan oleh hal-hal lain seperti Perang Vietnam dan Perang Dingin. Thomson menduga para mantan presiden ini tidak mau melibatkan diri dalam kasus Irlandia karena tidak mau mengecewakan Inggris, yang sudah menjadi sekutu terkuat mereka sejak 1941.¹¹

Kembali pada buku karangan Lynch, salah satu hal yang mendorong Clinton untuk menempatkan Irlandia Utara sebagai agenda utama adalah desakan warga keturunan Irlandia yang bergabung dalam *The Irish National Caucus*. Dan tidak hanya mengundang Gerry Adams, Clinton juga menerapkan *The MacBride Principles* yang isinya diantaranya pemilik perusahaan di Irlandia Utara tidak boleh mendiskriminasi pekerja, dalam arti harus bersikap adil pada seluruh pekerja apapun etnis dan agama mereka dan harus pula membuka kesempatan kerja pada semua etnis.¹²

Dalam hal sejarah kedatangan imigran Irlandia ke AS, buku "*Modern Ireland: 1600-1972*" (1988) karangan R.F Foster menjelaskan beberapa titik penting yang dapat dihubungkan dengan kecenderungan pemerintah AS memihak IRA meskipun kelompok itu juga merupakan teroris seperti Al-Qaeda. Misalnya selain eksodus masal yang dimulai pada 1845, para imigran rajin mengirim uang pada sanak keluarga di Irlandia, tidak hanya sebagai biaya kepindahan mereka ke AS tapi juga untuk biaya perjuangan *The Fenian Brotherhood*, yang kelak berevolusi menjadi IRA. The Fenian Brotherhood juga memiliki perwakilan di New York, dipimpin oleh John O'Mahony.¹³

¹¹James E. Thomson, *American Policy and Northern Ireland: A Saga of Peacebuilding*, (Connecticut: Praeger Publishers, 2001), 116-117

¹²Timothy J. Lynch, *The Turf War: The Clinton Administration and Northern Ireland*, (England: Ashgate Publishing Limited, 2004), 103

¹³R.F Foster, *Modern Ireland 1600-1972*, (London: Penguin, 1990), 204-205

1.5. RENCANA PEMBABAKAN THESIS

Bab pertama akan berupa pendahuluan, kemudian disusul oleh bab kedua berupa pembantahan bahwa pemberian sanksi dan *state-sponsored terrorism* (terorisme yang disponsori negara) yang dilakukan AS terhadap Palestina melalui Israel dan terhadap Panama dan beberapa negara di Amerika Latin lainnya melalui pemerintah yang lalim, adalah bentuk dari keinginan untuk mendominasi (*desire to dominate*), yang merupakan manifestasi dari kebutuhan untuk bertahan. Bab ketiga juga akan membantah bahwa perlakuan lebih baik AS terhadap IRA dan konflik Irlandia Utara daripada Al-Qaeda atau bentuk terorisme non-Kaukasia lainnya disebabkan oleh perdagangan bebas. Kedua bab ini akan membuktikan bahwa perlakuan AS yang memihak IRA tersebut disebabkan murni rasisme atau nosi etnisitas. Bab keempat berupa pemaparan bagaimana lobi kelompok etnis dapat berpengaruh pada kebijakan luar negeri dan kaitan hal ini dengan rasisme. Bab selanjutnya, kelima, akan membahas keadaan Irlandia Utara sekarang, apakah hubungan perdagangan dengan AS berhasil meredam cara-cara kekerasan IRA. Bab keenam atau terakhir berisi kesimpulan dan pelajaran yang dapat diambil Indonesia terkait dengan sikap rasis AS yang begitu mendarah daging.

1.6. TUJUAN DAN SIGNIFIKANSI PENELITIAN

a. Signifikansi Akademis;

Signifikansi akademis dari penelitian ini menyangkut berbagai studi yang dilakukan tentang kebijakan luar negeri AS. Ini sangat berguna bagi akademisi untuk melihat bagaimana kebijakan luar negeri AS memiliki implikasi yang luas bagi dunia. Dampak sebuah kebijakan luar negeri AS sangat mempengaruhi berbagai aspek di dunia, seperti ekonomi dan pertahanan.

b. Signifikansi Praktis

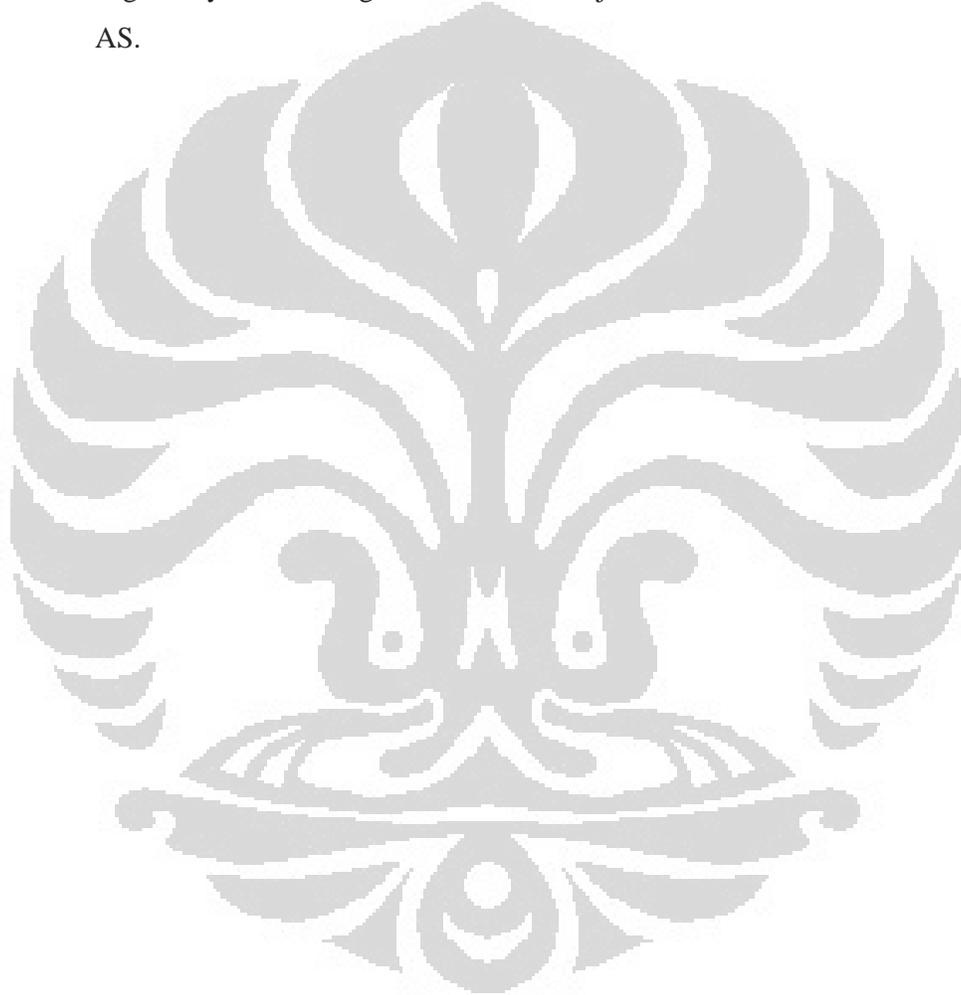
Secara praktis penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan mengenai dampak kerjasama antara AS dan Indonesia bagi masyarakat Indonesia di masa yang akan datang.

c. Signifikansi Teknis

Secara teknis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai kebijakan publik, terutama kebijakan luar negeri.

d. Signifikansi Sosial

Secara sosial, diharapkan penelitian ini dapat memberi pemahaman bagi masyarakat mengenai sifat dari kerjasama antara Indonesia dan AS.



BAB II

NOSI ETNISITAS DAN KEINGINAN UNTUK MENDOMINASI

Bab ini akan memaparkan nosi etnisitas yang disejajarkan dengan keinginan untuk mendominasi sebagai manifestasi keinginan untuk mempertahankan diri atau spesies seperti yang dikemukakan Noam Chomsky dalam "*Hegemony or Survival*" (2004). Di sini kita akan melihat mana di antara dua faktor tadi yang lebih dominan bagi AS dalam menentukan kebijakan-kebijakan luar negeri, terutama menyangkut terorisme IRA dan Al-Qaeda.

Chomsky membuka bab pertama "*Hegemony or Survival*" dengan pemaparan mengenai biologi kontemporer. Menyitir Ernst Mayr, seorang pelopor biologi evolusi asal Jerman, Chomsky mempertanyakan kemungkinan adanya "*extraterrestrial intelligence*", yaitu sejumlah aktifitas dalam mencari kehidupan di luar bumi. Mayr menyatakan kemungkinan adanya makhluk di luar planet bumi sangat kecil. Hal ini disebabkan adanya "*higher intelligence*", yaitu kemampuan suatu species untuk mempertahankan diri. Mayr menyatakan sejak alam semesta terbentuk kira-kira 50 miliar tahun yang lalu, "jatah" suatu spesies untuk bertahan adalah 100.000 tahun. Dari organisme-organisme yang terbentuk 50 miliar tahun lalu itu, salah satunya berhasil bertahan selama lebih dari 100.000 tahun. Manusia adalah keturunan organisme itu. Mayr yakin jika memang pernah ada kehidupan di luar bumi, pastilah makhluk apapun itu sudah punah karena mereka tidak mempunyai "*higher intelligence*" seperti organisme yang menurunkan manusia. Jadi bertahannya manusia di bumi bukan karena seleksi alam, melainkan usaha-usaha yang datang dari inteligensia tinggi. Teori Mayr ini menjadi salah satu dasar teori Chomsky bahwa manusia saling menekan satu sama lain karena keinginan untuk menguasai agar bisa bertahan. ¹

Memang banyak contoh yang bisa membuktikan teori ini. Salah satunya adalah ketika Kerajaan Inggris pada abad ke-16 mulai memeluk Anglikan (Protestan cara Inggris) yang disebabkan Raja Henry VIII menceraikan istri

¹ Noam Chomsky, *Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance*, (New York: Metropolitan Books, 2003), 1-2.

pertamanya, Catherine of Aragon, untuk menikahi Anne Boleyn. Paus pun mengekskomunikasikan sang raja, dan secara resmi Inggris tidak lagi menjadi negara Katolik. Henry VIII lalu memaksakan Protestan ke Irlandia, salah satu koloninya yang beragama Katolik. Rakyat Irlandia pun melawan. Seperti yang diketahui, perlawanan itu masih berlangsung hingga sekarang, dimana warga Katolik di Irlandia Utara berjuang mendapat kesetaraan dengan warga Protestan pro Inggris di sana.² Contoh lainnya adalah ketakutan imigran Eropa di AS pada abad ke-18 dan 19 akan gelombang kedatangan imigran Katolik, karena orang-orang Katolik di benua Eropa dianggap didukung dan mendukung Prancis, salah satu kekuatan terbesar yang berseteru dengan Inggris. Akibatnya, warga Katolik di AS mengalami diskriminasi yang menjadikan mereka warga kulit putih kelas terbawah, sampai John F. Kennedy menjadi Presiden pada 1960, Presiden keturunan Irlandia pertama yang beragama Katolik. Dari kedua contoh di atas, di contoh pertama terlihat usaha Inggris untuk mendominasi dan Irlandia untuk bertahan. Sedangkan di contoh kedua, sudah jelas bahwa diskriminasi terhadap umat Katolik terjadi akibat ketakutan imigran Protestan, dan dapat diinterpretasi sebagai upaya mempertahankan diri.³

Dalam dunia modern, negara-negara berupaya bertahan dengan berbagai cara, diantaranya dengan hegemoni. Hegemoni berdefinisi imperialisme suatu negara atas negara-negara lain, bukan dengan cara kekuatan militer tetapi dengan berbagai kebijakan. AS adalah salah satu negara yang paling gemar menerapkan kebijakan-kebijakan hegemoni. Pada tahun 2002 misalnya, pemerintahan George W. Bush (yang dalam tesis ini akan disebut sebagai Bush Jr.) tidak mengindahkan larangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memiliterisasikan angkasa dengan alasan keamanan. Pada tahun yang sama, Bush Jr mengumumkan berdirinya *National Security Strategy*, yang berisi pasal-pasal mengenai penggalangan kekuatan dengan para sekutu untuk menumpas terorisme dan memperkuat perdagangan bebas.⁴ Jika ditilik dari isinya, bab ketiga yang berjudul “*Strengthen Alliances to Defeat and Global Terrorism and Work to*

² Mike Cronin, *Irish History for Dummies*, (Sussex: John Wiley & Sons Ltd, 2011.), 157-161

³ Thomas J. Archdeacon, *Becoming American*, (New York: The Free Press, 1983), 15-18

⁴ Noam Chomsky, *Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance*, (New York: Metropolitan Books, 2003), 3

Prevent Attacks Against Us and Our Friends,” terdapat bagian yang berbunyi, “*We make no distinction between terrorists and those who knowingly harbor to provide aid for them.*”⁵ Bagian itu bisa diinterpretasi sebagai serangan AS ke Iraq pada Maret 2003 atas tuduhan memiliki senjata pemusnah massa yang akhirnya tidak terbukti, setelah sebelumnya menyerang Afghanistan karena mengira Osama bin Laden bersembunyi di situ (serangan ke kedua negara disebut pemerintahan Bush sebagai “pembebasan dari rezim otoriter”). Masih di bagian ketiga, disebut pula bahwa ribuan teroris yang terlatih berkeliaran dengan bebas di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Afrika, Timur Tengah dan Asia⁶. Dengan pengakuan bahwa teroris masih ada di Eropa, berarti AS mengakui keberadaan IRA sebagai teroris, namun kita tidak pernah mendengar Irlandia diberi sanksi atas IRA karena terus melakukan serangan teroris di Inggris, Irlandia Utara, Irlandia dan koloni-koloni Inggris di luar negeri, atau Irlandia Utara diberi sanksi karena masyarakat Kristennya terus menekan warga Katolik.

Masih di bab ketiga, terdapat pula bagian yang berbunyi, “*We will identify and block the sources of funding for terrorism, freeze the assets of terrorists and those who support them, deny terrorists access to international financial system, protect legitimate charities from being abused by terrorists and prevent movement of terrorists’ assets through alternative financial networks.*”⁷ Seperti telah diketahui, pasca 9/11 pemerintah AS menutup banyak organisasi Islam karena diduga berhubungan dengan Al-Qaeda atau secara diam-diam membiayai serangan-serangan teroris. *Tapi Northern Irish Aid (Noraid)* dan *American Ireland Fund*, yang dicurigai mendanai aksi-aksi teroris IRA yang berkedok sebagai dana program perdamaian, masih terus beroperasi tanpa hambatan hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bagian menyetop aliran dana kegiatan teroris tidak berlaku bagi *Noraid* dan *American Ireland Fund* tapi berlaku bagi organisasi-organisasi Islam.

2.1. PERANG DINGIN, STATE-SPONSORED TERRORISM, SANKSI DAN RASISME

⁵ “III. Strengthen Alliances to Defeat Global Terrorism and Work to Prevent Attacks Against Us and Our Friends” The White House President George W. Bush, diakses pada 2 April 2011, pukul 18:35, <http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2002/nss3.html>.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

National Security Strategy menyatakan akan memberantas segala bentuk terorisme, termasuk *state-sponsored terrorism*. Bagian lima *National Security Strategy* memperinci ciri-ciri *rogue state* (negara jahat) yang identik dengan *state-sponsored terrorism* sebagai berikut; (1) membantai rakyatnya sendiri dan mengeksploitasi sumber daya alamnya demi kekayaan pemimpin, (2) tidak mengindahkan hukum internasional, mengancam keselamatan negara-negara tetangga dan tidak mempedulikan perjanjian-perjanjian internasional yang mereka teken sendiri, (3) membuat atau menggunakan *Weapons of Mass Destruction* (WMD), baik untuk sekadar mengancam maupun benar-benar digunakan untuk pencapaian tujuan politik, (4) mendukung terorisme di dunia, dan (5) melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) serta membenci AS dan nilai-nilai yang dijunjungnya. Dari ciri-ciri di atas, AS tidak termasuk *rogue state* secara langsung, namun AS sudah terkenal melakukan *state-sponsored terrorism* secara tidak langsung terhadap negara-negara yang dianggap membahayakan kepentingannya atau “membenci AS dan nilai-nilai yang dijunjungnya”,⁸ seperti beberapa contoh yang akan dipaparkan di bawah.

Salah satu bentuk *state-sponsored terrorism* AS yang terkenal tentu saja adalah dukungan negara adikuasa ini terhadap Israel yang membantai Palestina sejak 1948. Menurut Richard M. Daulay dalam bukunya “*Religion in Politics: George W. Bush and The War on Terror*” (2011), alasan bantuan AS terhadap Israel dalam menjalankan aksi-aksi kejinya itu adalah sebuah kepercayaan yang diyakini oleh Bush Jr, seorang Kristen Fundamentalis. Kepercayaan tersebut bernama Teologi Dispensionalisasi, dimana sejarah dunia terbagi menjadi tujuh dispensasi, yang mana dispensasi pertama hingga kelima adalah masa kegelapan hingga kedatangan Yesus, dan masa yang kita lalui sekarang disebut “*The Church Time*”. Dalam “*The Church Time*” inilah berbagai perang terjadi (diantaranya Perang Salib, Perang Dunia I dan II, termasuk pula GWOT yang digalakkan Bush Jr.). Juga dalam masa ini, orang-orang Israel yang dijanjikan tanah kebebasan oleh Nabi Musa, harus diantarkan ke tanah tersebut yang merupakan Palestina sekarang sebelum kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Kedatangan Yesus

⁸ *Ibid.*

yang kedua ini adalah dispensasi ketujuh. Dalam hal ini, motif pribadi seorang pemimpin lebih dominan daripada keinginan mendominasi.⁹

Kemudian timbul pertanyaan, apakah AS pernah melakukan *state-sponsored terrorism* atas negara-negara Eropa demi menjaga dominasi dan hegemoni? Kebanyakan negara komunis di Eropa Timur, seperti Polandia dan Ukraina, hanya ditinggalkan AS karena memihak Rusia. AS tidak pernah sampai mengirimkan tentara atau menyokong kudeta demi terciptanya demokrasi, agar kelak AS bisa mengontrol negara-negara tersebut. Perang Dingin mungkin adalah contoh terbaik yang menggambarkan negara yang merasa perlu mempertahankan diri dan dominasi. Rusia dan AS sama-sama memiliki nuklir. Kemudian yang terjadi adalah *balance of power* (keseimbangan kekuasaan), dimana negara-negara yang tidak sekuat Rusia dan AS memihak salah satu dari kedua negara itu, yang disebut Blok Barat dan Blok Timur (negara-negara pendukung komunis Rusia di Eropa Timur itu kemudian bergabung dengan Rusia dan dikenal sebagai Uni Soviet). Kemudian ada pula negara-negara yang tidak memihak keduanya, dan sekumpulan negara itu disebut Non Blok. Indonesia termasuk salah satunya.

Tidak ada latar belakang bernuansa rasisme dalam Perang Dingin. Hanya perbedaan falsafah antara Rusia yang komunis dan AS yang kapitalis. Juga ketidaksetujuan Rusia mengenai pembuatan peta dunia setelah Perang Dunia II, yaitu keinginan AS dan berbagai negara di Eropa Barat seperti Inggris dan Prancis agar negara-negara demokrasi mendapat tempat terbesar dalam peta yang akan menjadi standar global. Dalam Perang Dingin, terdapat beberapa perang besar dengan negara-negara Asia, seperti Perang Vietnam, Perang Korea dan Perang Saudara di Cina. Juga tidak ada latar belakang rasis dalam keterlibatan ketiga negara Asia tersebut dalam Perang Dingin. Perang Saudara di Cina diakibatkan oleh perseteruan Partai Komunis pimpinan Mao Zedong dan Kuomintang pimpinan Chiang Kai Sek. Partai Komunis didukung oleh Uni Soviet sedangkan Kuomintang, yang akhirnya kalah dan melarikan diri ke Pulau Formosa yang kemudian menjadi Taiwan, dibekingi oleh AS. Begitu juga dengan Korea, pertarungan pengaruh antara AS dan Uni Soviet yang akhirnya melahirkan

⁹ Richard M. Daulay, *Religion in Politics: George W. Bush and The War on Terror*, (Jakarta: Penerbit Libri 2011), 46-47

Korea Utara dan Korea Selatan. Kasus Vietnam juga mirip, meskipun sedikit berbeda. AS menganggap lebih baik menguasai Vietnam secara klandestin terlebih dahulu sebelum Rusia berhasil menguasai negara bekas jajahan Prancis yang mulai memperlihatkan kecenderungan komunis itu.¹⁰

Jadi teori Chomsky tentang suatu negara menekan negara lainnya untuk mempertahankan diri berlaku pada Perang Dingin, dimana tidak ada latar belakang rasisme dalam keterlibatan negara-negara berpenduduk non-Kaukasia. Tetapi selama Perang Dingin, terjadi penerapan sanksi yang tidak seimbang antara negara-negara Eropa Timur pecahan Uni Soviet dan negara-negara Asia yang terlibat dalam perang tersebut. Menurut situs *American Foreign Relations*, hanya Rusia satu-satunya negara Eropa yang diberi sanksi terberat. Misalnya pada Maret 1949, Kongres meresmikan *Export Control Act* yang melarang ekspor senjata dan bantuan lainnya ke Rusia. Hal ini diperketat pada 1951, dimana AS mengancam akan menghentikan bantuan ke negara-negara yang tidak mengembargo barang-barang strategis seperti minyak ke Rusia. Sanksi bertambah ketat ketika Rusia menyerang Afghanistan pada 1979, dan pada 1983 Presiden Ronald Reagan menyetujui *National Security Direction Directive 75*, dimana AS melakukan tekanan-tekanan ekonomi agar Rusia melakukan revisi-revisi pada kebijakan militer dan luar negeri sesuai dengan keinginan AS.¹¹

Kepada Cina, Korea Utara dan Vietnam, AS memberlakukan berbagai sanksi yang terangkum dalam *Trading with The Enemy Act* yang dimulai pada 1950, tahun yang sama dimulainya Perang Korea. *Trading with The Enemy Act 1950* sebetulnya adalah revisi dari undang-undang bernama sama yang disahkan pada 1917, yang melarang masyarakat untuk mengirimkan uang atau logam mulia kepada orang-orang di negara musuh. *Trading with The Enemy Act* dikenakan pada Korea Utara dan Cina, dan diprotes para sekutu AS di Eropa. Akhirnya setelah lama menolak, AS membiarkan para sekutunya melakukan kerjasama dengan Cina mulai 1957. AS lalu menerapkan sanksi yang lebih berat pada Cina

¹⁰ John Lewis Gaddis, *The Cold War: A New History*, (London: Penguin Books London, 2007), 33-37

¹¹ *Ibid.*, hal 39-41

terkait insiden *Tiannanmen Square* pada 1989, dengan menyetop pengiriman senjata dan pembatalan investasi.¹²

Sanksi untuk Korea Utara terus dilakukan bahkan setelah Perang Dingin berakhir karena pelanggaran HAM, mengembangkan nuklir dan menyerang Korea Selatan. Sanksi sedikit melunak ketika terjadi kelaparan pada 1994, tiga tahun setelah berakhirnya Perang Dingin, setelah itu sanksi diberlakukan kembali. Vietnam Utara juga tidak luput dari sanksi setelah menyatakan keberpihakan pada Uni Soviet. Selama perang, pada 1954 Presiden Dwight Eisenhower menyetop izin ekspor ke Vietnam Utara, yang diperberat oleh Presiden Lyndon Johnson yang menghentikan transaksi finansial dan komersial ke sana. Ketika Vietnam Utara menganeksasi Vietnam Selatan pada 1973, sanksi semakin diperketat. Presiden Jimmy Carter yang hendak mengangkat sanksi ditentang keras oleh Kongres, hingga sanksi berlaku sampai Presiden Bill Clinton berkuasa pada 1994.

¹³

Selain negara-negara Asia, sanksi-sanksi AS dalam Perang Dingin berlaku pula pada Kuba, sebuah negara di Karibia. Presiden John F. Kennedy menetapkan sanksi yang melarang masuknya bahan-bahan pangan ke negara yang lama dipimpin Fidel Castro itu setelah revolusi 1959 dimana Kuba resmi menjadi negara komunis. AS bahkan mengancam NATO agar mengikuti kebijakan itu. Rusia tentu saja melihat kesempatan dengan memberikan berbagai bantuan pada Kuba. Setelah kejatuhan Rusia di akhir Perang Dingin, AS mengira dapat menancapkan pengaruh di Kuba, namun hingga saat ini Kuba masih komunis dan masih menjadi musuh AS.¹⁴

Kemudian ada pula sejumlah sanksi terkait Perang Dingin pada negara-negara Amerika Latin, seperti pada Republik Dominika ketika Presiden Rafael Trujillo naik setelah membunuh Presiden Romulo Betancourt. AS membatasi kuota gula dan melakukan embargo minyak dan truk. Kedua sanksi ini menyebabkan jatuhnya Trujillo. Lalu di Panama, AS menolak memberi bantuan

¹² *Ibid.*, hal. 43-46

¹³ *Ibid.*, hal. 50-53

¹⁴ *Ibid.*, hal. 54-55

barang dan finansial pada pemerintahan Manuel Noriega. AS melakukan sanksi-sanksi itu bukan karena Dominika dan Panama memihak Uni Soviet. Rusia bahkan tidak tertarik pada negara-negara ini karena tidak ada kepentingan dan juga karena sebelum Perang Dingin Panama dan Dominika sudah lemah. AS ternyata memberlakukan sanksi karena ingin menguasai kedua negara tersebut untuk memperjelas kekuatannya, dan dari sinilah *state-sponsored terrorism* AS atas negara-negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan terjadi. ¹⁵

Di Chili, sebuah kudeta yang didukung oleh AS menggulingkan Presiden Salvador Allende pada 1973. Kemudian Presiden Reagan mendirikan *Office of Public Diplomacy* pada 1981. Kantor ini mengendalikan *state-sponsored terrorism* AS di berbagai negara di Amerika Tengah, seperti Nikaragua, Guatemala dan El-Salvador. Di Nikaragua, pemerintahan Reagan mendukung Presiden Anastasio Somoza Debayle yang menindas rakyat sebelum akhirnya digulingkan oleh *Sandinista National Liberation Front* (SNLF). Di Guatemala, AS tadinya mendukung Jose Figueres, namun Figueres menolak untuk sepenuhnya tunduk pada negeri Paman Sam itu. Akibatnya AS mendukung kudeta yang dipimpin Rios Montt, yang membantai rakyat Guatemala hingga saat ini. Di El-Salvador, *The Farabundo Marti National Liberation Front* (FMNLF) melakukan kudeta yang disokong oleh Reagan, meski kelompok ini membunuh rakyat sipil tak berdosa. Selain untuk memperjelas kekuatan selama Perang Dingin, AS melakukan *state-sponsored terrorism* pada negara-negara ini karena ketiganya mulai menunjukkan keberpihakan pada Kuba. AS ingin seluruh dunia melaksanakan demokrasi agar negara-negara lain dapat mengakomodir kepentingan AS, dan ini berarti AS mempertahankan dominasi dan hegemoninya di dunia. ¹⁶

Terlepas dari konteks Perang Dingin yang merupakan pembuktian kekuatan AS dan negara-negara Asia terlibat tanpa latar belakang rasisme, tetap saja menarik mengapa AS melakukan *state-sponsored terrorism* atas negara-negara non-Kaukasia yang tidak sejalan dengannya seperti beberapa negara di

¹⁵15 Noam Chomsky, *Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance*, (New York: Metropolitan Books, 2003), 9-10

¹⁶ *Ibid.*, hal. 20

Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Perlu diingat bahwa AS juga memberlakukan sanksi yang cukup berat pada Vietnam, Cina dan Korea. AS tidak menerapkan sanksi berat pada negara-negara Eropa Timur bekas Uni Soviet, dan juga tidak menerapkan *state-sponsored terrorism* pada mereka. Satu-satunya penjelasan akan hal ini adalah rasisme, yang sudah begitu mendarah daging di AS.

State-sponsored terrorism kembali terjadi ketika Bush Jr. hendak menyerang Iraq pada awal 2003. Menurut Chomsky, ini adalah cara untuk mempertahankan harga diri AS dan untuk melakukan serangan, Bush Jr. meraih dukungan rakyat AS yang pada saat itu masih trauma dengan serangan 9/11 dengan mengatakan Al-Qaeda bersembunyi di Iraq dan Saddam Husein mempunyai nuklir. Lalu setelah serangan yang memporakporandakan Iraq serta menewaskan korban dari pihak militer dan sipil baik AS maupun Iraq pada Maret 2003, WMD tetap tidak ditemukan. Bush Jr. berkelit dengan mengatakan serangan dilancarkan setelah ditemukan alat-alat yang potensial digunakan untuk membuat WMD, yang menurut Chomsky hanyalah suatu cara untuk menjustifikasi strategi preventif yang selalu digunakan AS.¹⁷

Diplomasi publik untuk membenarkan suatu tindakan dalam upaya mempertahankan harga diri dan dominasi juga terjadi pada masa pemerintahan Reagan, yang disebut Chomsky "*Reaganesque Finale*". Dalam mendukung Presiden Somoza di Nikaragua, misalnya, Reagan mengatakan Somoza adalah sahabat AS yang sukses menerapkan demokrasi di negaranya dan Sandinista adalah kelompok berbahaya yang jika dibiarkan akan mengancam kedaulatan AS secara tidak langsung.¹⁸

Tentu saja baik Reagan maupun Bush Jr. tidak ada yang diajukan ke Mahkamah Internasional atas kasus *state-sponsored terrorism*. Begitu pula dengan presiden-presiden AS sebelum dan sesudah mereka. Tidak hanya di AS, di Inggris tidak seorang pun Perdana Menteri yang dibawa ke Mahkamah Internasional karena membiarkan konflik Irlandia Utara berlarut-larut. Hal yang sama terjadi pula pada Prancis yang menjajah negara-negara di Karibia dan

¹⁷ *Ibid.*, hal. 21-22

¹⁸ *Ibid.*, hal 23-24

Vietnam, Portugis yang menjajah Makau dan Belanda yang menjajah Indonesia. AS juga tidak pernah lantang bersuara agar negara-negara bekas penjajah itu bertanggung jawab, apalagi sampai menjatuhkan saksi pada mereka. Namun saat negara-negara non-Eropa terlibat pelanggaran HAM, seperti Pol Pot dan Khmer Merah di Kamboja, AS yang pertama mengajukan agar mereka diadili. Ini semakin menegaskan bahwa satu-satunya alasan yang masuk akal untuk ini semua adalah rasisme atau nosi etnisitas.

2.2. SEJARAH SINGKAT RASISME DI AS

Rasisme sudah ada sejak bangsa Eropa belum beremigrasi ke AS, dan setelah mereka tiba di AS, mereka segera menempatkan diri sebagai penguasa negara terbesar di benua yang ditemukan Christopher Columbus itu tanpa mengindahkan penduduk asli yakni Indian. Dalam membahas sejarah singkat rasisme ini, teori Lawrence Fuchs dalam "*American Kaleidoscope: Race, Ethnicity and Civic Culture*" (1991) akan digunakan. Dalam teori Fuchs, ada tiga jenis pluralisme; *coercive pluralism*, *sojourner pluralism* dan *voluntary pluralism*. *Voluntary pluralism* adalah pluralisme dimana semua orang dari etnis apapun merasa bagian dari suatu kebudayaan, dan mereka berpartisipasi dalam keberlangsungan suatu negara tanpa merasa terancam atau terpaksa. *Voluntary pluralism* lebih mudah terjadi pada imigran kulit putih meskipun harus melalui suatu proses. *Coercive pluralism* adalah pemaksaan suatu budaya ke dalam budaya lain, lazim terjadi pada orang-orang Indian dan Afrika-Amerika. Sedangkan *sojourner pluralism* sering terjadi pada imigran-imigran kulit berwarna seperti Asia dan Amerika Latin pada abad ke-18 dan 19, dimana mereka dikelompokkan menurut etnis masing-masing dan tidak diikutsertakan dalam kebudayaan negara baru mereka.¹⁹

Coercive pluralism terjadi pada warga kulit hitam yang datang ke AS sebagai budak dari Afrika. Mereka diperbudak karena beberapa alasan. Pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan imigran Eropa akan pembantu, karena pembantu-pembantu dari Eropa yang bekerja pada pegawai-pegawai perusahaan

¹⁹ Lawrence Fuchs, *The American Kaleidoscope: Race, Ethnicity and The Civic Culture*, (New Hampshire: The University Press of New England, 1991), 77-79

eksplorasi seperti *The Virginia Company* hanya lima tahun kontraknya. Setelah itu mereka biasanya membuka lahan pertanian sendiri. Kedua, terdapat pemahaman dalam bangsa Eropa bahwa negara apapun yang kalah berperang, rakyatnya boleh disimpan sebagai budak karena diperbudak jauh lebih baik daripada dibunuh. Memang pada abad ke-16 saat warga Eropa beramai-ramai pindah ke AS, negara-negara di Eropa terutama Inggris dan Spanyol sedang memperluas koloni ke seluruh dunia.²⁰

Selain pemahaman tersebut, justifikasi lainnya mengenai perbudakan adalah bagian “Kejadian” dalam Alkitab bahwa orang-orang Afrika merupakan keturunan Ham, anak Nabi Nuh yang dihukum Tuhan karena melihat ayahnya dalam keadaan telanjang. Dan seolah itu belum cukup, ada pula teori evolusi Charles Darwin tentang bagaimana manusia adalah keturunan hewan primata seperti monyet, dan bangsa kulit putih menganggap orang kulit hitam sebagai “*missing link*” antara manusia dan “nenek moyangnya” yaitu hewan primata. Memang, alat kelamin lelaki Afrika yang lebih besar dari alat kelamin lelaki Eropa, selain keseluruhan fisik mereka yang juga lebih besar, membuat laki-laki Afrika terlihat seperti setengah manusia setengah monyet di mata bangsa Eropa. Selain itu alat kelamin yang lebih besar tersebut menciptakan mitos bahwa napsu seksual pria Afrika lebih besar, dan itu membuat orang-orang Afrika terlihat lebih berdosa, karena seks pada masa itu dianggap sangat tabu.²¹

Sojourner pluralism ditandai oleh imigrasi orang-orang Asia ke Amerika, yaitu orang Jepang dan Cina. Imigran Eropa yang merupakan mayoritas di AS berusaha menahan arus kedatangan orang Cina dengan mengesahkan *The Chinese Exclusion Act* pada 1882. Tidak berhenti di situ, imigran Eropa berupaya dengan berbagai cara agar anak-anak imigran Cina dan Jepang yang lahir di AS tidak mendapat pengakuan, mencegah agar tidak terjadi nikah campur antara imigran Asia dan imigran Eropa, serta menekan imigran-imigran Asia tersebut agar tetap menjadi buruh.²² Selain mencegah agar tidak terjadi nikah campur, pemerintah

²⁰ Yvonne Yazbeck Haddad, *The Muslims of America*, (London: Oxford University Press, 1993), 54

²¹ *Ibid.*, hal 55-56

²² Peter Snetsinger. “Race and Ethnicity,” in *Encyclopedia of American Foreign Policy (Second Edition)*, ed. Louise B. Ketz (New York: Routledge, 2002), 203-204

juga mencegah agar tidak terjadi asimilasi budaya antara imigran Eropa dan Asia dengan cara mengharuskan anak-anak Jepang, terutama di Hawaii, bersekolah di sekolah-sekolah Jepang. Begitu tidak diakuinya keturunan Jepang di AS hingga pada saat mereka menawarkan diri berperang membela AS dalam Perang Dunia II, pemerintah tidak percaya dan malah mengirim mereka ke kamp-kamp konsentrasi.²³ Hal yang sama terjadi pula pada imigran Meksiko, dimana peraturan pemerintah menyatakan imigran yang cacat fisik, mental, dan miskin dilarang masuk AS (mudah ditebak bahwa pengertian “miskin” diterjemahkan secara luas oleh petugas-petugas imigrasi AS). Dan pemerintah AS berusaha menahan mereka di kelas bawah dengan menciptakan program Bracero yang menetapkan imigran Meksiko hanya bisa bekerja di sektor pertanian.²⁴

Voluntary pluralism, yang merupakan faktor mutlak terbentuknya *civic society*, seperti sudah disebutkan lebih banyak terjadi pada imigran Eropa. Walaupun demikian, juga seperti telah disebutkan sebelumnya, pluralisme jenis ini bukannya tanpa hambatan. Pada saat imigran-imigran kulit putih dari berbagai belahan Eropa datang ke AS untuk mencari kehidupan yang lebih baik, terjadi perseteruan yang kebanyakan didasari oleh agama, teknik bertani dan bagaimana mereka beradaptasi dalam lingkungan baru. Seperti yang terjadi di Pennsylvania pada abad ke-18, dimana imigran Jerman dipandang aneh karena teknik bertani mereka yang berbeda dan sehari-hari mereka tetap berbahasa Jerman (Inggris sudah menjadi bahasa standar sehari-hari saat itu), atau di Long Island dimana orang-orang Quaker diusir dari Flushing yang mayoritas Puritan.²⁵

Ketika akhirnya warga kulit putih dari belahan Eropa manapun bisa mengatasi berbagai perbedaan agama dan adat, hal ini sedikit banyak karena mereka menerima perbudakan orang Afrika. Mereka menerima karena bagian “Kejadian” di Alkitab yang sudah dibahas sebelumnya. Di sini terlihat bahwa agama adalah hal yang mempersatukan warga kulit putih, sedangkan susah untuk mencari sesuatu yang benar-benar dapat mempersatukan etnis-etnis non-Kaukasia

²³ Lawrence Fuchs, *The America Kaleidoscope: Race, Ethnicity and The Civic Culture*, (New Hampshire: The University Press of New England, 1991), 235-237

²⁴ *Ibid.*, hal. 111-112

²⁵ *Ibid.*, hal. 238-240

di dunia karena mereka datang dari berbagai kebudayaan dan kepercayaan yang berbeda-beda. Untuk mencapai *civic society*, semua etnis harus dapat merasa aman dalam mempraktekkan kebudayaan dan kepercayaan negeri leluhurnya, namun mereka juga harus merasa rela berpartisipasi dalam kebudayaan kolektif suatu negara dimana mereka berdiam.²⁶

2.3. SANKSI DAN RASISME DI LUAR PERANG DINGIN

Jika AS tidak bisa melakukan *state-sponsored terrorism* secara tidak langsung, maka biasanya negara yang baru saja memiliki Presiden kulit hitam pertama itu mengenakan sejumlah sanksi, seperti yang terjadi pada Myanmar. Negara sosialis tersebut memang sudah lama dipimpin junta militer dan baru-baru ini membebaskan Aung San Suu Kyi, pemimpin partai *The National League of Democracy* (NLD), dari tahanan rumah yang dijatuhkan padanya tahun 1993. Pemimpin *The State Law and Order Restoration Council* (SLORC), junta militer Myanmar, tidak hanya membatasi ruang gerak rakyatnya (diantaranya memenjarakan siapa saja yang berani memberitakan keadaan dalam negeri melalui internet tanpa proses pengadilan), tapi juga menindas suku-suku minoritas seperti Rohingya dan Kachin serta mengancam keselamatan turis-turis asing. Maka sejumlah sanksi pun datang, diantaranya embargo senjata pada 1993, disusul dengan larangan berinvestasi di Myanmar, disusul dengan penolakan impor dari Myanmar seperti permata dan kayu, yang merupakan ekspor terbesar negeri yang dulu dikenal sebagai Burma itu. AS juga membekukan sejumlah asset kekayaan para pejabat SLORC dan memperketat pemberian visa bagi pemohon dari Myanmar.²⁷

Marilah kita bandingkan dengan Hungaria, sebuah negara satelit Rusia yang sosialis. Antara tahun 1948 dan 1956, banyak demokrat dan intelektual yang dibunuh, dipenjara atau dikirim ke kamp konsentrasi atau kerja paksa tanpa proses peradilan. Semua ini terjadi di bawah kepemimpinan Matyas Rakosi selaku Sekretaris Jenderal Partai Komunis Hungaria. Kemudian terjadi revolusi dimana

²⁶ *Ibid.*, hal. 241-242

²⁷ Sai Wansai, "Ethnic Conflict in Burma: Historical Information, Cause of Conflict and Contemporary Politics", *Peace Hall* (2004), diakses pada 25 Desember 2010, pukul 17:10, <http://www.peacehall.com/news/gb/english/2004/01/200401270544.shtml>.

keadaan negara menjadi kacau sampai Perdana Menteri Imre Nagy naik dan kembali mendirikan demokrasi. Rusia menentang demokrasi dan kekacauan terus terjadi hingga 1956 dimana banyak warga Hungaria kabur keluar negeri (diantaranya AS) setelah perbatasan dibuka. Pada akhir revolusi, PM Imre Nagy digulingkan dan penggantinya, PM Janos Kadar memberlakukan sosialisme di negara kecil di Eropa Tengah itu dan mengeksekusi Nagy. Selama pemerintahan Kadar hingga 1988, sebanyak 21.600 orang reformis dan demokrat ditangkap, dipenjara dan dibunuh. Pada 23 Oktober 1989 PM Matyas Szuros mendeklarasikan Hungaria sebagai republik. Pada Maret 1990, Hungaria menjalankan pemilu yang dimenangkan Forum Demokrasi, menandakan perubahan arah Hungaria secara perlahan menuju kapitalisme. Pada Juni 1991 pasukan Rusia meninggalkan Hungaria.²⁸

Terlepas dari apakah Hungaria menganut demokrasi dan kapitalisme atau sosialisme, jelas sudah terjadi banyak pelanggaran HAM selama 32 tahun, antara 1956 dan 1988. Namun AS tidak pernah memberikan sanksi kecuali embargo senjata. Baru-baru ini pada Maret 2012, Uni Eropa merencanakan pemberian sanksi terhadap Hungaria yakni penangguhan dana pembangunan karena Hungaria tidak berhasil menurunkan defisit. Penyebab lain dari sanksi tersebut adalah undang-undang media yang restriktif dan kasus-kasus pelanggaran HAM.²⁹ Ini menarik karena Uni Eropa yang memberi sanksi dan bukannya AS yang terkenal gemar memberi sanksi terhadap negara-negara yang terkena kasus pelanggaran HAM dan pembatasan kebebasan berpendapat.

Berbagai sanksi juga diturunkan AS di negara kecil di Afrika Barat, *Ivory Coast*. Pada 8 Februari 2006, Bush Jr. melalui OFAC melarang warga negara AS atau siapapun yang sedang berada di AS untuk berinteraksi dengan individu atau organisasi yang mengancam keselamatan atau proses perdamaian di *Ivory Coast*, melanggar hukum internasional di *Ivory Coast*, terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam distribusi senjata atau bantuan militer lainnya ke *Ivory Coast*,

²⁸ Mary Elise Sarote, 1989: *The Struggle to Create Post Cold War Europe*, (New Jersey: Princeton University Press, 2009), 33-38

²⁹ "EU Plans for Sanctions Against Hungary," *The Irish Times*, diakses pada 8 April 2012, pukul 16:25, <http://www.irishtimes.com/newspaper/finance/2012/0314/1224313272462.html>.

menyebarkan kebencian dan menyediakan bantuan keuangan pada orang atau organisasi yang dimasukkan ke daftar hitam pemerintah AS seperti Martin Kouakou, pemimpin *Nouvelle Forces*, sebuah partai oposisi yang dituduh memprovokasi kerusuhan dalam aksi protes perpanjangan masa pemerintahan Presiden Laurent Gbagdo. *Office of Foreign Assets Control* (OFAC) memberikan hukuman yang cukup berat bagi siapa saja yang melanggar sanksi-sanksi itu, diantaranya denda US\$500.000 atau penjara maksimal 10 tahun jika seseorang ketahuan berhubungan dengan sebuah organisasi *Ivory Coast* yang ada di daftar hitam.³⁰

Negara Eropa yang juga pernah diberi sanksi oleh Bush Jr. adalah Belarus, yang terletak di Eropa Timur dan merupakan pecahan Uni Soviet.³¹ Selain Belarus, negara-negara Balkan juga termasuk daftar negara yang dibebani sanksi, namun tidak seperti Balkan yang dalam dokumen *The US Department of Treasury* diberi sanksi secara kolektif³² dan seperti diketahui negara-negara di Balkan juga ada yang mayoritas Muslim, seperti Bosnia dan Herzegovina, Belarus berpenduduk mayoritas Kristen Ortodoks Rusia. Pada 19 Juni 2006, Bush Jr. mengeluarkan sanksi terhadap Belarus dimana organisasi atau individual yang terlibat pelanggaran HAM atau pembatasan demokrasi dilarang untuk memiliki tanah atau properti lainnya di AS. Larangan itu juga berlaku pada anggota keluarga atau anggota organisasi yang dituduh melakukan pelanggaran yang disebut di atas, juga pada mereka yang terbukti memberi bantuan kepada atau bertindak mewakili pelanggar.³³ Selama dua periode masa pemerintahannya,

³⁰ "What You Need to Know About US Sanctions: Cote 'D'Ivoire," The US Department of Treasury Office of Foreign Assets Control, diakses pada 9 April 2012, pukul 13:10, <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/coted.pdf>.

³¹ "What You Need to Know About US Sanctions: Belarus," The US Department of Treasury Office of Foreign Assets Control, diakses pada 9 April 2012, pukul 13:20, <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/belarus.pdf>.

³² "What You Need to Know About US Sanctions: The Balkans," The US Department of Treasury Office of Foreign Control Assets, diakses pada 9 April, pukul 13:10, <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/balkans.pdf>.

³³ "What You Need to Know About US Sanctions: Belarus," The US Department of Treasury Office of Foreign Assets Control, diakses pada 9 April 2012, pukul 13:20, <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/belarus.pdf>.

selain Belarus, Pantai Gading, negara-negara Balkan dan Myanmar, Bush Jr. juga memberi sanksi pada Libya, Korea Utara, Sudan, Syria dan Zimbabwe.³⁴

Pada tahun 2007, *The US Department of State* di bawah Condoleezza Rice mempublikasi enam belas negara yang dimasukkan daftar hitam karena perdagangan manusia. Keenambelas negara itu adalah Zimbabwe, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Malaysia, Myanmar, Iran, Korea Utara, Kuba, Arab Saudi, Syria, Uzbekistan, Venezuela, Papua Nugini dan Algeria. Yang mengejutkan, Kuwait, Bahrain dan Oman adalah sekutu AS, dan hingga kini masih ada pertanyaan mengapa Rusia dan Ceko-slovakia tidak dimasukkan ke daftar hitam padahal kedua negara ini juga terkenal terlibat perdagangan manusia.³⁵

Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran HAM yang diberlakukan AS terhadap negara-negara yang disebut di atas disebut Chomsky sebagai intervensi humanis (*humanitarian intervention*) dalam bentuk baru imperialisme yang dilakukan AS. Kata kunci dari imperialisme modern ini adalah kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan apabila dilakukan oleh musuh, bukan oleh sekutu-sekutu AS apalagi AS sendiri. Hal ini sangat terlihat dalam hubungan AS dan Israel, yang disebut Chomsky sebagai "*client state*". Pada bulan Mei 2003, dua orang aktivis hak-hak sipil Israel melaporkan "likuidasi" yang dilakukan tentara Israel terhadap anggota-anggota Intifada di Al-Aqsa pada November 2000 hingga April 2003. Dalam operasi itu, 235 orang terbunuh. Di antara 235 orang itu ada 156 yang dicurigai sebagai "teroris", berarti sisanya adalah rakyat sipil. Aksi likuidasi itu disebut juga "pembinasaaan bertarget" untuk menumpas "kejahatan terorisme". Tentu saja aksi ini didukung oleh AS, yang pada Oktober di tahun yang sama mengirim misil ke Yemen melalui Israel.³⁶

Chomsky lalu membandingkannya dengan apa yang terjadi dalam hubungan antara AS, Irak dan Israel. Irak tadinya merupakan salah satu sekutu

³⁴"Sanctions Programs and Country Information," The US Department of Treasury Resource Center, diakses pada 9 April 2012, pukul 13:00, <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx>.

³⁵"US Allies Put on Trafficking List," BBC News, diakses pada 10 April 2012, pukul 09:00, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/6747915.stm>.

³⁶Noam Chomsky, *Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance*, (New York: Metropolitan Books, 2004), 38-42

AS. Ketika Israel melancarkan serangan bom ke reaktor Osirak pada Juni 1981, AS mengkritisi serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Pada saat itu, tidak ada hukuman apapun yang dijatuhkan AS ke Israel, tidak ada daftar hitam apalagi sanksi. Hubungan AS dan Irak mulai menegang ketika Irak menginvasi Kuwait pada Agustus 1990. Dari sini sikap politik AS terhadap serangan Israel ke Osirak berubah, dari pelanggaran hukum internasional ke hal yang lumrah dilakukan dalam rangka mempertahankan diri. Serangan ke Intifada di Mesjid Al-Aqsa juga sebagai aksi yang normal dalam upaya mempertahankan diri. Di sini Chomsky berargumentasi bahwa kejahatan adalah norma bila dilakukan oleh “tangan yang benar”, dalam hal ini AS dan sekutu utamanya Israel. Tidak ada unsur rasisme sama sekali.³⁷

Tidak adanya unsur rasisme dalam hubungan AS, Israel dan Irak di atas tidak sepenuhnya benar. Hubungan Irak dan AS langsung memburuk ketika Irak menginvasi Kuwait, sedangkan hubungan Israel dan AS hingga saat ini tetap berlangsung, padahal tidak terhitung berapa serangan yang dilancarkan Israel ke Palestina sejak 1948. Kembali ke persoalan sanksi AS dalam kasus perdagangan manusia yang diberikan ke tiga negara sekutunya, Bahrain, Kuwait dan Omar, ada baiknya kita kembali mempertanyakan mengapa Rusia dan Ceko, kedua negara Eropa, tidak disanksi. Rasisme adalah jawaban dari kedua kasus di atas.

Inggris juga banyak terlibat dalam pelanggaran HAM, terutama pada kasus Irlandia Utara, seperti kasus meninggalnya beberapa aktivis aksi kelaparan yang mana dua diantaranya adalah anggota parlemen. Pada tahun 1978, pemerintah Irlandia Utara sebagai tangan kanan London mencabut status khusus tahanan politik aktivis IRA yang memperbolehkan mereka tidak mengenakan seragam, tidak mengikuti kegiatan penjara dan menerima lebih banyak surat dan paket. Bagi mereka, penghapusan status tahanan politik (atau tahanan khusus) sama dengan memperlakukan terorisme sebagai kriminalitas biasa. Para tahanan IRA pun kemudian menolak mengenakan seragam dan hanya mengenakan selimut sebagai bentuk protes. Tidak mempan, mereka meningkatkan aksi dengan “*dirty protest*”, yakni membuang hajat di sel bukan di toilet dan menolak

³⁷ *Ibid.*, hal 36-37

membersihkannya, menolak mandi dan mencuci barang-barang mereka. Pemerintah tetap tidak bergeming. Pada Maret 1981, aksi kelaparan (*hunger strike*) dimulai.³⁸

Dalam aksi ini dua orang anggota parlemen Inggris dari Tyrone dan South Fermanagh, Irlandia Utara, meninggal. Mereka adalah Frank Maguire dan Bobby Sands. Maguire terpilih untuk duduk di parlemen Inggris pada tahun 1974 sebagai calon independen dan ditangkap karena keterlibatannya dalam IRA. Sands juga merupakan calon independen, tapi namanya mulai masuk bursa calon anggota *House of Commons* Inggris setelah ditahan dan menang karena simpati orang terhadap perjuangan kaum Republikan, yaitu warga Katolik di Irlandia Utara yang menginginkan Irlandia Utara bergabung dengan Irlandia (yang juga dikenal sebagai Republik Irlandia). Saat Maguire dan Sands meninggal, Inggris menuai banyak kecaman di seluruh dunia karena membiarkan dua anggota parlemennya meninggal dan membiarkan aksi kelaparan terus berlangsung hingga menjatuhkan lebih banyak korban.³⁹ Sikap Inggris ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, namun AS tidak pernah menjatuhkan sanksi apapun terhadap salah satu negara kerajaan tertua di dunia ini. Argumen bahwa itu karena Inggris merupakan sekutu terkuat AS tidak cukup kuat, karena Irak tadinya juga merupakan sekutu terkuat AS. Namun dimana Irak tidak direstui AS atas serangan ke Kuwait, Israel dan Inggris tetap bebas dari daftar hitam apalagi sanksi. Sedikit banyak hal itu karena penduduk Irak adalah Arab dan beragama Islam.

2.4. GWOT DAN RASISME DI DALAM NEGERI

Imperialisme modern gaya AS juga berlaku dalam urusan dalam negeri. Setelah serangan 9/11 Bush Jr. merasa harus mendisiplinkan warganya di dalam negeri dengan hak untuk menyatakan mereka sebagai “kombatan musuh” atau “tersangka teroris” yang dapat dipenjarakan hanya karena tuduhan terorisme tanpa mendapat pembelaan. Ini sejalan dengan gerakan *Global War on Terrorism* (GWOT) yang digerakkannya, dimana Bush Jr. memberlakukan beberapa aspek

³⁸ Mike Cronin, *Irish History for Dummies*, (Sussex: John Wiley & Sons Ltd, 2011), 355-356

³⁹ *Ibid.*

hukum perang Konvensi Geneva.⁴⁰ “Pendisiplinan” warga ini juga yang mendasari berdirinya *The House Homeland Security Committee* yang dikepalai Peter King, pasca 9/11. Seperti telah ditulis di bab pertama, pada Maret 2011 *Homeland Security* menyelenggarakan sidang radikalisasi warga Muslim yang didasari laporan mengenai saudara atau keluarga mereka yang mendadak radikal atau bahkan menghilang. Banyak yang mencoba mencegah sidang ini, termasuk Partai Demokrat, dengan alasan akan menimbulkan sentimen dalam masyarakat Muslim AS, namun King berkeras dengan dalih warga Muslim kurang berpartisipasi dalam menjaga keamanan nasional. Sidang ini dapat dibaca sebagai pemerintah AS di bawah Presiden Barack Obama menuduh masyarakat Muslim sebagai “tersangka teroris.” Perlu diketahui bahwa inilah pertama kalinya sidang yang mendiskreditkan etnis tertentu semacam itu diselenggarakan *Homeland Security*.⁴¹

Terorisme tentunya bukan hal baru dalam kehidupan sehari-hari dalam negeri AS. Sebelum 9/11, AS pernah menangani sebuah kasus terorisme pada 1995, dimana Timothy McVeigh megebom *Alfred P. Murrah Federal Building* di Oklahoma, menewaskan 168 orang dan melukai ratusan orang lainnya. McVeigh adalah seorang mantan tentara yang berperang di Perang Teluk, anggota Partai Republik, dan setelah lepas dari militer dia menjual senjata-senjata. Tidak ada bukti yang menunjukkan dia pernah bergabung dengan kelompok supremasi kulit putih apapun. Motif McVeigh dalam megebom *Alfred P. Murrah Building* murni kemarahan akibat razia terhadap senjata dan obat-obat terlarang yang dilakukan *Federal Bureau of Investigation* (FBI) dan *The Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives* (BATFE) yang berlangsung ricuh dan menewaskan banyak warga sipil, termasuk anak-anak dan wanita hamil, di Texas dan Idaho pada 1992 dan 1993. Aksi McVeigh, yang dihukum mati pada 11 Juni

⁴⁰Allen S. Weiner, “Law, Just War or International Fight Against Terrorism?” *Center on Democracy, Development and The Rule of Law Stanford Institute of International Studies* 47 (2005): 13-16, diakses pada 20 Juni 2011, pukul 19: 11, http://iis-db.stanford.edu/evnts/4282/Weiner_sep05.pdf.

⁴¹David A. Fahrentold and Michelle Boorstein, “Rep Peter King’s Muslim Hearings: A Key Moment in An Angry Conversation,” *The Washington Post* (2011): diakses pada 11 April 2012, pukul 11:07, <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/03/09/AR2011030902061.html>.

2001, dianggap aksi teroris terbesar sebelum 9/11.⁴² Sekalipun begitu, berbeda dengan setelah 9/11, pemerintah AS tidak pernah memberlakukan keadaan “siaga perang” setelah serangan McVeigh.

Dalam sebuah wawancara dengan *The Herald Standard* pada Oktober 2008, Direktur *Homeland Security*, James Powers, menyatakan McVeigh bukan seorang teroris. Powers hanya menganggap McVeigh seseorang pemuda labil yang marah pada pemerintah.⁴³ Siapa pun bisa melihat di sini bahwa ketika seorang kulit putih melakukan aksi terorisme, pemerintah AS terlihat hanya menganggapnya sebagai kriminalitas biasa. Tapi ketika seorang keturunan Timur Tengah dan beragama Islam melakukan sebuah *indiscriminate violence*, mendadak sontak semua orang berwajah Timur Tengah dan beragama Islam dianggap berbahaya.

Hal ini disetujui oleh professor hukum dari *Yale University*, Jack Balkin, yang diwawancarai Chomsky untuk “*Hegemony or Survival*.” Dalam membahas draft *Domestic Security Enhancement Act* 2003 yang bocor dari *Center of Integrity*, Balkin mengatakan *Domestic Security Enhancement Act* 2003 mengintimidasi hak-hak konstitusional dengan memberikan negara kewenangan untuk mencabut kewarganegaraan dengan tuduhan mendukung organisasi yang dimasukkan daftar hitam, bahkan jika warga negara itu tidak tahu bahwa organisasi tersebut berada di daftar hitam. “*Give a few dollars to a Muslim charity The Department of Justice thinks is a terrorist organization, you could be on the next plane out of this country,*” ujar Balkin.⁴⁴

Di antara organisasi-organisasi Islam yang dianggap teroris oleh *Department of Justice* adalah *The Students Islamic Movement of India* (SIMI). SIMI didirikan di Uttar Pradesh, India, pada 25 April 1977 oleh Muhammad

⁴²“Timothy McVeigh”, CNN.com, diakses pada 11 April 2012, pukul 10:20, http://articles.cnn.com/2001-03-29/us/profile.mcveigh_1_timothy-mcveigh-oklahoma-city-bombing-religion-basic-training-fort-bragg/2?_s=PM:US.

⁴³ Will Potter, “Homeland Security Says Timonthy McVeigh Wasn’t A Terrorist but A Peace Activist,” *The Herald Standard* (2008), diakses pada 12 April 2012, pukul 10:35, http://www.heraldstandard.com/site/news.cfm?newsid=20151835&BRD=2280&PAG=461&dept_id=480247&rfi=6.

⁴⁴ Noam Chomsky, *Hegemony or Survival: America’s Quest for Global Dominance*, (New York: Metropolitan Books 2004), 27

Ahmadullah Siddiqi yang kini menjabat Professor Sastra Inggris dan Jurnalisme di *Western Illinois University*. Mungkin karena memiliki latar belakang perseteruan dengan organisasi-organisasi Hindu yang berakhir klandestin dan didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa Islam garis keras, pada 27 September 2001 SIMI dilarang beroperasi oleh pemerintah India dan AS. SIMI mengalami tiga kali larangan hingga larangan terakhir dicabut pada Agustus 2008. Meskipun SIMI berbasis di India, seperti Jemaah Islamiyah (JI) di Indonesia, SIMI memiliki banyak koneksi dengan berbagai organisasi Islam garis keras di seluruh dunia, diantaranya *World Assembly of Muslim Youth* di Riyadh, Arab Saudi, dan *Consultative Committee of Indian Muslims* di Chicago, AS. Tuduhan AS bahwa SIMI memiliki hubungan dengan Al-Qaeda tidak pernah terbukti.⁴⁵

Organisasi Islam internasional lainnya yang juga dilarang beroperasi oleh pemerintah AS adalah *The Muslim Brotherhood*. Organisasi yang didirikan di Mesir oleh Hasan Al-Banna pada 1928 ini memiliki banyak representatif di seluruh dunia, termasuk AS. Meskipun tidak dilarang beroperasi, banyak yang menyuarakan kekhawatiran atas keberadaan *The Muslim Brotherhood* di AS. Di antaranya adalah Juan Zarate, mantan anggota staff ahli terorisme Gedung Putih, yang menyatakan bahwa yang membuat *The Muslim Brotherhood* berbahaya bukan karena ideologi atau falsafah yang dijunjungnya, tetapi dukungan mereka untuk kekerasan terhadap rakyat sipil untuk mencapai tujuan politik. Hal yang sama juga dinyatakan oleh banyak tokoh penting di AS, termasuk Dennis Ross, mantan duta Gedung Putih untuk misi perdamaian di Timur Tengah. Lalu koran bisnis internasional *The Financial Times* menurunkan artikel pada 8 November 2001 yang memberitakan adanya hubungan antara Al-Taqwa, sayap pendanaan Al-Qaeda, dengan *The Muslim Brotherhood*.⁴⁶

Sementara organisasi-organisasi Islam dilarang beroperasi atau setidaknya menghadapi berbagai tuduhan kekerasan dan hubungan dengan Al-Qaeda, *Noraid*, tetap beroperasi hingga saat ini. Tidak ada suara miring dari tokoh-tokoh penting

⁴⁵ "Students Islamic Movement of India," South East Asia Terrorism Portal, diakses pada 13 April 2012, pukul 10:24, <http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/terroristoutfits/simi.htm#>

⁴⁶ Heba Saleh, "Islamists Ahead in Early Egypt Poll Count," *The Financial Times* (2001), diakses pada 13 April 2012, pukul 10:40, <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/403961ec-1b2b-11e1-8b11-00144feabdc0.html#axzz1sxFnNBDg>.

pemerintahan tentang organisasi yang berdiri pada 1969 ini, meskipun di masyarakat sendiri banyak yang yakin bahwa dana yang disalurkan ke Noraid digunakan untuk membeli senjata dan mendanai serangan-serangan teroris IRA (dan grup pecahannya *Provisional IRA* dan *Real IRA*).

Menarik untuk diperhatikan bahwa IRA telah lama menjalin hubungan jual beli senjata dengan Libya, salah satu negara yang dianggap negara jahat oleh AS dan telah banyak menerima sanksi dari negeri Paman Sam itu. Hubungan jual beli senjata tersebut bahkan digawangi sendiri oleh Ayesha Gaddafi, putri Muammar Gaddafi. Sanksi-sanksi yang diberikan AS terhadap Libya lebih dikarenakan pelanggaran HAM rezim Gaddafi. Sebuah laporan BBC berjudul "*Rich Friends in New York*" oleh Jonathan Duffy yang diturunkan pada 26 September 2001, selain memberitakan tentang bergantungnya IRA pada sumbangan donator-donatur AS, juga tentang kader-kader IRA yang berlatih militer di Kolombia dan kunjungan Gerry Adams, ketua partai sayap politik IRA Sinn Fein, ke Kuba.⁴⁷ Kolombia sudah beberapa disanksi AS karena pelanggaran HAM pemerintahnya terhadap rakyat dan Kuba adalah musuh AS sejak Perang Dingin. Hal ini menunjukkan pemerintah AS tutup mata mengenai kegiatan-kegiatan IRA yang subversif dan melibatkan musuh-musuhnya, tapi cepat bertindak bila yang melakukan kegiatan semacam itu adalah organisasi Islam.

2.5. KESIMPULAN

Perang Dingin memang dilatari ketakutan akan penyerangan dengan senjata nuklir, yang lalu berkembang menjadi pertarungan pengaruh dalam skala global. Tidak ada unsur rasisme dalam latar belakang tersebut yang menjelaskan keterlibatan berbagai negara di dalam perang tersebut, termasuk negara-negara berpenduduk non-Kaukasia. Di sini teori Chomsky mengenai negara yang menyerang didasari keinginan untuk mendominasi untuk mempertahankan hegemoni memang benar, tapi berhenti sampai di situ. Dilihat lebih jauh yakni dari segi sanksi dan penggunaan *state-sponsored terrorism* dalam memperluas pengaruh, peran rasisme terlihat jelas. Tidak ada negara-negara di Eropa selain

⁴⁷ Jonathan Duffy, "Rich Friends in New York," *BBC News* (2001), diakses pada 7 November 2011, pukul 12:10, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1563119.stm>.

Rusia yang diberi sanksi berat karena bergabung dengan Uni Soviet. Sanksi berat hanya berlaku pada Cina, Vietnam dan Korea karena memihak Uni Soviet, serta *state-sponsored terrorism* hanya terjadi di negara-negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan karena berpihak ke Kuba yang menjadi antek Rusia, selain menjadi alat bagi AS untuk menaklukkan negara-negara itu.

Di luar konteks Perang Dingin, sanksi dan daftar AS atas pelanggaran HAM hanya terjadi pada negara-negara non-Kaukasia pula seperti Myanmar dan *Ivory Coast*. Dalam kasus daftar hitam karena kasus perdagangan manusia seperti dicontohkan sebelumnya, negara-negara sekutu AS yang tidak berpenduduk mayoritas kulit putih juga masuk ke daftar hitam, seperti Bahrain. Ini artinya teori Chomsky tentang “kejahatan adalah bukan kejahatan bila dilakukan oleh ‘tangan yang benar’”, dalam hal ini ‘tangan yang benar’ adalah AS dan para sekutunya, tidak benar. Inggris, negara kulit putih sekutu AS lainnya, tidak pernah disanksi atau dimasukkan daftar hitam karena membiarkan konflik Irlandia Utara terus berjalan sejak awal abad ke-20, yang menyebabkan serangan-serangan terorisme IRA terus merajalela. Jadi ‘tangan yang benar’ adalah AS dan negara-negara kulit putih.

BAB III

PERDAGANGAN BEBAS DAN NOSI ETNISITAS

Bab ini akan membuktikan bahwa nosi etnisitas tetap merupakan faktor utama yang menentukan kebijakan-kebijakan luar negeri AS, seperti telah dibuktikan di bab sebelumnya bahwa nosi etnisitas atau rasisme dan bukan keinginan untuk mendominasi yang menjadi faktor utama. Di sini nosi etnisitas akan disejajarkan dengan perdagangan bebas sebagai argumentasi kebijakan luar negeri AS terhadap terorisme.

Perdagangan bebas berpengertian perdagangan antara dua negara atau lebih yang didasarkan pada persediaan dan permintaan (*supply and demand*), dan tidak dibebankan tarif (misalnya tarif distribusi), sehingga harga suatu barang bisa sama dimanapun barang itu dipasarkan. Perdagangan bebas seringkali dipandang merugikan karena harga yang sama di banyak tempat berarti biaya produksi harus ditekan, dan itu berimbas pada gaji buruh. Karena keadaan yang berbeda antara satu daerah dan yang lainnya, gaji buruh yang memadai di satu daerah belum tentu memadai di daerah yang lain.

Seperti telah dibahas di bab II, AS sangat gemar menerapkan demokrasi dimanapun dengan cara apapun, bahkan yang ekstrim seperti *state-sponsored terrorism*. Keinginan agar seluruh dunia berdemokrasi itu tujuannya agar mereka dapat mengakomodir kepentingan AS, yang termasuk monopoli perdagangan bebas. Monopoli ini bertujuan agar barang-barang produksi AS harganya tidak naik agar tetap terjangkau oleh masyarakat luas. Jika penjualan barang-barang produksi AS besar di luar negeri, perekonomian AS akan bertambah kuat, dan perekonomian negara tujuan distribusi melemah (antara lain disebabkan oleh masyarakat negara tersebut yang memilih jenis barang yang sama produksi AS daripada produksi negaranya karena kualitas produksi AS lebih tinggi). Jika keadaan perekonomian suatu negara melemah, tentunya negara tersebut tidak menjadi ancaman bagi AS.

3.1. PERDAGANGAN BEBAS, SANKSI DAN RASISME

Dalam kasus penyerangan AS ke Iraq pada 2003, menurut dokumen-dokumen PBB yang dikutip oleh Chomsky, salah satu alasan penyerangan selain tuduhan kepemilikan WMD adalah bahwa Saddam Husein hendak mengakhiri kontrol AS atas minyak di Iraq, dan kuasa mereka dalam menentukan siapa saja yang duduk di pemerintahan negara itu. Lebih detil, alasan itu datang dari beberapa perusahaan yang tadinya sudah diberi lisensi oleh pemerintah AS untuk mengolah minyak di Iraq, namun karena sanksi-sanksi yang diberikan AS pada Iraq terkait serangan ke Kuwait dan pelanggaran HAM pemerintah Saddam Husein terhadap rakyatnya sendiri, perusahaan-perusahaan tersebut kesulitan melakukan kegiatan bisnis di Iraq.¹

Perdagangan bebas AS dengan negara-negara Eropa dan negara berpenduduk mayoritas kulit putih lainnya seperti Kanada, Australia dan Selandia Baru terlihat lancar saja. Orang bisa saja menggampangkan apa yang terjadi dengan perdagangan antara AS dan Iraq sebagai imbas dari serangan Iraq ke Kuwait yang menyebabkan AS merasa terancam dan semakin merasa perlu menguasai minyak Iraq, dan hubungan perdagangan antara negara-negara seperti Australia dan Kanada tetap lancar karena mereka tidak memiliki komoditi dagang atau pasar yang sangat diperlukan AS dan juga tidak pernah mengancam keberadaan AS sebagai “polisi dunia”.

Hubungan dagang antara Australia dan AS akan dijadikan contoh bagaimana serangan AS ke Iraq tidak berkaitan dengan perdagangan bebas semata. Perjanjian perdagangan bebas Australia dan AS terangkum dalam *The Australia-United States Free Trade Agreement (AUSFTA)*, dimana disebutkan bahwa dua per tiga dari tarif ekspor agrikultur ke AS, terutama domba, daging domba dan produk-produk hortikultur, sudah dipotong. Pada tahun 2008, tarif 10% untuk ekspor komoditas tersebut diadukan, dan direncanakan pada 2022 semua produk agrikultur sudah bebas tarif, kecuali gula dan produk susu. Kemudian sebanyak 97% impor komoditas non-agrikultur dibebaskan dari tarif,

¹ Noam Chomsky, *Hegemony or Survival: American's Quest for Global Dominance*, (New York: Metropolitan Books), 46-47

dan diharapkan pada 2015 semua komoditas impor non-agrikultur dari AS sudah bebas tariff. Selain itu juga terdapat kerjasama jasa yang mengharuskan pasar di AS menampung tenaga kerja dari Australia di bidang transportasi, pendidikan, keuangan dan lingkungan. Terakhir ada pula kerja sama logistik pemerintahan yang pada tahun 2011 bernilai US\$ 535 juta.²

Sedikit mirip dengan kasus serangan Irak ke Kuwait, Australia menduduki Timor Leste setelah negara kecil ini merdeka dari Indonesia pada 1999. Saat itu pulalah Australia mulai mengeksploitasi empat tambang minyak di Timor Leste, yakni Bayu Undan, Elang Kakatua, *Greater Sunrise* dan Laminaria Corralina. Hal ini menarik perhatian berbagai organisasi non-pemerintah (*Non-Governmental Organization* (NGO) di AS seperti *East Timor Action Network* (ETAN) yang kemudian mengirim petisi ke Perdana Menteri Australia saat itu, John Howard, agar menghentikan eksploitasi yang merugikan Timor Leste. Pemerintah dan media Australia tidak mengindahkan protes itu, begitu pula dengan pemerintah AS. John Howard kemudian memaksa pemerintah Timor Leste di Dili agar menandatangani perjanjian batas-batas kelautan yang menjadi dasar Australia untuk mengeksploitasi keempat tambang minyak. AS tidak pernah memberikan sanksi pada Australia yang dipandang dunia sebagai penjajah Timor Leste, tidak berbeda dengan Portugis dan kemudian Indonesia, apalagi sampai menyerang Australia.³ Mengeksploitasi sumber daya alam Timor Leste dan otomatis membiarkan rakyatnya tetap miskin jelas merupakan pelanggaran HAM, dan okupasi pasukan Australia di Timor Leste bahkan bisa dilihat sebagai mendahului posisi AS yang selalu ingin menguasai negara yang lemah dan miskin tapi kaya sumber daya alam. Jelas ada nosi etnisitas yang bermain dalam perlakuan AS terhadap Australia di sini.

3.2. TERORISME DAN PERDAGANGAN BEBAS: INGGRIS, AS DAN INDONESIA

² "Australia-United States Free Trade Agreement," Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, diakses pada 13 April 2012, pukul 12:40, <http://www.dfat.gov.au/fta/ausfta/index.html>.

³ Max Lane, "East Timor: Australia's Double Betrayal," *Green Left* (2000), diakses pada 13 April 2012, pukul 12:55, <http://www.greenleft.org.au/node/30299>.

Nosi etnisitas juga dapat dengan jelas terlihat dalam hubungan dagang antara AS dan Indonesia. Menurut Gabriel Chen dalam artikelnya “*A Glass Half Full: The Indonesia-US Relations in The Age of Terror*” (2005), hubungan dagang itu sudah bermasalah sejak kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, yaitu dengan dukungan Presiden Harry Truman pada pemerintah Belanda untuk menduduki kembali Indonesia. Itulah nosi etnisitas pertama yang terlihat dalam konteks hubungan antara Indonesia dan AS ini. Kemudian dalam krisis moneter tahun 1997, *International Monetary Fund* (IMF) mensyaratkan Indonesia menyetop subsidi pangan dan merombak total sistem ekonominya, suatu syarat yang mengakomodir kepentingan tidak hanya IMF tapi juga *World Bank* dan badan-badan bantuan ekonomi barat lainnya. Karena persyaratan IMF itu, dalam sekejap 20% populasi Indonesia terpuruk dalam kemiskinan, karena diantara berbagai bentuk dirombaknya sistem ekonomi sejumlah bank dilikuidasi dan hal ini membuat angka pengangguran melonjak. Stabilitas politik juga menjadi syarat bantuan IMF. IMF segera menarik bantuan ketika referendum di Timor Timur (sebelum menjadi Timor Leste setelah merdeka) dilaksanakan.⁴

Selepas jatuhnya Presiden Soeharto pada 1998, Pew mengadakan jajak pendapat mengenai sikap politik publik Indonesia, yang hasilnya dikutip oleh Chen. Sebuah angket Pew pada tahun 2003, misalnya, menunjukkan Indonesia tidak mempercayai AS meskipun mereka menikmati kebudayaan pop dan pendidikan AS. Hal ini selain karena berpihaknya AS ke Belanda saat Indonesia baru merdeka dan IMF yang barat sentris dalam memberikan bantuan, juga karena sikap AS yang terlalu memihak Israel dalam kasus Palestina. Yang terakhir itu disebabkan simpati umat Muslim Indonesia kepada rakyat Palestina, meskipun praktek Islam di Indonesia tergolong liberal bila dibandingkan dengan Islam di Timur Tengah.⁵

Saat Presiden Megawati Soekarno Putri menyatakan simpati dan dukungannya terhadap AS pasca 9/11, Washington mengirimkan berbagai

⁴ Gabriel Chen, “A Glass Half Full: Indonesia-US Relations in The Age of Terror,” *The Duke Chronicle* 27 (2005): 11, diakses pada 14 April 2012, pukul 08:10, <http://www.duke.edu/~gwc/indonesia.htm>.

⁵ *Ibid.*

bantuan untuk Indonesia yang saat itu masih berusaha pulih dari krisis moneter 1997. Di antara bantuan itu adalah fasilitas dialog antar umat dan bantuan finansial sebesar US\$ 657 juta. Bantuan-bantuan tersebut dipandang dengan penuh kecurigaan oleh umat Muslim di Indonesia, terutama oleh kalangan Muslim radikal seperti Laskar Jihad.⁶

Yang terjadi kemudian adalah hubungan dagang yang disebut Chen hanya berbasis peristiwa penting (*solely event-driven relations*), seperti tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 yang dianggap Kongres sebagai kesempatan untuk merebut hati umat Muslim Indonesia. Namun rakyat Indonesia hanya melihat bantuan tersebut sebagai bantuan kemanusiaan, Demonstrasi-demonstrasi yang mendesak pemerintah untuk mengakhiri hubungan bilateral dengan AS dan serangan-serangan terorisme yang menyerang apapun yang dianggap simbol keberadaan AS di Indonesia, seperti Hotel JW Marriott, terus berlangsung.⁷

Serangan-serangan terorisme seperti yang tersebut di atas, desakan kaum Islam radikal agar pemerintah Megawati memutuskan hubungan dengan AS dan ancaman akan boikot terhadap produk-produk AS dianggap Washington menciptakan suasana tidak kondusif untuk investasi. Akibatnya berbagai investasi dibatalkan, dan hal ini berakibat kemiskinan, seperti yang terjadi pada beberapa daerah kilang minyak Pertamina yang sudah tua dan tidak terpakai karena tidak ada kucuran modal. Misalnya di Balongan, para pria di daerah kilang minyak Pertamina itu tetap mengandalkan mencari ikan yang tidak begitu menghasilkan, dan para wanitanya pergi ke Jakarta untuk menjadi pembantu rumah tangga atau bahkan pelacur. Selain penarikan investasi, AS juga memberlakukan sebuah kebijakan yang memperlihatkan generalisasi terhadap umat Islam dan tidak adanya keinginan serius untuk mengambil hati umat Muslim yang bukan berasal dari garis keras, yang sebetulnya merupakan mayoritas di Indonesia (media hanya mengedepankan pendapat pemimpin-pemimpin Islam garis keras karena dianggap lebih menjual).⁸ Proses pemberian visa kunjungan dan belajar untuk warga negara Indonesia dibuat begitu berbelit-belit hingga tidak jarang para pemohon visa

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

akhirnya ditolak sama sekali permohonan visanya. Orang-orang yang memiliki nama Islam bahkan hampir tidak memiliki harapan untuk mendapat visa. Meski hal ini tidak secara resmi dikategorikan sebagai sanksi, dampaknya sangat terasa merugikan bagi rakyat Indonesia.

Salah satu sanksi penting yang diberikan AS justru berada dalam konteks hubungan militer yakni embargo senjata yang diberlakukan Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Clinton, Madeleine Albright, terkait tertembaknya dua orang warga negara AS anggota misi perdamaian PBB di Papua pada 1999. Pelakunya diduga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Akhirnya sanksi tersebut dicabut dan kongres memutuskan untuk memberi bantuan militer tidak terbatas bagi Indonesia, salah satunya adalah diselenggarakannya *International Military and Education Training (IMET)* yang melatih para anggota TNI, karena AS percaya bantuan militer adalah cara terbaik untuk menjaga situasi Indonesia tetap aman.⁹

Seperti telah disebut sebelumnya, sejak awal nosi etnisitas atau rasisme sudah jelas terlihat sejak berdirinya Republik Indonesia dimana AS mendukung Belanda untuk menjajah kembali negara yang dahulu dikenal sebagai Hindia Belanda ini. Kemudian dalam krisis moneter, IMF memaksa pemerintahan Presiden Soeharto untuk membuat situasi ekonomi kondusif untuk IMF dan badan-badan keuangan barat lainnya, yang merugikan masyarakat Indonesia. Lalu ditariknya investasi dan proses visa yang dipersulit sebagai akibat dari demonstrasi-demonstrasi anti AS dan terorisme sebagai manifestasi ekstrim sikap politik rakyat Indonesia terhadap AS, yang juga merugikan penduduk Indonesia. Sebetulnya nosi tidak percaya rakyat Indonesia terhadap AS disebabkan oleh nosi etnisitas AS terhadap umat Muslim secara global setelah 9/11, jadi hal itu merupakan salah AS sendiri. Dalam konteks hubungan militer, Albright meminta anggota-anggota TNI yang bertanggung jawab dalam referendum Timor Timur dibawa ke Mahkamah Internasional.¹⁰ Sekali lagi ada nosi etnisitas dimana Israel atau Inggris yang bertanggung jawab atas serangan massal yang memakan banyak

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

korban non-kombatan tidak pernah diajukan ke Mahkamah Internasional, tapi jika kejahatan itu dilakukan negara berpenduduk non-Kaukasia, AS akan menjadi yang pertama menuntut “ditegakkannya keadilan.”

Dengan Inggris, AS juga menjalin kerjasama dagang yang kuat. Baru-baru ini, tepatnya pada 9 April 2012, Presiden Obama dan Perdana Menteri Inggris David Cameron mencabut tarif seluruhnya untuk dalam hubungan dagang kedua negara. Sebulan sebelumnya, AS dan Inggris bersama dengan negara-negara Uni Eropa lainnya dan Jepang melaporkan Cina ke *World Trade Organization* (WTO) karena seenaknya membatasi ekspor mineral bumi langka yang diproduksi di seluruh dunia. Itu hanyalah dua dari tanda kedekatan hubungan dagang AS dan Inggris. AS adalah investor terbesar di Inggris dan begitu pula sebaliknya. AS adalah tujuan ekspor terbesar untuk Inggris dan negara yang dipimpin Ratu Elizabeth II ini adalah partner dagang terbesar keenam di AS. Karena hubungan dagang yang kuat ini, AS dan Inggris menjadi negara-negara yang pertumbuhan ekonominya terbesar di G7, dua kali lebih besar daripada Jepang, Jerman dan Italia.¹¹

Hubungan dagang kedua negara tetap berjalan lancar meskipun sudah bukan rahasia bahwa AS menyokong serangan-serangan teroris IRA secara finansial, dimana banyak serangan tersebut dilakukan di beberapa kota besar di Inggris seperti London dan Manchester, dengan target biasanya symbol-simbol kekuasaan seperti kediaman Perdana Menteri Edward Heath pada 1974 atau fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan Harrods pada 1983. Sebuah bom IRA yang diledakkan di Irlandia pada 1979 bahkan menewaskan seorang tokoh penting, yakni sepupu Ratu Elizabeth II, Lord Mountbatten. Kemungkinan besar hal ini dikarenakan kesepakatan bahwa Inggris tidak akan menuntut AS karena membiayai serangan terorisme IRA, dan AS tidak akan mengajukan pengadilan internasional bagi Inggris karena menjadi penyebab konflik Irlandia Utara.¹² Sebagai sejarah singkat, konflik ini dimulai setelah *The Anglo-Irish Treaty*

¹¹“US-UK Relations,” *Embassy of The United States, London, UK*, diakses pada 14 April 2012, pukul 08: 30, <http://london.usembassy.gov/gb.html>

¹² Loretta Napoleoni, *Terror Incorporated: Tracing Dollars Behind Terrorist Networks*, (Toronto: Seven Stories Press, 2005), 168-169

ditandatangani pada 1921, yang berisi pengakuan Inggris atas kemerdekaan Republik Irlandia yang penduduknya sebagian besar Katolik, tapi menahan Irlandia Utara dimana penduduk mayoritas beragama Protestan. Warga Katolik di Irlandia Utara, yang sejak sebelum ditandatanganinya *The Anglo-Irish Treaty* mengalami berbagai diskriminasi, tentu saja menginginkan Irlandia Utara menjadi bagian dari Republik Irlandia. Hal ini tidak disukai penduduk Protestan karena jika Irlandia Utara bergabung dengan Republik Irlandia, mereka akan menjadi minoritas dan termarginalisasi. Maka terjadilah konflik antara warga Katolik dan Protestan, lalu London mengirim pasukan ke Irlandia Utara untuk mendamaikan suasana. Tentara Inggris memihak warga mayoritas, penduduk Protestan. Dari sinilah IRA, yang tadinya adalah tentara Irlandia dalam *The Irish Independence War*, mulai melakukan serangan-serangan teroris membela warga Katolik.¹³

Terorisme juga tidak mengganggu hubungan dagang kedua negara karena pengalaman Inggris yang sudah lebih terbiasa dengan terorisme. Terorisme tidak terlalu mengganggu kehidupan bisnis di Inggris, misalnya perusahaan pos negara *Royal Mail* yang kembali beroperasi sehari setelah bom 7 Juli 2007 (yang terkenal sebagai 7/7). Bom 7/7 yang terjadi di sebuah stasiun kereta api bawah tanah London bukan diotaki oleh IRA, melainkan oleh empat pengebom bunuh diri simpatisan Al-Qaeda, semuanya warga negara Inggris keturunan Pakistan dan Jamaika. Ketenangan Inggris menghadapi serangan teroris ini terkenal di dunia hingga jumlah turis ke negara ini tidak pernah turun secara drastis. Laporan *The London Chamber of Commerce and Industry* berjudul "*The Economic Effects on Terrorism on London: Experiences of Firms in London's Business Community*" pada Agustus 2005 menyebutkan, pasca 7/7 dari tiga objek wisata terkenal di London yaitu *Madame Tussaud's*, *Kew Gardens* dan *RAF Hendon*, hanya *Madame Tussaud's* yang mengalami penurunan kedatangan turis asing sebanyak 15%, sementara *Hudson Park* dan *RAF Hendon* justru mengalami kenaikan masing-masing sebanyak 10% dan 14%. Warga AS juga tidak takut untuk berkunjung, bahkan mahasiswa-mahasiswa AS masih datang untuk magang di perusahaan-perusahaan Inggris selepas 7/7. Perlu juga dicatat bahwa tidak hanya

¹³¹³ Ed Moloney, *The Secret History of The IRA*. (London: Penguin Books, 2003), 40-43

perusahaan besar, perusahaan-perusahaan kecil dan industri rumah tangga juga tidak merasakan dampak buruk ekonomi secara signifikan akibat terorisme.¹⁴

Kestabilan ekonomi dalam suasana terorisme yang dimiliki Inggris tentu berbanding terbalik dengan AS, seperti yang dipaparkan dalam laporan *The London Chamber of Commerce and Industry* tersebut. Laporan itu memaparkan keadaan ekonomi di New York setelah serangan 9/11. Disebutkan bahwa 14,500 perusahaan besar dan kecil di New York hancur atau mengalami penurunan transaksi yang drastis, dan angka itu termasuk bisnis teknologi dan keamanan. Selain itu, disebutkan pula bahwa pada November 2001, kerugian New York mencapai US\$83 miliar. Kerugian-kerugian tersebut, selain disebabkan oleh kebangkrutan atau turunnya transaksi seperti yang sebelumnya disebutkan, juga oleh pemindahan lokasi, hilangnya pendapatan pajak, turunnya harga properti, dan dampak turunnya jumlah wisatawan yang berimbas kerugian dalam sektor pariwisata, seperti perhotelan. Kerugian di sektor pariwisata New York tergolong besar, yakni US\$13 miliar sampai awal tahun 2003.¹⁵

Keadaan tersebut dibandingkan dengan keadaan London pasca serangan yang sama. *The London Chamber of Commerce and Industry* merasa perlu membandingkan keadaan London dan New York karena meskipun serangan ke menara kembar *World Trade Center* itu terjadi di New York, perubahan cukup signifikan terjadi pula pada kehidupan bisnis di ibukota Inggris tersebut, yang antara lain disebabkan penurunan jumlah turis karena takut serangan susulan akan terjadi di London. IMF meramalkan perekonomian Inggris akan turun sebanyak 0,6% pada tahun 2002 dari 1,8% hingga serangan 9/11. Namun ternyata sebuah data dari *The United Kingdom Office of National Statistics* (ONS) melaporkan perkembangan ekonomi sebesar 1,6% pada 2002. Meskipun angka itu merupakan angka pertumbuhan ekonomi terendah selama sepuluh tahun hingga 9/11, hal ini tetap merupakan kemajuan dibandingkan ekonomi AS yang menurun.¹⁶

¹⁴ Helen Hill. *The Economic Effects of Terrorism on London – Experiences of Firms in London's Business Community*. (London: London Chamber of Commerce and Industry Press & Public Affairs, 2005), 4-17

¹⁵ *Ibid.*, hal. 11-12

¹⁶ *Ibid.*, hal. 12-13

Salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi itu diantaranya taktik-taktik yang dijalankan berbagai perusahaan untuk menjaga agar biaya operasional tidak naik ditengah sepi transaksi. Misalnya perusahaan-perusahaan agen perjalanan membuat perjanjian bisnis dengan kantor pusat sebuah maskapai penerbangan melalui konferensi video, meninggalkan cara lama dengan mengirim delegasi. Yang lebih menarik, data ONS juga menunjukkan bahwa 8% dari total pemilik bisnis di London menyatakan 9/11 justru menaikkan keuntungan mereka. Persentase tersebut terdiri dari 53% sektor teknologi, 27% bisnis konsultasi keamanan dan 23% pabrik alat-alat keamanan.¹⁷

Meskipun 9/11 tidak memberikan dampak yang berarti bagi kehidupan perekonomian di London, hal yang sama tidak bisa dinikmati oleh kota-kota yang lebih kecil seperti Liverpool, Leeds dan Glasglow. Kota-kota tersebut dibebani “pajak terror” oleh AS, yang ditetapkan melalui perhitungan transportasi yang lebih lambat dan tidak seefisien biasanya, hambatan lain dalam distribusi logistik yang disebabkan proses *screening* yang berbelit-belit, ekstra peralatan keamanan yang dibutuhkan, premium asuransi yang lebih tinggi hingga keadaan emosional para karyawan yang mungkin memiliki keluarga atau kenalan yang menjadi korban 9/11. Kepanikan petugas imigrasi di berbagai perbatasan pun juga diperhitungkan.¹⁸

Dapat dilihat bagaimana terorisme memberikan dampak yang berbeda terhadap hubungan dagang AS dan Indonesia dengan hubungan AS dan Inggris. Di Indonesia, AS tetap berusaha mengambil hati publik mayoritas Muslim dengan cara tetap memberi bantuan keuangan dan militer. Hal tersebut dilakukan karena AS sadar Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara sangat berpengaruh di kawasan tersebut. Namun bukan berarti tidak ada hambatan yang diberikan AS kepada Indonesia, yang dibuktikan dengan sikap paranoid pihak Kedutaan Besar AS dalam memberikan visa kunjungan dan belajar, terutama untuk mereka yang memiliki nama berbau Islam, dan embargo senjata setelah kasus penembakan dua warga negara AS di Papua. Di Inggris, memang tidak terganggunya hubungan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hal 19-20

dagang antara AS dan Inggris disebabkan ketenangan Inggris menghadapi ancaman teroris, yang didapat dari sekitar delapan dekade menghadapi terorisme IRA. Ketenangan ini berbuah kestabilan ekonomi, hingga kerjasama bisnis antara kedua negara tetap berjalan bahkan saat teroris non-IRA (yakni simpatisan Al-Qaeda, “jenis” yang sama yang melakukan 9/11) memporakporandakan fasilitas umum dan memakan banyak korban. Dari situ, kesan yang didapat adalah terorisme Muslim di Inggris seperti tidak memproyeksikan masalah di mata AS, hingga mudah untuk menarik kesimpulan bahwa tenangnya hubungan AS dan Inggris semata-mata didasari kepentingan bisnis. Dari sana pula, timbul kemungkinan bahwa AS sengaja tidak mempermasalahkan terorisme IRA yang sedikit banyak disebabkan sikap politik London atas kasus Irlandia Utara agar hubungan perdagangan dua negara tetap stabil. Permasalahan sebenarnya tidak berhenti di situ. Sejak awal, nosi etnisitas terlihat pada perbandingan hubungan dagang antara AS dan Inggris dengan AS dan Indonesia. Di Inggris, terorisme apapun yang terjadi, baik oleh IRA maupun simpatisan Al-Qaeda, AS tetap dengan nyaman berhubungan dagang dengan Inggris. Hal ini terlihat dengan mahasiswa-mahasiswa AS yang tetap datang ke Inggris untuk magang setelah 7/7. Tapi bila terorisme, bahkan mungkin terorisme yang tidak ada hubungannya dengan Islam sekalipun, terjadi di Indonesia, Kedutaan Besar AS akan mempersulit masuknya warga negara Indonesia ke AS dan sebaliknya (misalnya memberikan *travel warning* kepada penduduk AS mengenai Indonesia).

3.3. TERORISME DAN INVESTASI AS DI IRLANDIA UTARA

Presiden Bill Clinton terkenal akan kebijakannya memasukkan Irlandia Utara sebagai agenda utama. Dia adalah presiden AS pertama yang melakukan demikian setelah para pendahulunya seolah menutup mata terhadap kekerasan selama lebih dari 30 tahun di Irlandia Utara, yang terkenal dengan nama “*The Troubles*”. Presiden-presiden pendahulu Clinton tidak mau ikut campur dalam mengusahakan perdamaian di Irlandia Utara, termasuk Kennedy yang adalah Presiden keturunan Irlandia beragama Katolik pertama dan Jimmy Carter yang terkenal dengan keberhasilannya mendamaikan Israel dan Mesir dalam Camp David 1978. Menurut Joseph E. Thomson dalam bukunya “*American Policy and*

Northern Ireland: A Saga of Peacebuilding” (2001), keengganan AS dalam melibatkan diri dalam konflik Irlandia Utara adalah karena AS tidak ingin keterlibatan itu mempengaruhi hubungan dengan Inggris, yang telah menjadi sekutu terkuat dalam perdagangan dan militer sejak 1941.¹⁹

Agenda tersebut dijalankan begitu Clinton mulai jangka pertama sebagai Presiden AS pada Januari 1993. Timothy J. Lynch dalam *“Turf War: The Clinton Administration and Northern Ireland”* (2004) menjelaskan bahwa cara Clinton menangani terorisme IRA dalam konflik Irlandia Utara berbeda dengan cara salah satu pendahulunya, Reagan, dalam menangani terorisme di Lebanon. Clinton memutuskan untuk melakukan pendekatan kekuatan lunak dalam menangani Irlandia Utara. Langkah awal yang dilakukan Clinton adalah pemberian visa kunjungan 48 jam pada Gerry Adams, pemimpin partai republik terbesar di Irlandia yang juga sayap politik IRA. Hal ini mengganggu hubungan sangat harmonis yang sudah berjalan selama lebih dari 60 tahun antara AS dan Inggris. Presiden-presiden AS terdahulu melarang Adams masuk ke AS untuk menyenangkan Inggris. Kemarahan Inggris terlihat dari pidato mantan Perdana Menteri Margaret Thatcher dalam sebuah kunjungan pada 1995 ke *Harding University, Arkansas*, *“You can imagine how we felt when President Clinton received Gerry Adams. You can imagine how he would have felt if we had accepted the Oklahoma City bomber.”*²⁰

Kekecewaan Inggris tidak menghentikan Clinton dalam mengupayakan perdamaian di Irlandia Utara. Dalam bukunya, Lynch mempertanyakan mengapa Clinton mengambil resiko mengecewakan Inggris dengan terlibat dalam proses perdamaian Irlandia Utara. Perlu diingat bahwa tidak seperti Bush Jr yang menjadikan GWOT agenda utama karena urgensi pasca 9/11, Clinton mengambil Irlandia Utara sebagai agenda utama karena pilihan pribadi, selain desakan masyarakat keturunan Irlandia agar pemerintah AS lebih memperhatikan Irlandia Utara. Pertanyaan di atas dijawab Lynch pada kesimpulan bab ketiga yaitu karena

¹⁹ Joseph E. Thomson, *American Policy and Northern Ireland: A Saga of Peacebuilding*. (Connecticut: Praeger Publishers, 2001), 19-20

²⁰ Timothy J. Lynch, *Turf War: The Clinton Administration and Northern Ireland*. (England: Ashgate Publishing Limited, 2004), 34-36

isu Irlandia Utara sebetulnya bukan resiko besar dalam konteks hubungan AS dan Inggris dibandingkan dengan kasus Kanal Suez pada 1956. Selain itu, isu ini juga tidak akan menghabiskan biaya banyak, bisa mendongkrak reputasi Clinton dan AS sebagai *peacemaker*, dan juga dapat menguntungkan kebijakan dalam negeri.

21

Di situlah letak sisi oportunist Clinton. Menurut Lynch, salah satu bentuk sisi oportunist itu adalah para anggota *Department of State* dan *National Security Council* (NSC) yang tidak terkoordinasi dengan baik, dan hal ini memungkinkan para anggota itu menggunakan agenda Irlandia Utara untuk kepentingan masing-masing. Selain itu, Clinton juga menanamkan modal di Irlandia Utara dalam bentuk badan-badan bantuan, seperti pusat pengaduan dengan nomor telepon bebas pulsa. Clinton mengundang para investor Eropa untuk menanam modal dalam badan-badan bantuan ini. Hal ini bisa dilihat sebagai salah satu cara Clinton untuk memajukan ekonomi dalam negeri. Clinton lalu memberlakukan *The MacBride Principles* yang dirumuskan *The Irish National Caucus*, yang dirumuskan Pendeta Sean McManus dari organisasi lobi masyarakat keturunan Irlandia *The Irish National Caucus*, yang intinya berisi perusahaan-perusahaan AS di Irlandia Utara tidak boleh mendiskriminasi antara pekerja Protestan dan pekerja Katolik. Pemberlakuan *The MacBride Principles* ini bisa dilihat selain sebagai penunjang terwujudnya proses perdamaian di Irlandia Utara, juga sebagai cara untuk membuat perusahaan-perusahaan AS di Irlandia Utara semakin menarik di mata investor karena menjunjung nilai kemanusiaan.²²

Pada tahun 1995, Clinton menunjuk seorang politikus dari Partai Demokrat bernama George Mitchell sebagai Duta Khusus (*Special Envoy*) untuk Irlandia Utara. Ini adalah pertama kalinya pemerintah AS menunjuk Duta Khusus untuk Irlandia Utara karena para presiden pendahulu Clinton menganggap Irlandia Utara adalah urusan dalam negeri Inggris yang tidak boleh dicampuri. Tugas utama Mitchell sebagai Duta Khusus adalah memfasilitasi perundingan-perundingan perdamaian, dan keberhasilan Mitchell terlihat dalam

²¹ *Ibid.*, hal. 47-48

²² *Ibid.*, hal. 50-51

ditandatangani *The Good Friday Agreement* (juga dikenal sebagai *The Belfast Agreement*) pada 1998 yang antara lain isinya IRA setuju menyerahkan persenjataan. Mitchell juga bertugas mengawasi kepentingan bisnis AS di Irlandia Utara.²³ Menurut Roger MacGinty dalam artikelnya “*American Influences in the Northern Ireland Peace Process*” (*Journal of Conflict Studies* (1997)), ide Clinton tentang peran Duta Khusus untuk Irlandia Utara tidak hanya sebagai penjaga gawang proses perdamaian tapi juga pengawas kepentingan bisnis AS sesungguhnya bukan wacana baru. Pada tahun 1977, Presiden Carter justru pernah berencana berinvestasi di Irlandia Utara tanpa terlibat banyak dalam proses perdamaian. Kepentingan bisnis AS pra-Clinton juga terlihat pada 1985, saat Presiden Reagan mengadakan program pemberian visa bekerja (*green card*) kepada warga negara Republik Irlandia dengan restu PM Thatcher. Memang ini adalah salah satu langkah awal melobi pemerintah Inggris agar membiarkan AS sedikit demi sedikit terlibat dalam kasus Irlandia Utara, namun dalam sudut pandang ekonomi pemberian *green card* pada warga Republik Irlandia bisa jadi merupakan cara untuk menambah tenaga kerja terdidik (*skilled immigrants*) bagi AS.²⁴

MacGinty juga memaparkan adanya motif ekonomi dalam *Totally Unarmed Strategy* (TUAS) yang dirumuskan pada 1994, setahun sebelum penunjukkan Mitchell. TUAS didukung oleh para pengusaha AS yang menjadi penyokong dana kampanye Clinton pada 1992. Sebelum TUAS diresmikan, pada September 1993 para pengusaha AS menggunakan tujuh hari tenang tanpa gencatan senjata (yang juga merupakan hasil lobi AS) untuk meninjau keadaan di Irlandia Utara karena mereka berencana menanamkan modal di situ. Kemudian pada Desember 1994, Ron Brown selaku Menteri Perdagangan memimpin sebuah delegasi yang terdiri dari para pengusaha AS ke *Northern Ireland Investment Conference* di Belfast, Irlandia Utara. Gedung Putih kemudian menindaklanjuti

²³ *Ibid.*, hal. 53-55

²⁴ Roger MacGinty, “American Influences on The Northern Ireland Peace Process,” *The Journal of Conflict Studies* 27 (1997): 3, diakses pada 16 April 2012, pukul 15:00
<http://journals.hil.unb.ca/index.php/jcs/article/view/11750/12521>

konferensi tersebut dengan mengadakan konferensi sejenis di Washington pada Mei 1995 dan di Pittsburgh, New Jersey, pada Oktober 1996.²⁵

Selama kepresiden Clinton itu Sinn Fein menjadi partai terkaya tidak hanya di Irlandia Utara tapi juga di Republik Irlandia. Hal itu disebabkan Sinn Fein dibebaskan mencari dana di AS melalui kantor perwakilan Sinn Fein di Washington dan *International Fund for Ireland* (pemerintah Clinton pernah menyumbang US\$30 juta pada organisasi ini). Dari sudut pandang ekonomi liberal, bukan tidak mungkin Sinn Fein sengaja dimakmurkan karena ketika seseorang atau suatu organisasi sudah mapan, otomatis dia akan berhenti mengganggu apapun yang dianggap sebagai penyebab kemiskinan. Makmurnya Sinn Fein akan membuat Gerry Adams menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan sepenuhnya gencatan senjata IRA sehingga Irlandia Utara menjadi aman. Keadaan aman di Irlandia Utara ini tentu akan kondusif bagi kepentingan ekonomi pemerintahan Clinton.²⁶

Begitu jelasnya kepentingan ekonomi dalam campur tangan AS mengenai proses perdamaian di Irlandia Utara, sehingga segala urusan investasi AS di Irlandia Utara sebetulnya tidak berdampak banyak pada perdamaian. Setiap kali IRA hendak melanjutkan gencatan senjata, hubungan diplomatik AS dan Irlandia Utara secara strategis mengadakan acara kenegaraan, seperti pertemuan antara kaum unionist (pro Inggris) dan nasionalis. Pertemuan-pertemuan semacam itu akan menunda gencatan senjata lagi, sehingga kegiatan bisnis AS di Irlandia Utara dapat berjalan lancar. Namun ada kalanya IRA nekat melakukan serangan ditengah pertemuan kenegaraan, seperti yang terjadi pada 9 Februari 1996. IRA meledakkan bom di *Canary Wharf*, London, pada hari yang sama Gedung Putih menerima sebuah delegasi dari Irlandia Utara dan tidak lama setelah kunjungan Perdana Menteri Finlandia Harri Holkeri dan Kepala Kementrian Pertahanan Kanada John de Chastelein ke Irlandia Utara. Atas serangan tersebut, Gedung Putih menyalahkan Perdana Menteri Inggris ketika itu, John Major, karena tidak mau ambil bagian dalam proses perdamaian. Tindakan AS mengkambinghitamkan

²⁵ *Ibid.*, hal. 4-5

²⁶ *Ibid.*, hal. 6

PM Major dapat pula dilihat sebagai tindakan diplomatis strategis bermotif ekonomi, yakni jika Sinn Fein atau pihak lainnya dari Irlandia Utara disalahkan, otomatis itu akan memperkeruh hubungan Irlandia Utara dan AS yang kemudian akan berdampak buruk pada kepentingan ekonomi AS di kawasan yang memproduksi kapal Titanic ini.²⁷

Sementara itu, beberapa anggota Kongres sudah mulai kehilangan kesabaran terhadap Gerry Adams. MacGinty mengutip isi wawancara seorang anggota Kongres dengan majalah *Newsweek* edisi Juni 1996, dimana dia mengatakan “*If Gerry Adams cannot deliver the IRA, he’s of little use to anyone.*” Hal ini menimbulkan desas-desus bahwa Irlandia Utara akan tidak akan menempati agenda utama pada jangka kedua kepresidenan Clinton. Memang pada saat itu Clinton sedang menyiapkan pencalonan untuk jangka kedua. Clinton memastikan bahwa Irlandia Utara tetap berada pada agenda utama, dan hal itu terbukti setelah dia terpilih lagi pada 1997. Dalam pandangan AS yang menempatkan diri sebagai pemimpin Eropa, Perdana Menteri Tony Blair yang juga terpilih pada 1997 dinilai lebih kooperatif.²⁸

Masih menurut MacGinty, kebijakan luar negeri AS yang berinvestasi begitu banyak di Irlandia Utara bertujuan menjadikan Irlandia Utara dan Republik Irlandia sebagai pusat dominasi ekonomi AS di Uni Eropa. Pasar Irlandia (Republik dan Utara) muda, terdidik, berbahasa Inggris dan mayoritas pro-AS. Pemerintahan Clinton yang kedua menetapkan pajak ekspor impor dengan kedua Irlandia sebanyak 10% yang berlaku hingga 2010. Hingga 1997, sebanyak 430 perusahaan AS beroperasi di Republik Irlandia mengkaryakan 60.000 orang dan sejak 1980 AS telah menanamkan saham sebesar 40% pada perusahaan-perusahaan elektronik Eropa yang berbasis di Republik Irlandia. Di Irlandia Utara, juga menurut sebuah data tahun 1997, ada 51 perusahaan AS di sektor teknologi yang beroperasi di sana, mempekerjakan 14.000 orang. Tentu saja pengaruh ekonomi AS yang kuat di Irlandia Utara dan Republik Irlandia membawa dampak bagus pada pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Inilah yang dimaksud Lynch

²⁷ *Ibid.*, hal. 7

²⁸ *Ibid.*, hal. 8-10

kebijakan luar negeri menguntungkan kebijakan dalam negeri. Kebijakan luar negeri Clinton ini dikategorikan MacGinty dalam neo merkantilisme.²⁹

Meski kepresidenan jangka kedua Clinton berakhir pada 2001, itu tidak berarti pengaruhnya di Irlandia Utara yang hingga kini masih belum sembuh total dari konflik, berakhir. Sejak tidak lagi menjabat presiden, Clinton seperti duta khusus tidak resmi di Irlandia Utara, dengan bantuan istrinya yang kini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di pemerintahan Presiden Obama, Hillary. Clinton hingga kini masih kerap berkunjung ke Irlandia Utara, memastikan keadaan tetap damai hingga kondusif bagi keberlangsungan kepentingan ekonomi AS di sana. Pada 29 September 2010 misalnya, dalam sebuah lawatan ke Londonderry, Irlandia Utara, Clinton berjanji akan tetap membantu perekonomian Irlandia Utara. Kunjungan tersebut, kali keenam untuk Clinton semenjak tidak lagi menjadi presiden, seperti merupakan “pengantar” bagi konferensi ekonomi AS-Irlandia Utara di Washington pada Oktober 2010. Konferensi itu diikuti 24 perusahaan besar AS yang hendak menanam modal di Irlandia Utara.³⁰

Hillary Clinton tidak hanya meneruskan langkah suaminya. Masih karena dampak 9/11, Hillary sibuk menjaga citra AS dengan menyangkal IRA mendapat bantuan dari AS dan mengutuk salah satu organisasi teroris paling berbahaya di dunia itu. Dia juga menyangkal bahwa IRA terus melakukan serangan karena tidak puas dengan keadaan Sinn Fein sekarang yang tidak semakmur saat Bill Clinton memerintah. Hillary mengatakan IRA mendapatkan dana serangan mereka dari tindakan-tindakan kriminal seperti merampok bank.

Selain terus menjaga hasil kerja keras suaminya (yang juga kepentingan pemerintahan Obama) dan citra AS yang ternodai oleh terorisme, Hillary tampaknya lebih memiliki campur tangan dalam urusan politik dalam negeri Irlandia Utara daripada sang suami yang lebih banyak bermain di sektor perekonomian. Misalnya, pada pidatonya di gedung parlemen Stormont di Belfast

²⁹ *Ibid.*, hal. 12

³⁰ “Bill Clinton Visits Northern Ireland with Plan for Economic Recovery,” The Belfast Telegraph, diakses pada 17 April 2012, pukul 09:05, <http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/northern-ireland/bill-clinton-visits-northern-ireland-with-plan-for-economic-recovery-14962411.html>.

di bulan Oktober 2009, Hillary mendesak Sinn Fein dan *Unionist Democratic Party* selaku dua partai besar Irlandia Utara agar membentuk Kementerian Kehakiman.³¹

Dari perspektif manapun peran Bill dan Hillary Clinton dalam Irlandia Utara dilihat, yang tidak dapat dipungkiri adalah “pilih kasih” mereka terhadap terorisme kulit putih. Memang alasan bahwa Bill Clinton memilih Irlandia Utara sebagai agenda utama untuk menghemat ongkos politik masuk akal, tapi terbersit pertanyaan: jika salah satu pertimbangan memilih Irlandia Utara selain karena hemat ongkos juga untuk menciptakan citra AS sebagai pencipta perdamaian, apakah merupakan ide yang lebih baik jika Presiden Clinton juga memperhatikan keadaan kisruh negara-negara non-Kaukasia seperti Rwanda dan Haiti yang sebetulnya termasuk “pekerjaan rumah” kabinetnya? Lagipula bukankah dampaknya akan lebih baik dalam jangka panjang apabila Bill Clinton lebih memperhatikan Rwanda misalnya, atau setidaknya membagi perhatian antara Rwanda dan Irlandia Utara, karena citra AS sebagai negara rasis akan hilang (atau paling tidak berkurang)? Bagian di bawah ini akan membandingkan perlakuan Clinton terhadap Irlandia Utara dengan Rwanda selama dua jangka kepresidenan, dalam konteks genosida dan kepentingan ekonomi.

3.4. GENOSIDA DAN KEPENTINGAN NASIONAL DI RWANDA

Rwanda adalah sebuah negara di Afrika Tengah yang telah dilanda konflik etnis selama berabad-abad, bahkan sebelum kedatangan Jerman pada akhir abad ke-19 untuk menjajah. Suku Tutsi dan Hutu terus bertikai. Setelah kekalahan Jerman pada Perang Dunia I dan Rwanda diambil alih oleh Belgia, ilmuwan-ilmuwan Eropa dikirim ke Rwanda untuk meneliti hubungan ras di sana. Hasil riset penunjukkan suku Tutsi lebih dekat dengan ras Kaukasia yang dibuktikan dengan kulit yang lebih terang dan fisik yang lebih ramping daripada Hutu. Hal ini mengakibatkan keberpihakan penguasa kulit putih pada suku Tutsi, meskipun

³¹ Rosa Prince, “Hillary Clinton: Northern Ireland Politicians Must Sign Up to Peace,” *The Telegraph* (2010), diakses pada 17 April 2012, pukul 09:15, <http://www.telegraph.co.uk/news/politics/6299454/Hillary-Clinton-Northern-Ireland-politicians-must-sign-up-to-peace.html>.

banyak dari suku Hutu yang masuk agama Katolik yang dibawa Jerman, dan para pemeluk Katolik baru ini dihadiahi tanah dan hewan ternak.³²

AS mulai memainkan peran penting di Rwanda pada 1993, yakni bersama Prancis dan *The Organization of African Unity* mengkoordinasi penandatanganan *Arusha Accords* di Arusha, Tanzania. *Arusha Accords* mengakhiri perang saudara antara pemerintah Rwanda yang didominasi suku Hutu dan *The Rwandan Patriotic Front* (RPF) yang mayoritas anggotanya suku Tutsi. Memang sejak pemberontakan suku Hutu pada 1957 yang terkenal sebagai Manifesto Hutu, suku inilah yang mendominasi pemerintahan dan posisi penting lainnya dalam masyarakat. AS dan Prancis tidak memiliki banyak pengetahuan tentang Rwanda, dan itu adalah salah satu kunci kegagalan *Arusha Accords*. Pada April 1994, sebuah pesawat yang membawa Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana (seorang Hutu) dan Presiden Burundi Cyprien Ntaryamira ditembak dan kedua presiden tewas. Tadinya suku Tutsi yang dituduh melakukan penembakan, namun belakangan diketahui bahwa suku Hutu yang merencanakan serangan teroris itu, dengan harapan suku Tutsi yang akan disalahkan dan Hutu akan terprovokasi untuk menyerang Tutsi. Suku Hutu memang memiliki agenda pembersihan etnis Tutsi.³³

Pada tahun 1993 pula Rwanda dilanda krisis ekonomi yang parah, yang sebelumnya menjangkiti Haiti dan Somalia. Seperti Rwanda, kedua negeri tersebut juga mengalami konflik yang diwarnai kudeta, yang tentu saja berkontribusi pada krisis ekonomi. Dick Holbrooke, Duta Besar AS untuk Rwanda, menyampaikan pada Presiden Clinton melalui NSC bahwa kas negara akan habis jika digunakan untuk membantu Rwanda. Presiden Clinton sendiri juga memutuskan untuk sementara waktu mempertahankan salah satu kebijakan luar negeri Presiden George Herbert Walker Bush (dalam thesis ini akan ditulis sebagai Bush Sr.), yakni menolak imigran-imigran Haiti yang mencari suaka dari

³² Lauren Young, "The Design of Absent Crisis: The Clinton Administration on 1994 Rwandan Genocide," *Student Pulse* 2 (2010): 1, diakses pada 18 April 2012, pukul 07:35, <http://www.studentpulse.com/articles/233/2/the-design-of-absent-crisis-the-clinton-administration-on-the-1994-rwandan-genocide>.

³³ *Ibid.*, hal. 2

konflik kekerasan di negerinya.³⁴ Dari sini kita sudah bisa mencium gelagat setengah hati pemerintahan Clinton dalam membantu konflik di Afrika dan Amerika Tengah.

Gelagat setengah hati Clinton ini ternyata didukung oleh publik AS, meskipun begitu Clinton berkeras membantu mengatasi konflik. Bantuan dimulai dari Somalia dimana Clinton mengirim pasukan khusus untuk menangkap Mahmoud Farrah Aidid, pemimpin junta Somalia yang terkenal brutal. Pasukan Aidid melawan, dan pertempuran antara pasukan Aidid dan pasukan khusus AS yang dikenal sebagai *Gothic Serpent Operation* itu berlangsung di Mogadishu pada Oktober 1993. Pasukan AS kalah telak, dan tayangan yang menggambarkan mayat-mayat pasukan AS yang diseret di berbagai jalan di Mogadishu disiarkan secara luas di AS. Publik AS pun muak dan meminta Clinton tidak ikut campur dalam konflik. Kongres lalu memutuskan untuk tidak lagi mengirimkan pasukan, makanan atau bantuan apapun.³⁵

Menurut Lauren Young dalam artikelnya "*The Design of Absent Crisis: The Clinton Administration on The 1994 Rwandan Genocide*" (2010), Clinton tidak punya ketertarikan sama sekali dalam urusan Haiti dan Afrika. Satu-satunya motivasi Clinton dalam membantu adalah keinginan untuk mempertahankan reputasi sebagai polisi dunia dan tanggung jawab moral sebagai kekuatan militer dan ekonomi terbesar. Ketika krisis ekonomi dan konflik kekerasan menyebar dari Somalia ke Rwanda, Clinton tidak sempat lagi memikirkan mencoba upaya perdamaian. Dia hanya memikirkan keselamatan warga negara AS di Rwanda. Dalam evakuasi ini, dia juga menurunkan pasukan khusus.³⁶

Juga menurut Young, kebijakan luar negeri yang diterapkan Clinton di Rwanda adalah kelanjutan dari model lama yang egois. Menjelang pemilihan anggota Kongres 1994, Clinton mengancam pasukan penjaga perdamaian PBB agar memaksa penerapan *Arusha Accords*. Dan setelah *Arusha Accords* gagal diterapkan, Clinton langsung saja memerintahkan evakuasi warga negara AS di

³⁴ *Ibid.*, hal. 2-3

³⁵ *Ibid.*, hal. 3

³⁶ *Ibid.*

Rwanda karena tidak mau disalahkan lagi atas jatuhnya korban jiwa. Hal ini dilakukan Clinton karena dia betul-betul perlu mempertahankan citra partai asalnya, Partai Demokrat, agar memenangkan kursi di Kongres. Clinton sepertinya lupa bahwa pasukan khusus PBB yang diturunkannya dalam evakuasi warga negara AS di Rwanda, *The United Nations Assistance Mission to Rwanda* (UNAMIR) atau Misi Bantuan PBB Untuk Rwanda, perlu pula diperhatikan keselamatannya. Yang terjadi adalah Clinton menolak memberikan tambahan biaya untuk *The Department of Peacekeeping*, sebuah bagian PBB yang mengirim *The United Nations Assistance Mission to Rwanda* (UNAMIR). Akibatnya sekitar 2.600 orang tentara UNAMIR di bawah pimpinan Romeo Dellelaire terkatung-katung di Rwanda. Young berargumen bahwa penolakan Clinton untuk mengucurkan tambahan dana pada *The Department of Peacekeeping* dikarenakan Clinton sibuk memperbaiki keadaan ekonomi di dalam negeri. Pada saat kampanye, janji utama Clinton adalah membuat ekonomi AS kuat lagi.³⁷

Jika diperhatikan secara mendalam, ada nosi etnisitas dalam keengganan Clinton mendanai *The Department of Peacekeeping* dengan alasan fokus pada ekonomi dalam negeri. Seperti telah dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya, salah satu upaya Clinton dalam memajukan perekonomian AS adalah dengan mengundang perusahaan-perusahaan besar di AS dan Eropa untuk berinvestasi di Irlandia Utara. Sebelum investasi dilakukan, Clinton terlebih dulu mengupayakan perdamaian di bagian Irlandia yang hingga kini masih menjadi bagian dari Inggris itu, diantaranya dengan mengundang ketua partai sayap politik IRA ke Gedung Putih. Dalam setahun pertama kepresidenannya, Clinton tidak melakukan usaha apapun untuk menciptakan perdamaian di Rwanda kecuali *Arusha Accords*. Dalam konteks ini, Young mengutip Samantha Power yang dalam artikelnya "*Bystanders to Genocide*" (2001) mengatakan Clinton terjangkit "*blindness manifested by familiarity*".³⁸ Clinton jauh lebih banyak memperhatikan Irlandia Utara yang konfliknya tidak separah Rwanda karena selain orang-orang Irlandia Utara berkulit putih dan berbahasa Inggris, budaya Irlandia Utara tidak jauh berbeda dengan budaya AS.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hal. 3-4

Dan Rwanda sebetulnya memang tidak ada dalam agenda Clinton. Young mengutip pernyataan James Wood, *Deputy Secretary for African Affairs* di *Department of Defence* dalam sebuah wawancara, dimana Wood mengatakan, “*Look, if something happens in Rwanda,..we don’t care...US national interest is not involved and we can’t put these silly humanitarian issues on lists. Just make it go away.*” Media ramai memberitakan keadaan di Rwanda, yang diambil dari kawat yang dikirimkan Delleire ke markas besar PBB di New York. Media melaporkan keadaan genting di sana, dimana mayat bergelimpangan dimana-mana atau ditumpuk setinggi enam kaki, dan suku Tutsi atau orang-orang Hutu yang moderat ditembak ditempat. Media ribut menyebutkan apa yang terjadi adalah genosida, sementara pihak pemerintah membantah itu adalah genosida sebagai pembenaran untuk menunda penanganan masalah Rwanda.³⁹

Menarik untuk dicermati mengapa pemerintah AS tidak mengakui pembantaian etnis Tutsi oleh etnis Hutu secara besar-besaran tersebut sebagai genosida. Pada April dan Mei 1994, kata “genosida” (*“The G Word”*) dilarang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam urusan kenegaraan. Pemerintah memberikan keterangan bahwa apa yang terjadi di Rwanda bukan konflik sama sekali, dan mayat-mayat bergelimpangan yang disiarkan televisi adalah “anggota kelompok etnis atau suku bangsa tertentu” yang dibunuh dengan “tujuan untuk menghancurkan kelompok etnis atau suku bangsa tertentu tersebut baik secara sebagian maupun keseluruhan.” Itu memang adalah definisi resmi genosida menurut PBB, tapi pemerintah AS menyebut kengerian yang terjadi di Rwanda bukanlah konflik untuk menghindari tanggung jawab yang dirumuskan dalam *The Genocide Convention 1948*.⁴⁰ Jika AS tidak bertanggung jawab sesuai dengan konvensi tersebut, negara adikuasa ini tidak perlu mengirim tentara penjaga perdamaian lagi, yang tentu saja akan mengeluarkan banyak biaya. Inilah motif ekonomi terselubung dalam sikap AS yang membiarkan begitu banyak rakyat Rwanda mati sia-sia.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

Lebih jauh, Young mengungkapkan bahwa yang membuat Clinton enggan menangani Rwanda adalah karena negara itu sudah sejak dulu miskin. Membangun negara miskin tentu jauh lebih mahal daripada membantu negara konflik yang tidak terlalu terpuruk ekonominya. Baru setelah didesak oleh Boutros Boutros-Ghali, Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Clinton mau memikirkan strategi untuk meredam genosida di Rwanda. Clinton menawarkan solusi membuat zona aman di perbatasan antara Uganda dan Rwanda. Solusi itu ditolak karena masyarakat enggan meninggalkan rumah atau tempat persembunyian. Keadaan sedemikian berbahaya, mereka sangat mungkin terbunuh sebelum sampai ke perbatasan.⁴¹

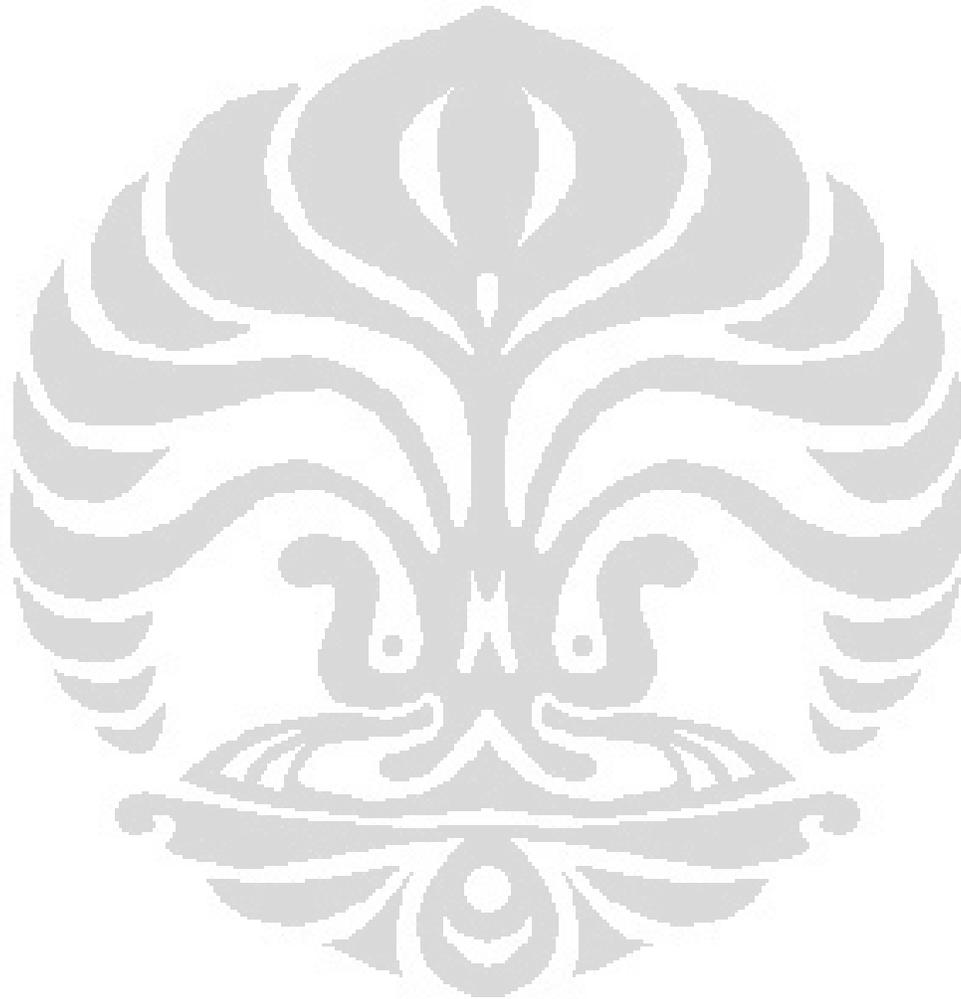
Tony Marley, *United States Military Liaison*, mencoba memberikan tiga solusi. Solusi pertama adalah menghancurkan antenna pemancar siaran radio dimana-mana. Para pemberontak Hutu dapat dengan mudah mendapat informasi tentang keberadaan target dari *Radio des Mille Colines* (RTL). Solusi kedua adalah menyiarkan pesan agar Hutu jangan menyerang Tutsi, dan yang ketiga adalah memblokir siaran RTL lewat *US Air Commando Solo*. Pemerintah AS langsung saja menolak usulan ini, menganggapnya mahal dan tidak akan efektif. Argumen pemerintah AS lainnya adalah bahwa mereka tidak seharusnya mencampuri urusan internal Rwanda.⁴²

Di sini terlihat kembali adanya nosi etnisitas, terutama pada alasan pemerintah AS di bawah Bill Clinton menolak usulan Marley karena tidak mau mencampuri masalah dalam negeri Rwanda. Apa yang dilakukan AS terhadap Irlandia Utara juga bisa dipandang sebagai intervensi dalam masalah internal, terlepas dari persoalan biaya operasional. Yang juga harus diperhatikan adalah besarnya keinginan AS untuk berinvestasi di Irlandia Utara tidak hanya demi memajukan ekonomi AS sendiri, tapi juga untuk perdamaian di sana meskipun tidak terlalu efektif. Sedangkan di Rwanda, jangankan berinvestasi berkedok menciptakan perdamaian dan lapangan pekerjaan demi memajukan ekonomi dalam negeri, melakukan hal-hal kecil untuk meredam konflik di sana saja AS

⁴¹ *Ibid.*, hal. 4

⁴² *Ibid.*

begitu enggan. Apa yang mendasari AS untuk melakukan kedua hal yang begitu berbeda dalam dua negara yang dilanda konflik, Irlandia Utara dan Rwanda, adalah *blindness manifested by familiarity*, dimana salah satu faktornya adalah nosi etnisitas atau rasisme.



BAB IV PENGARUH LOBI ETNIS DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI

Pengaruh pihak-pihak di luar sistem pemerintahan, opini publik dan NGO, sangat tidak bisa dipungkiri dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Memang pemerintah perlu memperhatikan pihak-pihak luar tersebut dalam perumusan kebijakan apapun, tidak hanya kebijakan luar negeri, karena suara para pihak luar ini sangat menentukan keberlangsungan pemerintahan.

Hal ini sudah berlangsung sudah lama, dan lobi pihak-pihak luar ini tidak selalu berhasil. Sebut saja apa yang terjadi sekitar masa Perang Dunia II, dimana para pengungsi Yahudi dari Jerman ditolak permohonan visanya oleh konsuler AS di sana. *Hebrew Union College* (HUC), seminari Yahudi tertua di AS berbasis di Cincinnati, turun tangan. Mereka mempunyai program bernama *Refugee Scholars Project* yang antara tahun 1935 sampai 1942 berhasil mengungsikan sebelas akademisi Yahudi ke AS. Mereka mengambil celah dari kebijakan pemerintah tahun 1924 yang membebaskan imigran akademisi dari ras, agama dan negara apapun dari kuota. Salah satu kisah kegagalan HUC adalah ketika gagal mengungsikan dua imigran Yahudi Jerman, Arthur Spanier dan Albert Lewkowitz. Spanier adalah pustakawan di *Prussian State Library* dan guru di *Hochschule fur die Wissenschaft du Judentums*, sedangkan Lewkowitz adalah dosen filsafat di *Breslau Jewish Theological Seminary*. Keduanya ditolak visanya oleh konsuler AS di Jerman, dan ketua HUC harus pergi ke Washington untuk turun tangan, namun hal ini tidak terlalu membuahkan hasil. HUC hanya berhasil mengeluarkan dua akademisi ini dari Jerman ke Belanda, dimana Lewkowitz dan Spanier tewas dalam sebuah serangan bom.¹

¹. John Snetsinger, "Race and Ethnicity" in *Encyclopedia of American Foreign Policy*. ed. Louise B. Ketz (New York: Charles Scribner's Sons, 2002), 212

4.1. PERAN ETNIS YAHUDI AS DALAM HUBUNGAN AS DAN ISRAEL

Bab ini tentu saja tidak akan lebih dalam membahas kisah kegagalan pihak-pihak luar dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri. Kebanyakan lobi pihak luar ini bertujuan agar pemerintah AS membantu tanah leluhur mereka dalam suatu konflik. Salah satu kisah sukses lobi komunitas etnis dalam mempengaruhi pemerintah yang tersohor adalah upaya kaum Yahudi di AS dalam mengusahakan pembentukan negara Israel dan hubungan kerjasama kedua negara yang hingga kini berlangsung erat. Seperti diungkapkan John Snetsinger dalam “*Encyclopedia of American Foreign Policy Volume 3*” bagian “*Race and Ethnicity*” (2002), komunitas Yahudi di AS sebetulnya tidak besar, hanya sekitar tiga persen dari populasi AS pada 1948, tahun terbentuknya Israel pada 14 Mei. Ini berarti besar kecilnya populasi suatu etnis tidak berpengaruh dalam kesuksesan lobi. Meskipun kecil, sebagian besar dari tiga persen ini berasal dari kelas ekonomi menengah ke atas dan menduduki posisi penting di pemerintahan, yang menjadikan mereka cukup berpengaruh, seperti etnis keturunan Cina di Indonesia. Presiden Truman tentu tidak mau kehilangan dukungan kelompok ini dalam pemerintahannya, maka setelah berbagai lobi Truman mengakui Israel sebelas menit setelah negara ini dideklarasikan. Tidak berhenti di situ, *American Israel Action Committee* (AIAC), organisasi lobi Yahudi AS terbesar yang berdiri pada 1963, berhasil membuat pemerintah membantu Israel secara finansial dan militer dalam perang Arab-Israel pada 1967 sehingga Israel menang dengan gemilang. Pelajaran yang bisa dipetik dari sini adalah tidak mengapa sebuah komunitas etnis merupakan minoritas, asalkan mereka kuat secara ekonomi sehingga pemerintah mau tidak mau menurut lobi agar bantuan keuangan dari kelompok etnis ini tetap berjalan.²

Kemenangan Israel atas bantuan AS ini menyebabkan protes keras, terutama karena tentara Israel yang dikirim Perdana Menteri Menachem Begin ini menewaskan banyak korban rakyat sipil di Lebanon, dimana markas besar *Palestine Liberation Organization* (PLO) berada. Kaum muda keturunan Yahudi di AS juga akhirnya menarik dukungan mereka setelah Jonathan Jay Pollard, yang

² *Ibid.*, hal. 293-295

juga seorang Amerika keturunan Yahudi, tertangkap sebagai mata-mata AS untuk Israel pada 1986. Mereka tidak mengerti mengapa Israel perlu mengintai kegiatan sekutunya yang terkuat, yang hampir selalu sepenuhnya mendukung mereka.³

Tetapi kaum muda Yahudi AS itu hanya sebagian kecil yang tidak menyetujui kedekatan AS dengan Israel yang boleh dikatakan lebih erat daripada hubungan AS dengan negara manapun. Mayoritas warga Yahudi di AS menginginkan AS tetap membantu Israel, yang dibuktikan oleh sebuah survey Gallup pada 1989. Dan tidak hanya orang-orang Yahudi di AS saja yang mendukung. Sebuah survey yang juga dilakukan oleh Gallup pada 1999 dan 2001 membuktikan hubungan kedua negara ini direstui masyarakat Yahudi di Kanada, Australia dan Inggris.⁴ Kebijakan luar negeri suatu negara mengenai negara tertentu menjadi tak tergoyahkan apabila didukung oleh sebuah kelompok etnis, tidak hanya di negara yang mengeluarkan kebijakan luar negeri tapi juga mereka yang berdiam di luar negeri.

Sebuah survey Gallup pada Februari 2001 memperlihatkan pandangan negatif masyarakat kulit putih AS terhadap kaum Arab atau keturunan Timur Tengah. Di antara pandangan negatif adalah bahwa orang-orang keturunan Arab dianggap tidak peduli dengan situasi politik dan keamanan di AS. Ini jelas adalah nosi etnisitas, karena pertama keturunan Arab juga merupakan minoritas (hanya berjumlah satu juta orang di seluruh AS menurut sebuah survey tahun 1990), dan sebagian besar dari mereka terkonsentrasi di Dearborn, Detroit, sebuah kota kecil yang tidak terlalu penting dibandingkan New York, dimana mayoritas Yahudi berada. Kedua, arus imigran Timur Tengah baru ramai pada 1970-an, dan sampai sekitar 20 tahun ke depan mereka masih menjadi minoritas. Baru pada sensus nasional tahun 2000 diperkirakan jumlah warga keturunan Arab mencapai 3,5% dari populasi AS.⁵ Dengan jumlah yang sangat kecil dan domisili di sebuah kota kecil di negara bagian yang tidak sebesar California, jelas warga Arab seolah tidak terlihat. “Tidak terlihatnya” warga Arab diperjelas di sebuah dokumentasi Discovery berjudul “*Muslims in America*” (2002), dimana sebagian besar

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hal. 295-296

narasumber mengaku mereka harus menyembunyikan identitas mereka sebagai Arab dan Muslim (antara lain dengan mengganti nama mereka dengan nama Barat dan bahkan berpartisipasi dalam kegiatan gereja) pada masa kecil dan remaja agar dapat diterima.⁶ Orang-orang Arab baru mulai “dianggap” setelah 9/11, pertama secara negatif karena mayoritas kulit putih di AS menganggap Islam agama teroris, kemudian secara perlahan Bush Jr. merasa perlu memulai hubungan baik dengan orang-orang keturunan Timur Tengah karena takut negara-negara Islam (atau mayoritas Muslim) akan menyerang.

4.2. LOBI KETURUNAN IRLANDIA DALAM MASALAH IRLANDIA UTARA

Jika warga Yahudi yang merupakan minoritas sukses besar dalam memperjuangkan Israel, tentunya sangat mudah untuk warga keturunan Irlandia yang sudah merupakan mayoritas sejak 1851 dalam melobi pemerintah AS untuk membantu perjuangan warga Katolik di Irlandia Utara. Asumsi itu tidak sepenuhnya benar karena beberapa faktor yang sudah sebelumnya disebutkan, diantaranya warga keturunan Irlandia beragama Katolik mengalami diskriminasi hingga 1960 saat Kennedy menjadi presiden, juga karena pemerintah AS segan terhadap Inggris yang merupakan salah satu sekutu terkuat.

Menurut Joseph E. Thomson dalam bukunya “*American Foreign Policy and Northern Ireland: A Saga of Peace Building*” (2001), publik AS tergugah rasa persaudaraannya dengan Irlandia Utara pada tahun 1972 saat pembunuhan 14 orang rakyat sipil di Derry, Irlandia Utara, disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi di AS. Saat itu, Presiden Richard Nixon telah berkuasa selama tiga tahun, dan *Department of State* dibawah Henry Kissinger tidak melakukan apa-apa terhadap Irlandia Utara. Bahkan Konsulat Jenderal yang ditempatkan di Irlandia Utara adalah seorang diplomat tua bernama Neil MacManus. Irlandia Utara adalah pos

⁶ *Muslims in America*. directed by Asma Gull-Hassan, (2002, Los Angeles, CA; Discovery, 2002), DVD

terakhir MacManus sebelum pensiun dan dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan berobat di *Royal Victoria Hospital* di Belfast.⁷

Menurut Thomson, di AS yang pertama kali bereaksi atas aksi kekerasan di Derry pada 1972 itu adalah kaum republik, tentunya terutama keturunan Irlandia. Muak dengan pemerintah AS yang sibuk dengan Perang Vietnam dan urusan luar negeri lainnya tapi mengabaikan Irlandia Utara, *Noraid* dan *Ancient Order of Hibernians* (AOH), organisasi Katolik Irlandia tertua di AS, mengadakan sebuah pertemuan di New York City pada 28 September 1974. Mereka merasa sudah saatnya pemerintah AS dipaksa campur tangan dalam Irlandia Utara, semenjak tidak hanya Presiden Nixon tapi juga penggantinya Presiden Gerald Ford menyatakan tidak akan mengintervensi. Argumen *Noraid* dan AOH adalah meskipun pemerintah AS menyatakan sikap non-intervensi, mereka tidak menyatakan apakah mereka netral dalam konflik itu. Rapat yang dipimpin ketua *Noraid* saat itu, John Keane, memutuskan untuk mengubah sudut pandang media AS yang selalu memberitakan Irlandia Utara dari perspektif Inggris.⁸

Itu adalah keputusan pertama. Keputusan kedua adalah membentuk organisasi independent yang akan sejalan dengan *Noraid* dan AOH dalam menggerakkan pemerintah. Para hadirin rapat setuju untuk mengumpulkan massa Katolik Irlandia di daerah asal masing-masing, namun tidak ada seorang pun yang betul-betul bergerak. Hingga akhirnya tampillah seorang pastor asal Irlandia Utara yang memang pindah ke AS dengan tujuan menggalang dukungan demi kemerdekaan tanah kelahirannya, yaitu Sean MacManus (tidak ada hubungan saudara dengan Neil.) Sejak awal kepindahannya pada 1972, MacManus memang sudah “diijoni” oleh orang-orang Partai Republik. Orang pertama yang menampung MacManus adalah seorang pastor anggota partai tersebut bernama Thomas Drury, yang ketika muda beremigrasi dari County Sligo, Republik

⁷ Joseph E. Thomson, *American Policy and Northern Ireland: A Saga of Peacebuilding*. (Connecticut: Praegers Publishers, 2001), 17

⁸ *Ibid.*, hal 18-19

Irlandia. Drury menampung MacManus dalam sebuah gereja di Corpus Christi, Texas.⁹

Aksi pertama MacManus adalah memboikot pertandingan sepak bola antara AS dan Irlandia Utara yang diselenggarakan di *Gaelic Park*, New York, pada tahun yang sama. Boikot itu diselenggarakan dengan kerjasama antara MacManus, ketua AOH cabang Minnesota Charles McCafferty dan pejabat bea cukai, Frederick Burns O'Brien. Kesuksesan boikot itu adalah cikal bakal lahirnya *The Irish National Caucus* (INC). Seperti telah disebutkan secara singkat dalam bab III, INC merumuskan *The Macbride Principles* pada Agustus 1979. Salah satu faktor yang berkontribusi pada kelahiran *The Macbride Principles* antara lain adalah kunjungan MacManus ke Ulster, yang boleh dibilang pusat konflik Irlandia Utara karena penduduk Protestan yang mayoritas menindas minoritas yang Katolik, pada akhir Juli 1979. Pada saat itu dia menemukan perusahaan-perusahaan AS yang memiliki rasio pekerja Protestan dan Katolik yang tidak seimbang. MacManus kemudian melaporkan kondisi ini kepada Benjamin Gilman, anggota Kongres AS di komisi yang mengawasi perdagangan internasional.¹⁰

The MacBride Principles, yang diambil dari nama pemegang Nobel asal Irlandia Utara dan ketua *INC Associates* Sean MacBride, berisi sembilan prosedur ketenagakerjaan di Irlandia Utara, beberapa diantaranya adalah meningkatkan representasi kelompok etnis dan minoritas di tempat kerja dan perlindungan terhadap pekerja dari kelompok etnis dan agama minoritas. *The MacBride Principles* tidak hanya diberlakukan pada perusahaan-perusahaan AS yang mempunyai kantor di Irlandia Utara, tapi juga kantor-kantor di berbagai negara bagian AS.¹¹

INS kemudian semakin besar pengaruhnya. Pada tahun 1977, MacManus sekali lagi mengkoordinir boikot terhadap kunjungan Ratu Elizabeth II ke Boston, Massachusetts. Ribuan orang berdemonstrasi menolak kehadiran kekuatan yang

⁹ *Ibid.*, hal 20

¹⁰ *Ibid.*, hal 20-21

¹¹ *Ibid.*, hal 22

menindas Irlandia Utara di AS. Begitu besarnya INS sehingga Jimmy Carter dalam kampanye kepresidenannya pada 1976 merasa perlu meminta restu organisasi ini. Tentu saja hal ini dilakukan untuk menarik suara masyarakat Katolik Irlandia, yang kemudian berharap Carter akan lebih berani terhadap Inggris. Sayangnya, seperti telah disebutkan sebelumnya, seperti para pendahulunya Carter lembek menghadapi Inggris. Perlahan namun pasti, lobi INS dengan dukungan warga keturunan Irlandia menuai kesuksesan. Atas desakan Tip O'Neill, juru bicara Kongres, Presiden Reagan mendekati PM Thatcher agar memulai proses perdamaian, yang hasilnya adalah *The Anglo-Irish Agreement* yang ditandatangani pada 1985. Inti perjanjian tersebut adalah Republik Irlandia betul-betul dilibatkan dalam pemerintahan di Irlandia Utara, selama Irlandia Utara masih menjadi bagian dari Inggris sampai mayoritas warga di sana memutuskan untuk bergabung dengan Republik Irlandia. Perjanjian tersebut sebenarnya hampir terasa sebagai pepesan kosong karena seperti diketahui, mayoritas penduduk Irlandia Utara adalah Protestan yang memihak Inggris. Sampai kapanpun mereka tidak akan pernah mau bergabung dengan Republik Irlandia. Reagan mungkin akan bisa melakukan lebih banyak apabila Patrick Magee dari *Provisional IRA* (salah satu grup pecahan IRA) tidak mengebom *Grand Hotel* di Brighton pada 12 Oktober 1984, dengan target PM Thatcher yang sedang berada di sana untuk mengikuti konferensi Partai Konservatif.¹²

Menurut Paul Dixon dalam tulisannya untuk "*Political Science Quarterly*" berjudul "*Performing The Northern Ireland Peace Process on The World Stage*" (2006), apa yang dilakukan anggota Partai Republik dalam menggerakkan rakyat AS untuk mendukung perjuangan Irlandia Utara adalah perpindahan dari perjuangan bersenjata (*armed struggle*) ke perjuangan tidak bersenjata (*unarmed struggle*). Keadaan yang membutuhkan aktor-aktor luar negeri untuk memperjuangkan suatu perkara, yang mana para aktor global tersebut berbagi nilai yang sama tentang perkara itu disebut pan nasionalisme. Meskipun banyak yang mengakui keberhasilan lobi keturunan Irlandia di AS yang akhirnya membuahkan Presiden Clinton memasukkan perkara ini ke dalam agenda utama

¹² *Ibid.*, hal 24-25

pemerintahannya, setelah perjuangan panjang selama masa empat presiden sejak Nixon, menurut Kevin Cullen dalam tulisannya “*America and The Conflict*” (1998), peran diaspora Irlandia di AS terlalu dibesar-besarkan.

Cullen berpendapat bahwa tujuan sebenarnya dari dukungan AS adalah agar IRA mau betul-betul menghentikan kegiatan terorisme, namun hal ini tidak berhasil karena IRA tetap melakukan berbagai aksi terorisme, tidak hanya pengeboman tapi juga penculikan (tidak hanya manusia tapi juga binatang). Meskipun banyak rakyat AS yang mendukung bergabungnya Irlandia Utara dengan Republik Irlandia, mereka tidak mampu mendukung dihentikannya terorisme IRA secara total. Menurut Bernadette Devlin sebagaimana dikutip Cullen, hal ini karena bagi generasi tua keturunan Irlandia percaya kekerasan efektif untuk menciptakan perdamaian di Irlandia Utara (dengan kata lain menenyahkan Inggris dan membekuk warga Protestan pro-Inggris), sedangkan generasi mudanya mengira IRA adalah kepanjangan dari *Individual Retirement Account* (lebih lanjut, Devlin menyebutkan bahwa para anak muda ini bahkan tidak sadar mereka keturunan Irlandia).

Hal lain yang juga menyumbang pada ketidaksuksesan lobi konstituen keturunan Irlandia AS adalah ketidakpercayaan kaum unionist terhadap tindakan IRA. Pada Agustus 1994, IRA mengumumkan dihentikannya gencatan senjata, dan pernyataan IRA ini tidak dipercayai oleh *unionist*. *Unionist* memang memiliki alasan yang masuk akal untuk tidak mempercayai IRA. Pada Januari tahun yang sama, seperti dibahas sebelumnya, Clinton mengundang Gerry Adams selaku ketua partai sayap politik IRA Sinn Fein ke Gedung Putih. Tak lama kemudian serangkaian kegiatan berkaitan dengan investasi perusahaan-perusahaan besar AS di Irlandia Utara dimulai. Sinn Fein pun mendapatkan komisi atas upaya mereka membungkam IRA. Karena IRA pada awalnya bertujuan untuk menggabungkan Irlandia Utara ke Republik Irlandia, dan Gerry Adams tidak sungguh-sungguh dengan upaya damai karena perhatiannya terbagi dengan

membantu AS dengan kepentingan ekonominya. Maka seperti sudah diduga *unionist*, IRA kembali mengangkat senjata, tepatnya pada Februari 1996.¹³

Lobi INS juga secara tidak langsung berbuah simalakama yang harus ditelan rakyat AS sendiri. Cullen menceritakan pengalamannya dicegat para tentara Inggris dan Ulster di perbatasan berbagai kota di Irlandia Utara dalam mewawancarai beberapa petinggi IRA. Tidak hanya mencegat, para tentara ini juga mempersulit masuknya Cullen ke kota-kota tersebut. Orang-orang AS sudah mendapat citra sebagai pendukung IRA tidak hanya di mata *unionist*, tapi juga di mata orang Inggris. Jadi teori yang mengatakan kehilangan kepercayaan Inggris merupakan resiko kecil tidak sepenuhnya benar.

Lobi untuk Irlandia Utara adalah hal yang sangat wajar, mengingat keturunan Irlandia bukan saja mayoritas, tapi dukungan bagi Irlandia Utara sebetulnya hanya meneruskan tradisi yang sudah ada sejak eksodus massal *The Great Potato Famine* pada pertengahan abad ke-19. Sejak orang-orang Katolik dari Irlandia menjejakkan kaki di AS, mereka sudah mendirikan *The Fenian Brotherhood* cabang New York, yang diketuai John O'Mahony, untuk membantu *The Fenian Brotherhood* cabang Irlandia memperjuangkan kemerdekaan dari Inggris hingga menjadi Republik Irlandia.¹⁴ Juga merupakan hal yang wajar jika Partai Republik membantu boikot Sean MacManus terhadap pertandingan sepak bola AS melawan Irlandia Utara, dan juga menampung pastor tersebut sejak baru tiba dari Irlandia Utara. Partai Republik telah sejak awal berdiri pada 1854 menelurkan lebih banyak presiden ketimbang Partai Demokrat yang lebih tua, dan tentu saja kebanyakan presiden tersebut keturunan Irlandia (meski sebelum Kennedy mereka semua beragama Protestan). Partai Republik terkenal pula sebagai *Grand Old Party* (GOP), karena mayoritas pendukungnya adalah keturunan Irlandia generasi tua¹⁵ (seperti telah disebutkan di awal thesis, Peter King yang terang-terangan mendukung IRA ditengah sidang radikalisme warga Muslim adalah anggota Kongres dari Partai Republik.)

¹³Roger MacGinty, "American Influences on The Northern Ireland Peace Process," *The Journal of Conflict Studies* 27 (1997): 10, diakses pada 16 April 2012, pukul 10:57, <http://journals.hil.unb.ca/index.php/jcs/article/view/11750/12521>

¹⁴ Mike Cronin, *Irish History for Dummies*, (Sussex: John Wiley & Sons, 2011), 189-203

¹⁵ Michael Zak, *Back to Basics for The Republican Party*, (New York: Signature Books, 2003), 36

Sejauh ini disinilah letak nosi etnisitas yang paling jelas, dimana etnis mayoritas di negara manapun akan mendapat perhatian lebih dari pemerintah, seperti di Indonesia pada masa Soeharto dimana orang-orang dari suku Jawa yang dominan ditempatkan sebagai pemimpin di daerah-daerah non-Jawa. Dengan bentuk nosi etnisitas yang paling jelas ini sekalipun masih pula ada yang menyangsikan bahwa rasisme adalah dasar utama berbagai kebijakan luar negeri AS. Maka marilah kita bandingkan lobi keturunan Irlandia dengan lobi keturunan Pakistan di negara berlagu kebangsaan “*Star Spangled Banner*” itu.

4.3. PERAN LOBI KETURUNAN PAKISTAN DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI AS

Hubungan bilateral AS dengan Pakistan sudah dimulai pada 20 Oktober 1947, sekitar dua bulan setelah kemerdekaan India dan Pakistan memisahkan diri dari India. AS adalah penyumbang senjata dan bantuan finansial bagi Pakistan. Hubungan kedua negara ini sejak awal dihiasi kerikil, yang disebabkan oleh perseteruan Pakistan dan India, dan persepsi masyarakat mayoritas AS pada umumnya terhadap Islam setelah 9/11 (mayoritas penduduk Pakistan beragama Islam.) Bagian ini akan membahas bagaimana berbagai lobi dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri AS terhadap Pakistan.

Seperti komunitas Yahudi, komunitas Pakistan juga termasuk minoritas. Jumlah mereka bahkan lebih sedikit dari jumlah warga Yahudi, seperti dibuktikan dalam sensus tahun 2010 yang menunjukkan ada sekitar 363.699 warga keturunan Pakistan tinggal di seluruh AS. Juga sama seperti komunitas Yahudi, sebagian besar keturunan Pakistan berdiam di New York. Sama seperti komunitas imigran Irlandia, imigran Pakistan memiliki sebuah NGO bernama *Pakistan Caucus*. Selain itu ada juga *Committee Supporting Democracy and Justice in Pakistan* dan *The Kashmiri American Council*, NGO yang mengetengahkan perjuangan orang-orang Kashmir, wilayah yang diperebutkan India dan Pakistan. Bagian ini akan mengambil lobi keturunan Pakistan dalam dua fase, isu Kashmir dan pasca

tertembaknya Osama bin Laden (OBL) oleh tentara unit khusus AS dalam *Operation Neptune Star* di Abbottabad pada 2011.¹⁶

Tidak seperti keturunan Irlandia dimana siapapun bisa menjadi pelobi, Pakistan terkenal dengan pemerintahnya yang membayar pelobi professional. Pelobi professional itu bisa warga negara Pakistan, orang Pakistan warga negara AS, atau bisa juga orang kulit putih warga negara AS. Salah seorang kulit putih AS yang menjadi pelobi Pakistan adalah Stephen Payne yang dibayar untuk membujuk pemerintah AS agar memberikan bantuan keuangan dan menyetop sanksi militer. Payne tidak hanya berhasil membuat pemerintahan Bush Jr. memberikan bantuan keuangan dan militer (diantaranya beberapa pesawat dan helicopter) tapi juga memberikan Pakistan status *major non-ally* di *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) pada 2004, yang berarti Pakistan telah menjadi rekanan kerjasama militer AS tanpa menjadi anggota NATO. Selain individual, pemerintah Pakistan juga terkadang menjuk firma lobi seperti *Janus-Meritt Strategies*.¹⁷

Sepanjang sejarah lobi Pakistan, sudah banyak terdapat kasus, seperti penghubung atau staff langsung pemerintahan AS yang tidak mau menerima pelobi karena komisi yang dianggap kurang, seperti yang terjadi pada Maret 1997 saat anggota DPR (*US House of Representatives*) asal Indiana dari Partai Demokrat, Dan Burton. Burton dilaporkan meminta US\$5000 dari Mark Siegel selaku pelobi mewakili Perdana Menteri Benazir Bhutto sebagai bayaran untuk memasukkan Pakistan ke dalam agenda luar negeri Kongres. Menurut *The Washington Post*, yang menurunkan berita tersebut, dana sebesar US\$5000 tersebut nantinya akan digunakan sebagai dana kampanye pencalonan Burton

¹⁶ Aminah Mohammad-Arif, "The Lobbying Game of The Indian and Pakistani Diasporas in The US," *Sciences Po Center for Indian and South Asian Studies Journal* 2 (2001): 1, diakses pada 19 April 2012, pukul 14:17, <http://www.ceri-sciences-po.org/archive/jan01/lobbying.pdf>

¹⁷ Andrew Tilghman, "Stephen Payne Worked for Pakistan after Sept. 11", *The Pakistan Post* (2008): diakses pada 19 April 2012, pukul 14: 40, http://tpmmuckraker.talkingpointsmemo.com/2008/07/steven_payne_worked_for_pakist.php.

kembali di DPR tahun depan. Burton dan Kedutaan Besar Pakistan di Washington menolak memberikan keterangan atas kasus ini.¹⁸

Baru-baru ini, tepatnya Juli 2011, Reuters melaporkan seorang warga negara AS keturunan Pakistan yang telah menjadi pelobi urusan Kashmir selama 20 tahun ditangkap. Syed Ghulam Nabi Fai, seorang separatis Kashmir, divonis penjara dua tahun setelah mengaku bersalah melakukan penggelapan pajak dan menerima US\$3.5 juta dari badan intelijen Pakistan sebagai dana lobi *The Kashmiri American Council*. Fai memang salah satu direktur NGO tersebut. Tidak hanya penggelapan pajak dan menerima dana dari *Inter-Services Intelligence Agency* (ISI), Fai juga tidak terdaftar sebagai pelobi resmi, yang membuatnya dicurigai sebagai mata-mata. Selain Fai, ada seorang lagi pelobi Kashmir yang tidak terdaftar sebagai pelobi resmi, yakni Zaheer Ahmad.¹⁹ Sebelumnya, harian Inggris *The Independent* menurunkan laporan mendetil mengenai kegiatan Fai sebagai pelobi illegal untuk Kashmir. Dikatakan bahwa Fai mendapat US\$700.00 setahun dari ISI dan Pemerintah Pakistan untuk membiayai berbagai konferensi mengenai Kashmir dan menyumbang untuk kampanye politikus yang berjanji memperjuangkan Kashmir sebagai menteri, anggota Kongres, anggota DPR (salah satu dari para politikus ini adalah Dan Burton), bahkan presiden (Fai menyumbang dana kampanye untuk Obama pada tahun 2007). Ada pihak-pihak yang curiga penangkapan Fai adalah hasil lobi India. Salah satu pihak yang curiga itu adalah Mahmoud Ali Durani, mantan duta besar Pakistan untuk AS, yang mempertanyakan mengapa Fai baru ditangkap sekarang setelah 20 tahun menjadi pelobi illegal Pakistan untuk masalah Kashmir.

Neil Munro dalam tulisannya untuk *The Daily Caller*, “*Despite Deteriorating Relations, Pakistan Lobby Grows in DC*” (2011), mengutip Taha Gaya, direktur *Pakistani American Leadership Center* yang berbasis di Washington. Gaya mengatakan sejak OBL tertembak, ada nosi dalam masyarakat

¹⁸ Charles R. Babcock, “Pakistan Lobbyist’s Memo Alleges Shakedown by House Probe Leader,” *The Washington Post* (1997): diakses pada 20 April 2012, pukul 03:20, <http://www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/special/campfin/stories/cf031997.htm>.

¹⁹ Jeremy Pelofsky, “US Charges Two for Illegal Lobbying for Pakistan,” *Reuters* (2011), diakses pada 20 April 2012, pukul 03:30, <http://www.reuters.com/article/2011/07/19/us-usa-pakistan-kashmir-idUSTRE7616FQ20110719>

AS bahwa pemerintah Pakistan sengaja menyembunyikan OBL di Abbottabad, hanya karena persembunyian terakhir OBL berada di dekat sebuah markas militer. Leon Panetta, ketua CIA yang diwawancarai Munro, mengaku Obama memang tidak memberitahu pemerintah Pakistan bahwa pasukan khusus telah dikirim. Dan sebelum dikirim lokasi persembuyian OBL itu telah dipantau melalui satelit dan kamera pengintai. Selain itu, ada pula nosi militer Pakistan tidak becus dalam membereskan buronan nomor wahid di dunia tersebut. Munro mencurigai nosi-nosi tersebut sengaja diciptakan dengan melibatkan media. Salah seorang staff anti terorisme di *Homeland Security*, John Brennan, mengatakan tidak mungkin OBL bisa bertahan bersembunyi di Pakistan dalam waktu yang lama tanpa ada dukungan. Brennan memang tidak menyebut apa atau siapa yang dimaksud dengan “dukungan”, namun besar kemungkinan itu adalah pemerintah atau militer Pakistan.²⁰

Dengan dugaan bahwa Pakistan sengaja melindungi OBL, sangatlah mungkin hubungan antara Pakistan dan AS yang sempat membaik akan memburuk lagi dan AS akan kembali menjatuhkan berbagai sanksi. Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah Pakistan harus menguras kas negara untuk membayar perusahaan-perusahaan lobi AS. Sebut saja *Locke Lord Bissel & Liddell LLP* milik Mark Siegel, yang sudah disinggung sebelumnya berurusan dengan anggota DPR yang meminta bayaran sangat tinggi untuk memasukkan kepentingan Pakistan dalam agenda pemerintah. Presiden Asif Ali Zardari membayar Locke Lord US\$ 1.4 juta, dan perusahaan lobi lainnya, *Cassidy Associates*, sebanyak US\$60.000.²¹

Di luar konteks tewasnya OBL dan masalah Kashmir, NGO-NGO Pakistan di AS sendiri banyak menggunakan jasa orang-orang non-Pakistan untuk kegiatan lobi. *The Council on Pakistan Relations* (CPR) misalnya, pada tahun 2010 menyewa sebuah tim pengacara yang terdiri dari Chris Cooper, Shawn Sullivan dan David Tamasi dari *Rasky Baerlin Strategic Communications*. Tugas

²⁰ Neil Munro, “Despite Deteriorating Relations, Pakistani Lobby Grows in DC,” *The Daily Caller* (2011): diakses pada 20 April 2012, pukul 3:35, <http://dailycaller.com/2011/05/18/despite-deteriorating-relations-pakistani-lobby-grows-in-d-c/>

²¹ *Ibid.*

para pengacara ini adalah melobi para politikus Washington agar terus mengirimkan bantuan dan membawa para anggota CPR ke dalam lingkungan eksklusif parlemen. Tidak hanya itu, ketua CPR, Muhammad Ashraf Qazi, juga menyumbang uang berjumlah tidak sedikit pada Partai Demokrat dan Partai Republik.²²

4.4. INDIA, PAKISTAN, AS DAN PELOBI PROFESSIONAL

Menarik untuk memperhatikan mengapa Pakistan harus membayar pelobi profesional atau membayar perusahaan lobi untuk memperjuangkan kepentingan Pakistan, tidak seperti komunitas Irlandia dan Yahudi yang dapat menggalang kekuatan massa untuk mendemo pemerintah, mendirikan NGO etnis (*ethnic interest group*) yang melakukan kegiatan lobi utama, atau tokoh-tokoh yang memang secara sukarela memperjuangkan kepentingan tanah nenek moyang mereka. Seperti disebutkan, para pelobi untuk Pakistan itu tidak harus orang Pakistan atau warga negara AS keturunan Pakistan saja. Siapapun bisa menjadi pelobi Pakistan. Menurut Aminah Mohammad-Arif dari *Center of Indian and South Asian Studies* di Paris dalam tulisannya "*The Lobbying Game of Pakistan and Indian Diasporas in The US*" (2001), lobby dalam pemerintahan oleh NGO-NGO India dan Pakistan sudah berjalan sejak tahun 1970-an. Namun selama sepuluh tahun pertama kegiatan melobi ini, hanya satu keberhasilan yang diraih, yakni oleh *The Associations of Indians in America* dalam mengklasifikan India menjadi "Asia Selatan" dalam formulir-formulir resmi pada 1980, karena sebelumnya India dan Pakistan diklasifikasikan sebagai "lain-lain" dalam kolom etnis. Karena itu, banyak pengusaha-pengusaha sukses India dan Pakistan di AS kemudian terobsesi mendekati diri dengan para pejabat pemerintah, sedemikian ekstrimnya hingga mereka rela membayar mahal hanya untuk berfoto dengan pejabat-pejabat tersebut. Sebagai latar belakang singkat, imigran India dan Pakistan yang berpendidikan tinggi sudah mulai mendulang kesuksesan di AS sejak dekade 1960-an, salah satu penyebabnya adalah undang-undang imigrasi H1B yang mengundang para pakar informasi teknologi untuk berimigrasi ke AS. Mereka pun kemudian menempati berbagai jabatan penting di berbagai

²² *Ibid.*

perusahaan dan universitas. Dalam daftar orang-orang terkaya di AS, bisa dipastikan setidaknya ada satu orang India atau Pakistan di situ. Kebiasaan mereka menyumbang untuk partai politik, terutama untuk Partai Republik dan Partai Demokrat, juga sudah dimulai sejak 1970-an sampai akhir 1980-an (yang disebut Mohammad-Arif sebagai fase pertama dalam kegiatan melobi pemerintah).²³

Adalah Kedutaan Besar Pakistan yang pertama memulai praktek menyewa perusahaan lobi untuk mengangkat kepentingan Pakistan pada akhir 1980-an. Saat itu, Kedutaan Besar Pakistan membayar *Neill and Co*, untuk mengangkat sanksi terkait program nuklir. Sebagai latar belakang singkat, Kedutaan Besar Pakistan menyewa *Neill and Co* karena populasi keturunan Pakistan yang tidak tersentralisasi, meyebar dimana-mana hingga susah dihubungkan. Menurut Mohammad-Arif, AS sebenarnya pada awalnya terkesan mendukung Pakistan sehingga imigran India berpikir Washington tidak menganggap serius salah satu negara terpadat di dunia itu. Namun semua itu berubah setelah 9/11, dimana AS mengira Pakistan berkolusi dengan Al-Qaeda karena letak Pakistan dekat dengan Afganistan dan mayoritas penduduk Pakistan yang beragama Islam dan berpihak ke Palestina. Dalam keadaan inilah lahir *Pakistani American Congress*, organisasi masyarakat Pakistan AS paling berpengaruh.²⁴

Sementara itu, etnis India seperti memanfaatkan sikap bermusuhan yang ditunjukkan AS pada Pakistan dengan melobi demi kepentingan nasional India. Dalam hal ini mereka tidak menggunakan pelobi profesional. Para orang kaya India yang tinggal di Silicon Valley, salah satu daerah termahal di AS, tidak henti-hentinya mengirimkan surat elektronik ke Gedung Putih sehingga akhirnya AS betul-betul memperhatikan India. Perhatian ini selain disebabkan oleh lobi kuat etnis India di AS, juga disebabkan oleh populasi India yang sangat besar, belum lagi diasporanya tersebar di banyak negara lain. Diaspora etnis India di negara-negara lain seperti Inggris dan Selandia Baru pun banyak pula, sehingga tidak bisa

²³ Aminah Mohammad-Arif, "The Lobbying Game of Indian and Pakistani Diasporas," *Sciences Po Center for Indian and South Asian Studies* 2 (2001): 2, diakses pada 19 April 2012, pukul 14:55, <http://www.ceri-sciences-po.org/archive/jan01/lobbying.pdf>.

²⁴ *Ibid.*, hal 3-4

dibayangkan apa reaksi dunia bila AS mengabaikan India lagi. Sebelumnya, India hanya masuk media AS jika terjadi bencana alam yang memakan banyak korban, dan sejak 1978 presiden AS tidak pernah mengadakan kunjungan kenegaraan. Barulah pada Maret 2000 Presiden Clinton berkunjung ke India, dan itu juga adalah hasil lobi etnis India di AS. Sedangkan mengenai Pakistan, Washington menganggap sikapnya terhadap Pakistan tidak terelakkan dan dibenarkan karena setelah 9/11 seluruh dunia tidak menyangka pemeluk agama Islam bisa melakukan tindakan begitu ekstrim yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian dalam segala aspek.²⁵

Lobi kuat dari etnis India ini tidak hanya karena surat elektronik yang terus datang ke Gedung Putih. Orang-orang keturunan India di AS juga mengambil kesempatan dalam mendinginnya hubungan AS dan Pakistan untuk mengembangkan *Congressional Caucus on Indian and Indian-Americans* (CCIIA), yang berfungsi seperti INS. Pada tahun 1993 ketika didirikan CCIIA hanya memiliki delapan anggota, pada tahun 2001 CCIIA sudah berkembang menjadi 122 anggota. Penting untuk diperhatikan, meskipun pada namanya mengandung “*Indian Americans*”, tidak seorang pun anggota CCIIA yang merupakan orang AS keturunan India atau warga negara AS. Semua anggota CCIIA adalah warga negara India. Salah satu sebab hal ini adalah tidak ada satu pun warga India Amerika yang duduk di parlemen.²⁶ Di sini kita bisa melihat adanya parallel antara warga keturunan India di AS dengan warga keturunan Cina di Indonesia, dimana keturunan India dan Cina sama-sama kuat secara ekonomi, tapi representasi mereka di pemerintahan sangat kecil atau bahkan tidak ada.

Sementara di sisi warga keturunan Pakistan, seperti diketahui hingga kini mereka masih saja mengandalkan para pelobi profesional yang bisa juga merupakan seorang non-Pakistan, yang dipilih karena dia pro Palestina atau memilih menerima tugas lobi karena tertarik dengan bayarannya. Dan para pelobi profesional itu belum tentu efektif. Sebuah kejadian pada 1995 merupakan contoh, *The Brownback Amandment* yang berisi diangkatnya pelarangan

²⁵ *Ibid.*, hal 5-7

²⁶ *Ibid.*, hal 7

penjualan senjata dan perlengkapan militer lainnya. Sekilas tampaknya lobi ini berhasil, namun keberhasilannya dipertanyakan karena senjata dan alat-alat militer belum tiba di Pakistan setelah lewat tenggat waktu, padahal pemerintah Pakistan telah membayar lunas. Bahkan sampai tulisan Mohammad-Arif diterbitkan oleh *Sciences Po* pada 2001, logistik tersebut belum juga tiba dan pemerintah AS tidak mengembalikan uang Pakistan sepeser pun. Presiden Clinton malah berdalih uang untuk bantuan militer itu telah digunakan untuk mengirim bantuan lainnya ke Pakistan. Jelas saja warga Pakistan di AS sangat kecewa, dan mereka bertambah kecewa setelah mereka mengumpulkan US\$50.000 untuk kampanye senat Hilary Clinton dan kunjungan Bill Clinton ke Islamabad pada Maret 2000. Dalam kunjungan itu, Bill Clinton tidak melakukan dialog yang berarti dengan Jenderal Pervez Musharraf yang dengan militer sudah menguasai Pakistan sejak Oktober 1999. Inti dari pidato Clinton adalah bahwa tidak ada solusi militer yang berarti untuk menyelesaikan Kashmir. Hingga saat ini, lobi Pakistan paling sukses setelah status *major non-ally* di NATO adalah Pakistan tidak diberikan status negara teroris dan tidak dikenakan *Brownback Amendment* pasal 508 yang berisi penghentian bantuan pada negara-negara non-demokrasi.²⁷

Kurang suksesnya lobi keturunan Pakistan dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri AS disebabkan beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut adalah populasi mereka yang tidak sebanyak keturunan India, keadaan sosio ekonomi yang tidak semapan keturunan India, program nuklir yang dilancarkan PM Zulfikar Ali Bhutto pada 1972 dan militer yang mengambil alih Pakistan yang akhirnya berdampak pada penurunan ekonomi. Ditambah dengan letak geografis yang dekat dengan Afganistan dan keberpihakan penduduk mayoritas Muslimnya pada Palestina membuat citra sebagai negara teroris semakin kuat. Di samping itu ada pula unsur permusuhan dengan India yang terlihat dengan bagaimana keturunan India berusaha membuat pemerintah AS menetapkan status negara teroris pada Pakistan, dan komunitas Pakistan berusaha mencegah agar India tidak menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, belum lagi persetujuan keduanya mengenai Kashmir. Hal ini menganggap lobi kedua negara tidak ditanggapi serius

²⁷ *Ibid.*, hal 7-8

oleh pelobi-pelobi professional yang disewa Pakistan dan para politikus sehingga mereka kurang lebih hanya melihat usaha-usaha lobi tersebut sebagai ajang mencari dana. Mohammad-Arif dalam tulisannya menyebutkan bahwa generasi kedua Pakistan di AS lebih mengerti keadaan politik AS daripada orang tuanya yang sangat berorientasi pada kampung halaman, sehingga mereka tidak lagi memberikan dana kampanye atau lobi kepada individual, tetapi langsung pada partai atau badan pemerintah seperti DPR.²⁸

4.5. KESIMPULAN

Dapat ditarik kesimpulan bahwa besar kecilnya suatu kelompok etnis tidak menjadi ukuran dalam kesuksesan lobi. Strata ekonomi menjadi faktor yang tidak kalah penting. Populasi yang kecil namun berkekuatan ekonomi tinggi menghasilkan lobi yang sukses, seperti telah dibuktikan oleh etnis Yahudi. Selain itu, citra negara asal juga penting, seperti yang dibuktikan etnis Pakistan dan India.

Jika diperhatikan lebih dalam, dalam lobi keturunan Pakistan ini terlihat adanya nosi etnisitas dimana pemerintah AS larut dalam suasana dunia pasca 9/11 yang mengasumsikan Islam sebagai agama teroris. Memang tidak bisa dihindarkan bahwa Pakistan yang mayoritas Muslim akan terkena imbas asumsi ini, sebagaimana negara-negara Islam atau mayoritas Muslim lainnya, tapi tentu saja berhenti memperhatikan upaya lobi Pakistan karena asumsi tersebut tidak dapat dibenarkan. Asumsi ini juga menyebabkan Pakistan terus bergantung pada pelobi professional yang diragukan totalitasnya dalam memperjuangkan kepentingan Pakistan, sementara India bisa mengandalkan CCIIA yang digawangi langsung oleh orang-orang India warga negara India sendiri.

²⁸ *ibid.*, hal 9-11

Tetapi rasisme atau nosi etnisitas ini tidak boleh melembekkan Indonesia dalam menjalin hubungan bilateral dengan AS. Dalam bab terakhir akan dijelaskan lobi seperti apa yang dianggap ideal oleh para ahli kebijakan luar negeri dan hubungan internasional di AS, dan bagaimana Indonesia dapat menarik pelajaran dari hal itu. Juga ada saran-saran mengenai apa yang harus diperhatikan dalam mengubah persepsi AS tentang Indonesia berkaitan dengan terorisme. Hal-hal yang perlu diperhatikan tersebut tidak melulu meliputi *hard power* (kekuatan keras) tapi juga *soft power* (kekuatan lunak). Memperhatikan *soft power* dirasa lebih penting karena hal ini meliputi kesejahteraan rakyat yang tentu akan berbuah kesejahteraan negara, dan negara yang sejahtera akan lebih dihormati daripada negeri yang kacau secara ekonomi (yang tentu mengakibatkan kekacauan sosial).



BAB V

PENGARUH PERDAGANGAN BEBAS DALAM KEKERASAN IRA KINI

Bab ini akan membahas apakah hingga saat ini IRA masih menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan politiknya, dan jika masih sampai sejauh mana kekerasan tersebut digunakan. Bab ketiga sudah mengisyaratkan bahwa perdagangan bebas (*free trade*) yang dilakukan AS pada masa kepresidenan Bill Clinton, dimana Sinn Fein menjadi salah satu partai terkaya di Irlandia, tidak menghentikan aksi kekerasan IRA. Jauh setelah Clinton turun, yang mana saat ini Hilary Clinton menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam pemerintahan Presiden Barack Obama, kekerasan di Irlandia disinyalir tetap berjalan.

Selain dari sisi perdagangan bebas, bab ini juga sedikit memasukkan unsur perlobian dalam menelaah kekerasan IRA saat ini. Seperti telah dibahas dengan detail di bab keempat, lobi anti kekerasan Partai Demokrat AS untuk Irlandia Utara pada decade 1990-an tidak berhasil menghentikan kekerasan IRA. Hal ini dikarenakan keturunan Irlandia generasi tua masih percaya kekerasan adalah salah satu cara terbaik mencapai tujuan politik, sedangkan generasi mudanya tidak peduli pada akar dan asal usul mereka (Cullen, 1998.)¹ Di Irlandia Utara sendiri, dukungan ini seperti buah simalakama, karena pemerintah unionists di sana mencurigai setiap warga AS yang berkunjung karena mereka dianggap pendukung teroris. Ini masih juga ditambah dengan persoalan ideology para personnel IRA, yang tentu saja adalah menggabungkan Irlandia Utara dengan Republik Irlandia. Mereka akan terus mengangkat senjata hingga tujuan tersebut berhasil. Bab ini akan membahas bagaimana pengaruh lobi keturunan Irlandia di AS dalam hubungannya dengan pengentian kekerasan di Irlandia Utara.

¹Kevin Cullen, "America and The Conflict", *Public Broadcasting Service* (1998): diakses pada 15 Juni 2012, pukul 09:32, <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/ira/reports/america.html>.

Hal baru yang akan disertakan dalam bab ini adalah unsur-unsur “peran korban” dalam proses perdamaian di Irlandia Utara seperti yang dibahas oleh Tore Bjorgo dan John Horgan dalam “Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement” (2009). Menurut Bjorgo dan Horgan, “peran korban” ini adalah alasan mengapa Irlandia Utara tampak damai dari luarnya saja. Tentu saja peran AS dalam unsur terakhir ini akan dibahas pula. Ketiga unsur ini (perdagangan bebas, perlobian dan “peran korban”) akan dikaitkan dengan terorisme Islam yang menjadi momok menakutkan bagi AS dan berbagai belahan dunia lainnya.

5.1. IRA PASCA 9/11 DAN IMPLEMENTASI PERDAMAIAN

Seperti telah dibahas pula dalam bab ke-4, tidak lama setelah serangan 9/11, organisasi-organisasi keturunan Irlandia di AS meminta agar mereka tidak dikategorikan sebagai penyokong terorisme. Saat itu, seperti sudah diketahui, Presiden Bush Jr. sedang menggalakkan sweeping terhadap berbagai organisasi Islam yang dicurigai berhubungan dengan Al-Qaeda dan membekukan aset-aset mereka. Para petinggi organisasi-organisasi keturunan Irlandia ini, salah satunya Irish Freedom Committee yang berbasis di New York, mengatakan serangan-serangan IRA adalah perjuangan kemerdekaan dan bukan terorisme seperti Al-Qaeda, hanya karena bom bunuh diri tidak ada dalam kebudayaan Irlandia (Duffy, 2001.)²

Pada 28 Juli 2005, Wakil Ketua IRA Martin McGuinness mengumumkan penghentian gencatan senjata untuk pertama kalinya sejak ‘The Troubles’ berakhir pada 1998. Dalam sebuah maklumat yang ditujukan bagi para pejuang sukarelawan IRA, McGuinness mengajak mereka menghentikan kekerasan. Ini adalah awal dari sejarah baru dalam perjuangan Irlandia Utara membebaskan diri dari Inggris, karena sejak saat itu perjuangan akan bersifat politik dipimpin oleh Sinn Fein.³

²Jonathan Duffy, “Rich Friends in New York”, BBC News (2001): diakses pada 15 Juni 2012, pukul 09:40, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1563119.stm>.

³Paul Arthur, “The End of IRA’s ‘Long War,’” *Open Democracy* (2005): diakses pada 15 Juni 2012, pukul 09:46, http://www.opendemocracy.net/democracy-protest/IRA_2711.jsp.

Menurut Paul Arthur dalam tulisannya ‘The End of IRA’s ‘Long War’” (2005), ada beberapa faktor penyebab perubahan bentuk perjuangan ini. Yang pertama, seperti mudah ditebak, adalah sentiment dunia terhadap terorisme, terutama yang berbau Islam. IRA merasa perlu memproyeksikan citra sebagai murni kelompok perjuangan yang hanya berjuang untuk Irlandia Utara. Kemudian ada pula dua kejadian kriminal yang ditenggarai dilakukan beberapa personel PIRA, yaitu perampokan Northern Bank pada 21 Desember 2004 dan pembunuhan seorang warga sipil bernama Robert McCartney pada 31 Januari 2005 (keduanya terjadi di Belfast, Irlandia Utara).⁴

Kedua kejadian tersebut memperburuk citra IRA, meskipun IRA menyangkal bahkan sampai menawarkan kepada keluarga Robert McCartney untuk memburu pelaku sebenarnya. Kedua kejadian ini terdengar sampai ke AS dan Senator Patrick Kennedy dari Partai Demokrat (dan keponakan John F. Kennedy) mengundang dua adik perempuan McCartney dalam perayaan St. Patrick’s Day di Washington DC pada Maret 2005. Sementara itu, AS menolak permohonan visa kunjungan Gerry Adams dan melarang anggota Sinn Fein mengumpulkan dana di acara tersebut.⁵

Kehilangan legitimasi inilah yang menyebabkan Adams pada April 2005 menyerahkan keputusan pada IRA, apakah perjuangan akan tetap bersifat militer atau berubah menjadi politik. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, akhirnya IRA memerintahkan decommission (pelucutan senjata). Untuk mendukung decommission, McGuinness menyambangi pemerintah Bush Jr. di AS bahkan sehari sebelum dikeluarkannya maklumat mengenai decommission. Banyak yang pesimis cara “damai” ini akan berhasil. Fintan O’Toole, seorang wartawan kenamaan Irlandia Utara, mengatakan, “*For the self esteem of the so-called republican movement and the political future of Sinn Fein, it is vital that its 30-year campaign of violence be remembered as a just war, a regrettable but necessary method of achieving a legitimate aim.*”⁶

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Lalu apakah upaya McGuinness, yang kini menjadi Wakil Menteri Pertama Irlandia Utara, dalam mendapatkan dukungan pemerintah Bush berhasil? Penting untuk diingat bahwa kunjungan McGuinness berjarak hanya tiga minggu dari serangan di sebuah stasiun kereta api bawah tanah di London pada 7 Juli yang dilakukan beberapa pemuda yang teradikalisasi Al-Qaeda. Serangan ini tidak mempengaruhi hubungan dagang Inggris dan AS seperti telah dibahas pada bab ketiga, dan reaksi Bush Jr. pada IRA kali ini sangat tenang. Bush Jr. hanya menyatakan mendukung decommission karena itu merupakan bagian dari The Good Friday Agreement 1998, yang mana salah satu ayatnya berbunyi “*to exclusively use democratic and peaceful means of resolving differences on political issues.*”⁷ Pada saat itu, Bush Jr. baru saja memasuki periode kedua kepresidenannya, sebuah kemenangan yang tidak terduga mengingat Bush Jr. sama sekali tidak populer karena kebijakannya GWOT-nya. Reaksi tidak berlebihan Bush Jr. padadisarmament IRA dan juga pada pelaku pembomban di London merupakan pilihan yang strategis bagi pencitraan.

Di balik *decommission*, terbersit pertanyaan mengapa IRA baru pada 2005 menyatakan decommission tujuh tahun setelah berakhirnya ‘The Troubles’ dan hampir empat tahun setelah 9/11. Sebetulnya hal ini sudah dibahas secara singkat di bab keempat, bahwa IRA beberapa kali melancarkan serangan teroris setelah mengumumkan penghentian gencatan senjata pada 31 Agustus 1994, beberapa bulan setelah Gerry Adams diberikan visa kunjungan oleh Clinton. *Decommission* yang beberapa kali gagal ini disebabkan oleh bentrokan dengan kaum unionist yang kerap terjadi, meskipun kaum republican dan unionist sudah berkali-kali bersepakat akan melakukan *power-sharing*. Contoh salah satu pengkhianatan unionist adalah ketika pada 20 Februari 2003 The Ulster Defense Association (UDA) menanam 18 bom di sebuah pipa di Crumlin Road, Belfast, dan melaporkan aparat bahwa IRA yang melakukan hal tersebut. Akhirnya memang terbukti DUA yang melakukan, dan ini melanggar

⁷“Bush Says IRA Must Disarm,” Daily Mail, diakses pada 16 Juni 2012, pukul 12:09, <http://www.dailymail.co.uk/news/article-60955/Bush-says-IRA-disarm.html>

kesepakatan tanggal 30 Mei 2000 tentang *power-sharing* antara unionist Ulster dengan IRA di pemerintahan Irlandia Utara.⁸

Demikianlah konflik terus berjalan hingga saat ini meskipun kekerasan sudah menurun drastic, dan ini dikarenakan kaum unionist dan republican yang tidak pernah benar-benar akur. Bagian selanjutnya akan membahas bagaimana andil perdagangan AS di periode kedua kepemimpinan Bush Jr. (2004-2008) dan periode pertama kepresidenan Obama (2009-sekarang) dalam menjaga keadaan Irlandia Utara yang dari luar tampak tenang (meskipun hanya nampak luar).

5.2 PERDAGANGAN AS DALAM PROSES PERDAMAIAN

Pada Juni 2008, hanya beberapa bulan sebelum periode keduanya berakhir, Bush Jr. mengadakan kunjungan satu hari ke Irlandia Utara. Kunjungan tersebut bertujuan mempromosikan iklim investasi di Irlandia Utara. Bush Jr. dalam kunjungan tersebut mengatakan iklim investasi yang aman yang di Irlandia Utara tidak mungkin dicapai sepuluh tahun sebelumnya. Kedatangan Bush Jr. diwarnai demonstrasi dimana para demonstran membawa bendera Iraq dan seorang demonstran ditahan.⁹

Hal ini agak mirip dengan kunjungan Clinton ke Irlandia Utara pada September 2010, juga untuk urusan investasi. Kunjungan Clinton ke Magee College di Londonderry tersebut mendapat sambutan dingin dari penduduk setempat. Hal ini agak aneh mengingat upaya Clinton dalam mendamaikan Irlandia Utara selama dua periode kepresidenannya mencapai hasil yang signifikan, diantaranya MacBride Principles yang menghapuskan diskriminasi terhadap warga Katolik dalam lapangan pekerjaan.

⁸ "The Long and Arduous Road to Paramilitary Decommissioning," Belfast Telegraph, diakses pada 16 Juni 2012, pukul 12:15, <http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/the-long-and-arduous-road-to-paramilitary-decommissioning-14345877.html>,

⁹ "President Leaves NI after Visit," BBC News, diakses pada 16 Juni 2012, pukul 12:25, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/7455806.stm>.

Tidak hanya MacBride Principles, tentu saja, yang menjadi bukti keberhasilan Clinton menciptakan iklim nyaman bagi investor asing yaitu wilayah minim konflik, yang pada akhirnya berbuah kemajuan ekonomi Irlandia Utara. Data tertanggal Mei 2007 dari Portland Trust menyatakan nilai investasi di Irlandia Utara terdongkrak tajam pada 1994, dengan puncaknya yaitu 350 juta Poundsterling pada 1997. Bahkan pada 1993, 30% dari total investasi asing di Irlandia Utara berasal dari AS. Bush Jr, meski tidak memasukkan Irlandia Utara ke dalam agenda utama karena terlalu sibuk dengan terorisme Islam, berhasil mempertahankan pencapaian Clinton ini. Pada 2002 dan 2003, investasi AS mencapai total nilai 123,43 juta Poundsterling dan pada 2005 Citibank berinvestasi sebanyak 100 juta Poundsterling dan membuka 375 lapangan pekerjaan. Setahun kemudian, tercatat 10% dari lapangan pekerjaan di Irlandia Utara berasal dari perusahaan-perusahaan AS. Alasan lain mengapa investor asing terutama investor AS tertarik berinvestasi di Irlandia Utara, selain keadaan politik yang kondusif, adalah upah karyawan di Irlandia Utara 30% lebih rendah dari upah karyawan di Inggris dan Republik Irlandia.¹⁰

Di luar berbagai keberhasilan tersebut, kunjungan Bush dan Clinton seperti dipaparkan di awal bagian ini bisa menjadi pertanda bahwa meskipun ekonomi di Irlandia Utara tampaknya berjalan lancar sehingga kemiskinan berhasil dihapuskan dan kedamaian tercipta, terdapat api dalam sekam menyangkut sentimen terhadap keterlibatan AS pada masalah IRA.

Latar belakang “api dalam sekam” Irlandia Utara dalam hubungannya dengan investasi-investasi AS itu bisa jadi berasal dari Senator George Mitchell, Duta Khusus (*Special Envoy*) untuk Irlandia Utara yang ditunjuk Clinton pada periode pertamanya. Mitchell, yang sangat percaya bahwa kepentingan politik suatu negara bisa dicapai dengan bisnis, sejak awal berusaha menampilkan citra AS yang netral terutama di hadapan kaum unionists dan perwakilan penguasa Inggris. Di tengah usahanya menciptakan iklim investasi yang baik bagi investor asing di Irlandia Utara, Mitchell

¹⁰ “Economics in Peacemaking: Lessons from Northern Ireland,” (London: Portland Trust, Ltd, 2007), 29-30

mengusahakan *decommission* dan berbagai perundingan yang akhirnya berbuah The Good Friday Agreement 2008. Mitchell menerapkan apa yang kelak dikenal sebagai “The Mitchell Principles”, yakni ancaman bagi para pihak yang terlibat dalam upaya perundingan, *decommission* dan investasi bahwa mereka akan dikeluarkan bila menempuh jalan kekerasan terhadap suatu konflik. Karena tentu saja semua pihak yang terlibat, termasuk IRA dan UDA, menginginkan bagian dari investasi-investasi yang diinisiasi AS, mereka terpaksa meredam keinginan untuk menyelesaikan konflik. Kebijakan Mitchell lainnya dimana dia tidak mau terlibat lebih jauh dari ranah ekonomi, membuat para pihak yang bertikai bebas mengurus masalah mereka sendiri. Kelak hal yang terakhir ini membuat Mitchell “kecolongan” karena IRA melancarkan beberapa serangan di sekitar acara-acara penting seperti pada 9 Februari 1996 di London, pada saat yang sama Clinton menerima para delegasi pengusaha Irlandia Utara di Gedung Putih untuk membicarakan investasi.¹¹

Pada lawatan Martin McGuinness ke AS dalam rangka mencari dukungan untuk *decommission* IRA bulan Juli 2005 yang telah disebutkan di atas, McGuinness memang tidak bertemu dengan Bush Jr. Dia bertemu dengan mantan Duta Khusus untuk Irlandia Utara, Richard Haass, dan kepala organisasi-organisasi keturunan Irlandia untuk mendiskusikan peran apa yang pemerintah Bush Jr. bisa lakukan dalam mendukung *decommission*.¹²

5.2.1. BUSH JR. PERIODE KEDUA: LATAR BELAKANG

Menurut Mary-Alice Clancy dalam laporan penelitiannya yang berjudul “An Examination of The Bush Administration and The ‘Internationalization’ of Northern Ireland” (2010), ketidaktertarikan Bush Jr. pada Irlandia Utara sudah terlihat bahkan sebelum inaugurasi periode pertamanya. Bush Jr. meminta Condoleezza Rice, yang kelak menjadi Menteri Sekretaris Negara, memberitahu staff PM Tony Blair bahwa masalah Irlandia Utara adalah masalah dalam negeri mereka dan Bush Jr. meminta

¹¹*ibid.*, hal. 29

¹²“Positive and Enthusiastic US Response,” An Phoblacht, diaskes pada 16 Juni 2012, pukul 12:55, <http://www.anphoblacht.com/contents/13925>.

Irlandia Utara sudah ‘dibereskan’ sebelum periode pertamanya dimulai. Ketidaktertarikan Bush ini didasari pula oleh laporan Haass bahwa meskipun Clinton sukses menciptakan perdamaian di Irlandia Utara lewat hubungan perdagangan, menurutnya cara-cara Clinton itu salah langkah dan bertele-tele.¹³

Pemerintah Irlandia Utara sendiri kecewa dengan pilihan Duta Khusus untuk Irlandia Utara yang jatuh kepada Haass. Haass dinilai mereka sebagai seseorang yang dingin yang sudah jelas tidak begitu tertarik pada Irlandia Utara. Sikap dingin Haass dan pemerintahan Bush semakin menjadi ketika tiga orang anggota IRA tertangkap melatih para kader Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), kelompok narkoteroris Kolombia, di Kolombia pada Agustus 2001. Hal ini kemudian membuat Bush Jr. mendukung pembentukan Police Service of Northern Ireland (PSNI) yang didominasi kaum unionists.¹⁴

Di sinilah pemerintah Irlandia Utara menyadari ada harga yang harus mereka bayar untuk mendapatkan kembali bantuan ekonomi AS. Hal ini berlanjut pada janji IRA untuk melakukan decommission enam minggu setelah 9/11 dan dua anggota parlemen yang biasanya mendukung Sinn Fein, William Delahunty dan Ben Gilman, bahkan menyatakan dukungan terhadap PSNI. Tak lama kemudian, tanpa diduga Haass mulai dekat dengan Gerry Adams karena sama-sama tidak menyukai Perdana Menteri Irlandia Utara saat itu, David Trimble dari Ulster Unionist Party (UUP). Kekecewaan Haass disebabkan permintaan Trimble agar Haass mendukung Independent Monitoring Commission (IMC), sebuah badan pengawas *power-sharing* antara kaum republican dan unionist yang akan dibentuknya pada 2002. Haass tentu saja mencium bau korupsi pada proposal Trimble itu.¹⁵

Walaupun hubungan antara Haass dan Adams sudah mulai hangat, *decommission* belum juga terjadi. Kemudian Haass mengundurkan diri pada Desember 2003 ka-

¹³Mary-Alice C. Clancy, “An Examination of The Bush Administration and The ‘Internatiolization’ of Northern Ireland,” *Ethnopolitics Papers* 6 (2010): 3, diakses pada 17 Juni 2012, pukul 07:12, <http://www.ethnopolitics.org/ethnopolitics-papers/EPP006.pdf>.

¹⁴*Ibid.*, hal. 9

¹⁵*Ibid.*, hal. 11-12

rena bersetuju dengan Bush Jr. mengenai penyerangan ke Iraq. Dia digantikan oleh Mitchell Reiss. Mitchell Reiss tidak percaya dengan laporan Adams dan McGuinness tentang ancaman-ancaman partai unionists terhadap IRA dan semakin mendesak terlaksananya power-sharing dengan unionists. Reiss juga mendukung PSNI dan menggunakan sikap konstituen keturunan Irlandia di AS yang sudah mulai meragukan IRA untuk mendesak partai tersebut agar mendukung PSNI.¹⁶

Sikap Reiss, dan reaksi masyarakat keturunan Irlandia di AS yang semakin marah terhadap IRA akibat perampokan Northern Bank dan pembunuhan Robert McCartney, sangat mengecewakan Adams karena mereka tadinya sangat mendukung IRA. Seperti telah disebutkan sebelumnya, anggota Sinn Fein dilarang mengumpulkan dana pada perayaan St. Patrick's Day di Washington DC sebagai reaksi terhadap kedua kriminalitas tersebut. Penting untuk diketahui bahwa inilah pertama kalinya Sinn Fein dilarang menggalang dan jadi acara tersebut, dan hal ini bisa dibaca sebagai sebagai boikot finansial pertama yang dilakukan AS secara gamblang terhadap IRA sejak 9/11.¹⁷

Di tanah air pun sentiment terhadap IRA serupa. Pada pemilihan umum bulan April 2005, perolehan kursi Sinn Fein jauh dibawah target. Rupanya konstituen di Irlandia Utara juga sudah lelah dengan kampanye kekerasan dan menginginkan perdamaian. Keadaan ini tentu digunakan oleh Reiss untuk mendesak Adams agar mendukung PSNI. Akhirnya, seperti diketahui, Adams menyerahkan keputusan kepada McGuinness dan akhirnya McGuinness mengumumkan *decommission* pada akhir Juli 2005. Pengumuman McGuinness itu tidak saja menandakan *decommission* tapi juga devolusi bagi Sinn Fein.¹⁸

Meski ada motif insentif pada *decommission*, *decommission* Juli 2005 tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Clancy, hal ini karena upaya Haass dan Reiss tidak melibatkan Republik Irlandia, Irlandia Utara dan Inggris secara penuh dan

¹⁶*ibid.*, hal. 13

¹⁷*ibid.*, hal. 15

¹⁸*ibid.*, hal. 17

bersamaan. Ini adalah faktor penyebab kedua decommission tidak sepenuhnya berhasil setelah fakta bahwa unionists dan republican terus bertikai, meski ekonomi terus berjalan lancar¹⁹ (data Portland Trust bulan Mei 2007 menunjukkan angka pengangguran di Irlandia Utara hanya 3,5%, terendah dalam 32 tahun).²⁰ Bagian berikutnya akan membahas kebijakan-kebijakan perdagangan Bush Jr. berkaitan dengan proses perdamaian selama sisa periode keduanya (2006-2008).

5.2.2. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDAGANGAN BUSH JR., 2006-2008

Laporan Portland Trust bulan Mei 2007 menyatakan bahwa kebijakan perdangan merupakan kunci lobi perdamaian. Hal ini telah dibuktikan oleh dua periode pemerintahan Clinton, pertama dengan diperkenalkannya “Peace Dividend” pada 1994, yaitu keuntungan ekonomi yang didapat dari keadaan damai. Hal inilah yang memaksa para politikus nasionalis, loyalis, unionist dan republican berunding untuk mencapai perdamaian. Juga pada masa Clinton, tepatnya tahun 1996, sejumlah pengusaha di sektor swasta mendirikan The Group of Seven (juga dikenal sebagai Irish G7) yang fungsinya adalah mengupayakan situasi yang kondusif untuk investasi.²¹

Irish G7 juga terkadang harus berperan sebagai mediator politik, tentu dengan tetap mempertahankan netralitas. Salah satu cerita sukses mereka adalah meredam Drumcree March (*long march* tahunan penduduk unionist di Belfast di pemukiman-pemukiman Katolik yang biasanya berakhir dengan kerusuhan) 1996. Selain Irish G7, ada pula The Northern Ireland Growth Challenge (NIGC) yang juga didirikan oleh sebuah koalisi berbagai perusahaan swasta. NIGC bergerak dalam membagi berbagai industry dalam beberapa cluster. NIGC memiliki banyak anggota di Irlandia Utara dan Republik Irlandia, dengan harapan memperkuat potensi ekonomi kedua Irlandia. Selain kedua organisasi tersebut, ada beberapa organisasi bisnis lainnya, termasuk

¹⁹*Ibid.*, hal. 23

²⁰“Economics in Peacemaking: Lessons from Northern Ireland,” (London: Portland Trust, Ltd, 2007), 8

²¹*Ibid.*, hal. 21

yang terbentuk dari koalisi pengusaha atau perusahaan di Republik Irlandia, Irlandia Utara dan Inggris.²²

Pada Mei 2006, sebuah rapat yang dihadiri Menteri Sekretaris Negara saat itu Peter Hain, anggota parlemen dan The Northern Ireland Business Alliance (NIBA) membahas masalah-masalah internal ekonomi Irlandia Utara. Di sana terungkap bahwa meskipun ekonomi Irlandia Utara tampak tumbuh pesat selama 15 tahun terakhir, terdapat banyak implikasi menyangkut keadaan damai jangka panjang. Hal ini membahayakan mengingat sebenarnya sekitar 70% dari pendapatan nasional Irlandia Utara berasal dari sektor umum. Jika terjadi gangguan keamanan, bisa dipastikan hampir semua penduduk Irlandia akan kehilangan pekerjaan karena gangguan tersebut akan berpengaruh pada sektor umum dan sektor swasta (investasi asing.) Lagipula laju pertumbuhan ekonomi Irlandia Utara masih jauh di bawah Inggris.²³

Akhirnya memang Gerry Adams merestui pembentukan PSNI dan memerintah parlemen bersama kepala Democratic Unionist Party, partai unionist terbesar, Ian Paisley. Kesepakatan tersebut tercapai sebagai perwujudan dari St. Andrews Agreement yang dimana salah satu isinya adalah Sinn Fein harus menyetujui *power-sharing* sebelum tenggat tanggal 10 November 2006. Kemudian pada Mei 2007 Ian Paisley menjadi Menteri Pertama dan Martin McGuinness menjadi deputinya.²⁴ Seperti sudah diimplikasi di bagian sebelumnya, AS memiliki peran dalam persetujuan Sinn Fein tersebut, dan bukan tidak mungkin Adams akhirnya setuju karena pertimbangan ekonomi Irlandia Utara.

Menjelang akhir periode kedua Bush Jr, tepatnya pada 15 Februari 2007, Paula Dobriansky menggantikan Mitchell Reiss yang mengundurkan diri. Tidak banyak yang dilakukan Dobriansky karena periode kedua Bush sudah hampir habis saat dia ditunjuk menjadi Duta Khusus, tapi Dobriansky menorehkan prestasi yaitu keberhasilannya dalam membantu menggalakkan devolusi, sehingga *power-sharing* antara

²² *Ibid.*, hal. 23

²³ *Ibid.*, hal. 24

²⁴ *Ibid.*, hal 36

DUP dan Sinn Fein akhirnya terlaksana pada Mei 2007. Hal ini merupakan tugas yang berat karena permusuhan DUP dan Sinn Fein begitu mendarah daging hingga bila Paisley hadir di gedung parlemen Stormont, Adams atau McGuinness pasti tidak ada, begitu pula sebaliknya.²⁵

Sebetulnya tidak banyak yang dilakukan Bush Jr terhadap hubungan perdagangan dengan Irlandia Utara, baik dalam periode pertama maupun kedua. Hal ini disebabkan oleh ketidaktertarikan Bush Jr terhadap kawasan tersebut seperti telah disebutkan sebelumnya, dan juga karena Bush Jr, sebagaimana Obama sebagai pengganti Clinton, merasa perlu menemukan 'signature agenda' seperti 'signature agenda' Clinton adalah masalah Irlandia Utara. Kebetulan Bush Jr. tidak perlu susah payah menemukan 'signature agenda' karena 9/11 terjadi hanya beberapa bulan setelah inagurasi periode pertamanya. Jadi Bush Jr. pada dasarnya hanya menyerahkan urusan Irlandia Utara, yang secara garis besar mempertahankan kedamaian dengan menggunakan berbagai taktik ekonomi (dengan kata lain meneruskan langkah Clinton), pada Haass, Reiss dan Dobriansky.

Bush Jr. sangat jarang turun tangan langsung dalam masalah Irlandia Utara, tapi pada Mei 2008 dia tampil bersama PM Inggris Gordon Brown dan Perdana Menteri Irlandia Utara Bertie Ahern dalam sebuah konferensi investasi yang diadakan di Belfast. Acara tersebut dihadiri oleh 150 representatif 90 perusahaan multinasional, dan banyak dari perusahaan tersebut seperti JW Marriott dan Independent Media Group akhirnya berinvestasi di Irlandia Utara. Acara ini seperti salah satu semacam 'kado perpisahan' Bush pada Irlandia Utara²⁶ (penampilan terakhir Bush Jr. di Irlandia Utara adalah Juni 2008, seperti telah disebutkan di awal bab ini). Kedua penampilan terakhir ini semakin menegaskan bahwa memang tidak banyak yang dilakukannya, selain meneruskan kebijakan-kebijakan Clinton, untung saja dengan hasil yang bagus.

²⁵Paula J. Dobriansky, "How Northern Ireland Turned The Corner," *The Wall Street Journal* (2010): diakses pada 17 Juni 2012, pukul 08:00, <http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704671904575193982797989238.html>.

²⁶ *Ibid.*

5.2.3. PERAN EKONOMI OBAMA PADA PROSES PERDAMAIAN

Ketika Obama baru setahun lebih menjabat sebagai presiden AS, tepatnya pada 12 April 2010, beberapa anggota salah satu kelompok *splinter* IRA, Real IRA (RIRA), meledakkan bom pada hari pertama kebijakan devolusi berlaku. Kebijakan tersebut menetapkan bahwa pusat pemerintahan Irlandia Utara kini ada di Belfast, bukan lagi di London. Bom tersebut diledakkan di gedung perwakilan badan intelijen MI5 di Belfast. Menurut Kristen Chick dari *The Christian Science Monitor*, bom tersebut seolah menjadi symbol ketidakpercayaan rakyat Irlandia Utara pada pemindahan pusat pemerintahan dari London ke Belfast.²⁷

Tanggal 12 April juga merupakan hari dimana para anggota parlemen Irlandia Utara memilih David Ford dari Alliance Party sebagai Menteri Kehakiman. Alliance Party adalah partai yang netral terhadap warga Kristen dan Katolik, dan tidak diikutsertakan dalam power-sharing karena tidak memiliki kursi di parlemen. Sinn Fein dan DUP mendukung Ford karena kedua partai tidak mau terlalu banyak terlibat dalam urusan kehakiman yang sensitif. Tidak ada korban jiwa dalam serangan ini.²⁸

Sebetulnya sebelum pemboman ini sudah ada sebuah serangan setahun sebelumnya, yaitu pada 2009 dimana dua orang anggota militer Inggris tewas di tangan penembak misterius di Massereene. RIRA mengaku bertanggung jawab. Penembakan ini bukan satu-satunya. Menurut laporan Reuters pada April 2010, di tahun 2009 sendiri ada tujuh pengeboman yang terjadi di Irlandia Utara. Hal ini betul-betul membuktikan hasil rapat Menteri Sekretaris Negara Irlandia Utara saat itu Peter Hain dan NI-BA pada Mei 2006 bahwa meski ekonomi Irlandia Utara tumbuh pesat selama hampir 20 tahun terakhir, tidak menjamin bahwa keadaan kawasan ini benar-benar aman. Kristen Chick mewawancarai Menteri Sekretaris Negara Shaun Woodward tentang serangan-serangan menjelang peralihan kekuasaan. Menurut Woodward, IRA dan

²⁷ Kristen Chick, "Real IRA Bombing Meant to Derail Last Step of N. Ireland Peace," *The Christian Science Monitor* (2010): diakses pada 17 Juni 2012, pukul 08:14, <http://www.csmonitor.com/World/terrorism-security/2010/0412/Real-IRA-bombing-meant-to-derail-last-step-of-N.-Ireland-peace>.

²⁸ *Ibid.*

splinter group-nya tidak akan merasa nyaman dalam keadaan damai karena tidak akan ada yang mendukung pemikiran-pemikiran ekstrimis mereka.²⁹

Pemerintahan Obama mestinya menaruh perhatian pada eskalasi kekerasan ini karena bukan tidak mungkin hal seperti ‘The Troubles’ akan terjadi lagi. Jika ‘The Troubles kedua’ terjadi, Obama kemungkinan besar harus akan menghadapi berbagai tuntutan konstituen keturunan Irlandia di AS seperti Clinton dan para pendahulunya jika dia terpilih untuk periode kedua. Bagian ini akan menelaah apa saja yang sudah dilakukan Obama dalam hubungan dagang dengan Irlandia Utara dan kaitannya dengan proses perdamaian sejak dia menjadi presiden pada Januari 2009.³⁰

Sejauh ini, Obama tampak menghindari Irlandia Utara. Hal ini terlihat saat kunjungan Obama ke Republik Irlandia pada Mei 2011. Obama hanya mengunjungi Republik Irlandia, dan ketika ditanya mengapa dia melewatkan Irlandia Utara, Perdana Menteri Republik Irlandia Enda Kenny hanya menjelaskan secara protokoler Obama harus berkunjung ke London dulu sebelum masuk ke Irlandia Utara. London sendiri tidak ada dalam agenda kunjungan ini. Hal ini menyiratkan sikap Obama sama dengan presiden-presiden sebelum Clinton yang ragu-ragu merangkul Irlandia Utara karena takut mencederai hubungan dengan sahabat dan sekutu lama, Inggris.³¹

Hingga kini, 3,5 tahun menjabat Presiden, Obama belum juga mengunjungi Irlandia Utara. Ketika Deputy Menteri Pertama McGuinness melawat ke Gedung Putih pada Maret 2012 lalu, Obama mengatakan baru akan mengunjungi Irlandia Utara jika terpilih untuk periode kedua tahun 2013. Tidak dijelaskan lebih jauh mengapa Obama menunggu begitu lama untuk berkunjung ke Irlandia Utara, namun secara jelas dia mengakui adanya ‘*isolated outrages*’ dalam keadaan damai di kawasan terse-

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ “Protocol Rules Out President Obama’s NI Visit,” BBC News, diakses pada 18 Juni 2012, pukul 10:05, <http://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-12920665>.

but.³² *'Isolated outrages'* tersebut bukannya hanya ada, tapi sudah 'meledak', karena tidak saja ada tujuh serangan teroris dari IRA dan kelompok splinter-nya pada 2008 seperti sudah disebutkan, tapi ada pula setidaknya empat serangan di tahun 2010.³³

Dari fakta bahwa Obama hanya mau mengunjungi Irlandia Utara jika terpilih kembali dan nosi bahwa dia tidak tahu serangan-serangan teroris sudah kembali melanda Irlandia Utara sejak dia menjabat Presiden. Ini sangat jelas menunjukkan tingkat ketidaktertarikan Obama terhadap Irlandia Utara lebih parah dari Bush Jr. Memang tidak lama sebelum Obama memasuki Gedung Putih, krisis global mulai melanda dunia dan AS termasuk yang terkena dampak parah hingga Obama berfokus pada pemulihan ekonomi dunia terutama perekonomian AS. Mungkin Obama merasa bisa menyerahkan urusan Irlandia Utara ke Duta Khusus Declan Kelly dan Menteri Luar Negeri Hilary Clinton, yang suaminya masih aktif mengurus investasi di Irlandia Utara lewat wadah Teneo Holdings, sebuah badan konsultasi investasi global.³⁴

Berbagai serangan teroris yang terjadi pada 2009 dan 2010 tersebut tidak disebabkan oleh melemahnya ekonomi di Irlandia Utara. Declan Kelly aktif di Invest Northern Ireland yang setiap tahun mengundang para investor AS untuk menanam modal di Irlandia Utara, dan agak berbeda dengan para pendahulunya, Kelly juga aktif melobi pemerintah Inggris agar mensubkontrakkan proyek-proyek yang mereka dapat ke Irlandia Utara. Kelly kemudian mengundurkan diri dan bergabung dengan Bill Clinton di Teneo Holdings, dan hingga saat ini Obama belum mengumumkan penggantinya. Obama mungkin sudah cukup puas dengan kehadiran Kelly dan Clinton sebagai 'Duta Khusus tidak resmi' yang menjaga keadaan Irlandia Utara tetap aman

³² Kerry O'Shea, "President Obama Will Visit Northern Ireland If Re-elected, Says First Minister," *Irish Central* (2012): diakses pada 18 Juni 2012, pukul 10:23, <http://www.irishcentral.com/news/President-Barack-Obama-will-visit-Northern-Ireland-if-re-elected-says-First-Minister-143797186.html>.

³³ Barbara Lewis and Ian Graham, "Timeline – Increased Dissident Attack in Northern Ireland," *Reuters* (2010): diakses pada 18 Juni 2012, pukul 10:40, <http://uk.reuters.com/article/2010/04/08/uk-irish-dissidents-idUKTRE6372WO20100408>.

³⁴ "Bill Clinton to Advise Financial Firm Run by Longtime Associates Doug Band, Declan Kelly," *The Huffington Post* (2011), diakses pada 18 Juni 2012, pukul 10:55, http://www.huffingtonpost.com/2011/11/14/bill-clinton-financial-firm-doug-band-declan-kelly-hedge-fund_n_1088203.html, diakses pada 18 Juni 2012

agar investasi tetap lancar, sehingga memenuhi kepentingan dagang AS.³⁵ Hal ini ditambah pula dengan kegiatan Hilary Clinton mempromosikan ‘Your Time, Our Place’, yaitu aktivitas promosi pariwisata Irlandia Utara dalam ‘Visit Northern Ireland 2012.’ Program ‘Your Time, Our Place’ termasuk antara lain ‘Titanic Centenary’ dan ‘Irish Open’. Hilary Clinton tidak akan ikut mengkampanyekan ‘Visit Northern Ireland 2012’ bersama Menteri Pertama Peter Robinson dan McGuinness jika dia tidak betul-betul yakin Irlandia Utara aman.³⁶

Mengingat kunjungan Bush Jr. yang diwarnai kerusuhan, kunjungan Bill Clinton yang disambut dingin dan serangan demi serangan yang terjadi pada 2009 dan 2010 di masa Obama, membersitkan pertanyaan apa yang sesungguhnya terjadi. Pada masa ketiga Presiden ini ekonomi Irlandia Utara tumbuh dengan baik dan menurut teori liberalism, bukankah rakyat yang kenyang tidak akan merongrong pemerintah? Bukankah sejak naiknya Bill Clinton, tidak saja ekonomi Irlandia mengalami kemajuan tapi diskriminasi juga turun drastic? Ternyata ada satu faktor yang dilupakan Clinton, Bush Jr dan Obama yaitu “peran korban.” Menurut “Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement” yang diedit oleh Tore Bjorgo dan John Horgan, kekerasan tidak akan pernah berhasil diredam jika pemimpin tidak mendengar suara para korban.

5.3. YANG SERING TERLUPAKAN: SUARA KORBAN

Bagian “Leaving Terrorism Behind in Northern Ireland and Basque Country: Reassessing Anti Terrorist Policies and The ‘Peace Process’ yang ditulis Rogelio Alonso di buku “Leaving Terrorism Behind” dibuka oleh wawancara dengan Michael Gallagher, ayah seorang pemuda 21 tahun bernama Aidan Gallagher yang tewas akibat bom mobil di Omagh, Irlandia Utara, pada 15 Agustus 1998. Bom tersebut ditanam oleh RIRA. Wawancara tersebut bertanggal 18 November 2005, 15 tahun setelah

³⁵ Jim Fitzpatrick, “How Declan Kelly Helped Bring US Investments to NI,” *BBC News* (2011): diakses pada 18 Juni 2012, pukul 11:00, <http://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-13359794>.

³⁶ “NI Leaders Meet President Obama,” UTV, diakses pada 18 Juni 2012, pukul 11:15, <http://www.u.tv/News/NI-leaders-meet-Clinton-in-US/2912f477-320a-4597-ae92-52b3ff9b59e9>.

Bill Clinton menjadi Presiden AS dan menggalakkan berbagai investasi di Irlandia Utara sebagai tonggak proses perdamaian dan kurang dari empat bulan setelah IRA mengumumkan *decommission*. Dalam wawancara, Michael mengatakan, “*In the case of Northern Ireland, the victims are not consulted. This is a serious mistake, because if we want to achieve a firm place in peace it is essential for victims to have a voice in the process.*”³⁷

Memang banyak pendapat yang mengatakan mengabaikan suara korban berdampak kontraproduktif pada ‘proses perdamaian’. Tentu saja apa yang diinginkan para korban adalah keadilan dan keadilan termasuk hukuman yang setimpal terhadap para pelaku dan *mastermind*. Sayangnya, ‘proses perdamaian’ seringkali mengabaikan hal ini karena dianggap mengaburkan dari tujuan yang ingin dicapai (*distraction*). Dalam konteks Irlandia Utara, para pelaku ‘proses perdamaian’ menginginkan ‘masyarakat yang tidak melupakan masa lalu tapi belajar dari masa lalu untuk membentuk masa depan yang lebih baik.’ Yang menjadi masalah, dalam budaya Irlandia Utara definisi ‘korban’ masih menimbulkan kontroversi, jadi mereka hanya dikenang, sebagai pengingat tanpa benar-benar diurus kebutuhannya.³⁸

Mark Durkan, mantan Ketua Social Democratic and Labour Party (SDLP), mengatakan bahwa korban ‘The Troubles’ dijanjikan banyak hal dalam The Good Friday Agreement 1998, tapi tidak ada satu pun janji tersebut yang dipenuhi. Salah hak tersebut adalah hak korban atau keluarga korban untuk memantau secara detail investigasi suatu kematian atau insiden, meminta investigasi kembali atau menutup kasus. Pernyataan Mark ini mengundang reaksi beberapa petinggi PSNI seperti Nuala O’Loan dan Hugh Orde, yang mengatakan tidak mungkin membuka atau membuka kembali beberapa kasus tertentu yang sensitif. Orde bahkan menyatakan tugasnya bukan ‘menginvestigasi sejarah’ melainkan ‘mempolisikan masa sekarang’. Dia juga menyatakan beberapa kasus diputuskan untuk segera ditutup tanpa disidang-

³⁷ Rogelio Alonso “Leaving Terrorism Behind in Northern Ireland and Basque Ireland,” in *Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement*, eds. Tore Bjorgo and John Horgan, (Oxon: Routledge 2009) , 90

³⁸ *Ibid.*, hal 91

kan. Kedua pernyataan Orde tersebut tentu saja menyiratkan hak korban yang dilanggar aparat penegak hukum, yaitu hak untuk mendapatkan kejelasan setera-terangnya mengenai sebuah kasus.³⁹

Alonso juga menyebutkan ‘proses perdamaian’ di Irlandia Utara mengabaikan fakta bahwa pemerintah Inggris dan Republik Irlandia mengambil keuntungan dari terorisme. Salah satu keuntungan tersebut adalah prasyarat yang diberikan pihak mana saja untuk mengakhiri kekerasan. Alonso menganalogikan prasyarat tersebut dan pemenuhannya sebagai seperti memberikan seorang anak kecil manja apapun yang dimintanya dengan harapan dia tidak manja lagi.⁴⁰ Salah satu contoh paling mudah dari ini adalah investasi besar-besaran yang dilakukan pemerintahan Bill Clinton dalam konteks menciptakan perdamaian. Untuk berinvestasi tentulah investor harus mendapatkan izin dari pemerintah Inggris. Setelah bisnis mulai berjalan, perusahaan-perusahaan yang berbasis di Irlandia Utara itu menyerap tenaga kerja tidak hanya dari Inggris dan Irlandia Utara saja, tapi juga Republik Irlandia. Jadilah semua pihak (AS, Irlandia Utara, Inggris dan Republik Irlandia) menikmati dampak finansial positif dari terorisme, dan tidak ada yang peduli pada trauma yang dialami para korban. Jika Irlandia Utara selalu damai, mungkin tidak akan ada yang mengetahui bagian kecil dari Inggris atau Republik Irlandia tersebut hingga tidak ada yang mau berinvestasi.

Kemudian Alonso menyebut adanya redefinisi nilai-nilai social dalam perjuangan kaum republican. Menurutnya, redefinisi itu terjadi karena Inggris dan Republik Irlandia selalu memojokkan Sinn Fein agar sedikit demi sedikit IRA menurunkan kekerasan.⁴¹ Akibatnya adalah Sinn Fein berjuang mendapatkan legitimasi dengan berbagai cara, termasuk mengambil simpati kaum republican militant lewat kekerasan yang terus dilakukan IRA dan splinter group-nya. Akhirnya memang Sinn Fein menjadi partai besar dengan *power-sharing* bersama partai unionists dan IRA men-

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hal 96

⁴¹ *Ibid.*, hal 98

gumumkan *decommission*, tapi tidak ada yang ingat dengan korban yang jatuh dalam proses Sinn Fein menjadi partai besar dan IRA melucuti senjatanya.

5.3.1. 'MENGKORBANKAN' KORBAN MELALUI MEDIA

Semua pihak yang terlibat dalam 'proses perdamaian' atau pemulihan dari serangan teroris menggunakan media untuk kepentingannya (instrumentalisasi media). Kata-kata seperti 'perdamaian', 'dialog' atau 'perundingan' digunakan begitu sering dan tidak jarang dibuat meleset jauh dari arti sebenarnya demi menggapai legitimasi.

Gerry Adams termasuk yang sukses menggunakan instrumentalisasi media, yang mengantarkannya dari seorang mastermind terorisme menjadi salah satu tokoh paling dipuja. PIRA juga menggunakan instrumentalisasi media dalam mendefinisikan perjuangannya. Begitu hebatnya kemampuan Gerry Adams dan PIRA dalam instrumentalisasi media hingga mantan Perdana Menteri Irlandia Garrett Fitzgerald mengatakan, "*Their propaganda system is very focused. 'We are the peace party.' If you murder enough people and then you stop, you become the peace party.*"⁴²

Adams juga berusaha menciptakan citra bagus untuk mencapai anak-anak remaja dan orang muda kelas menengah atas yang berpendidikan. Dia sering tampil di sampul muka majalah gaya hidup dimana dia tidak pernah diwawancara tentang Sinn Fein dan IRA, tapi tentang tempat liburan favoritnya. Propaganda seperti ini sangat penting dalam proses perdamaian. Menurut praktisi media Irlandia alm. Fred Halliday seperti dikutip Alonso, citra baru Gerry Adams tersebut membuatnya terlihat tidak menakutkan ketika meluncurkan autobiografi bahkan memberi masukan bagi group-group paramiliter lain seperti Euskadi Ta Askatasuna (ETA) dari Basque Country, Spanyol, tentang proses perdamaian. Dengan citra seperti itu, anak-anak muda tidak akan ada yang menyangka Adams adalah otak dari berbagai penculikan, pembunuhan dan pengeboman yang terjadi tidak hanya di Republik Irlandia, Irlandia Utara dan

⁴² *Ibid.*, hal 99

Inggris saja tapi juga di luar negeri yang masih koloni Inggris. Kemampuan instrumentalisasi media seperti ini yang tidak dimiliki pemimpin-pemimpin partai lain seperti John Hume dan Seamus Mallon dari SDLP.⁴³

Dalam konteks Irlandia Utara, pencitraan seperti itu wajib dilakukan karena pelaku terorisme bukan hanya IRA tapi juga kaum unionist. Tapi, menurut Alonso, meskipun Adams jauh lebih menguasai media daripada lawan-lawan unionist-nya, tidak berarti dia mendapat legitimasi lebih dari rakyat Irlandia Utara. Ini adalah satu yang mendorong Sinn Fein dan DUP berkoalisi. Dan mereka hanya berkoalisi, tidak benar-benar menghilang atau dibubarkan sehingga tidak menutup kemungkinan kedua partai besar yang sebenarnya selalu bertikai ini akan menempuh cara-cara koersif lagi. Demikianlah pencitraan seperti yang dilakukan Gerry Adams cukup berperan dalam ‘proses perdamaian’ dengan membuat generasi muda tidak akrab dengan apa yang siapa dia sebenarnya, sehingga legitimasi lebih mudah tercapai.⁴⁴

Propaganda cara Adams juga bisa dilihat sebagai bentuk ‘*victimizing victims*’, karena mengaburkan focus dari seorang dengan tangan berlumuran darah warga sipil tidak berdosa menjadi seorang politikus cerdas, modis dan disukai kaum muda. Dengan kata lain, citra seperti ini mengalihkan perhatian dari para korbannya dan perjuangan mereka mencari keadilan.

Cara lain ‘mengkorbankan korban’ yang lebih ekstrim secara politis dalam kasus Irlandia Utara adalah dengan membuat mereka terlihat tidak penting. Seringkali korban dikesampingkan atau sengaja dilupakan agar tidak mengganggu ‘proses perdamaian’. Pemerintah atau media (atau keduanya) lebih focus kepada teroris yang ber-rehabilitasi, baik dengan cara pencitraan seperti yang dilakukan Gerry Adams atau cara yang lebih konkrit seperti *decommission* IRA. Pemerintah dan media akan mengamati dengan cermat segala langkah yang ditempuh organisasi terorisme dalam mencapai perdamaian. Tidak jarang pemerintah membantu dengan misalnya memberi

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hal 101

vonis ringan pada pelaku serangan terorisme. Jika rehabilitasi dirasa sudah genap, kelompok teroris tersebut akan diberi *reward* misalnya dengan posisi di parlemen, dan jika ada korban yang meminta kasusnya dibuka kembali, dia akan dikriminalisasi, dituduh tidak kooperatif.⁴⁵ Cara seperti ini sama saja dengan memberi anak kecil yang manja apapun yang mereka minta dengan harapan mereka akan tidak manja.

Marjinalisasi korban juga bisa melalui mediator. Menurut mantan Ketua The Liberal Party of Canada, Michael Ignatiff, seperti dikutip Alonso, seorang mediator perdamaian berdefinisi, “*Impartial without being fair. It is not their task to make moral distinctions between aggressor and victims. Peacemakers also, by their presence on the demarcation line, effectively ratify the conquests of the aggressors and impede attempts by victims to recapture lost ground.*” Seorang mediator biasanya adalah pihak ketiga atau pihak asing yang dipilih karena netralitas. Netralitas itu biasanya disebabkan oleh ketidakdekatan secara emosional, dan ketidakdekatan emosional ini terjadi karena pihak ketiga atau asing tersebut tidak mengenal dengan baik kedua pihak yang berseteru. Karena tidak mengenal dengan baik, tidak cuma netralitas yang didapat tapi juga kurangnya pengetahuan dan generalisasi terhadap kedua pihak yang fatal. Generalisasi dan faktor lain seperti pertimbangan logika dan moral si mediator akan berdampak korban yang sesungguhnya terkesampingkan.

Dalam hubungan Irlandia Utara, Republik Irlandia, Inggris dan AS, yang menjadi mediator tentu adalah AS. Dukungan AS yang bergerak dari lobi masyarakat keturunan Irlandia itu memang didasari oleh tradisi mendukung sanak saudara di tanah leluhur seperti pada masa eksodus The Great Potato Famine, tapi hal ini lebih banyak dikarenakan bayangan yang romantis masyarakat mayoritas AS tersebut tentang negeri leluhur yang belum pernah dikunjungi.⁴⁶ Ketika akhirnya Bill Clinton memenuhi permintaan konstituen tersebut yang sudah melobi para pendahulunya selama bertahun-tahun, yang dipilih adalah cara investasi. Mungkin dasar Clinton me-

⁴⁵ *Ibid.*, hal 101-102

⁴⁶ Lee Daly, “Northern Ireland and The American Connection,” *Global Affairs* (2008): diakses pada 17 Juni 2012, pukul 13:07, <http://www.globalaffairs.es/en/northern-ireland-and-the-american-connection>.

milih cara ini adalah karena dia tidak memiliki pengalaman tumbuh besar di tengah serangan teroris di Irlandia Utara, jadi dia khawatir malah akan mengacaukan proses perdamaian jika memilih cara lain. Dan meskipun berhasil secara kasat mata, cara ekonomi ini tidak meng-address akar sebenarnya dari masalah Irlandia Utara. Permusuhan warga Katolik dan Protestan sudah mendarahdaging bahkan sebelum imigrasi besar-besaran ke AS untuk menghindari kelaparan dan wabah penyakit pada 1845.

Campur tangan politik yang sangat minim dari Duta Khusus juga membuat kebutuhan korban dan/atau keluarganya akan keadilan tidak terpenuhi. Bill Clinton dan para penggantinya tidak pernah mengajukan Adams, McGuinness dan petinggi IRA lainnya ke mahkamah internasional. Malah mereka diberi visa kunjungan ke AS, dijamu di Gedung Putih, bahkan dibiarkan mencari dana baik secara langsung maupun melalui organisasi-organisasi seperti Noraid. Sementara keluarga korban seperti Michael Gallagher tidak pernah melihat pembunuh anak dan adiknya ditangkap dan diganjar hukuman setimpal.

Upaya Bill Clinton sebetulnya perlu diapresiasi karena setidaknya berusaha mencegah agar tidak ada korban lagi yang jatuh karena terorisme. Tendensi tidak tertarik mengurus Irlandia Utara dapat dilihat dengan mudah dari Bush Jr. dan Obama. Hal ini masuk akal, karena saat Bush Jr. menjabat Presiden dunia dilanda trauma 9/11 dan saat Obama naik dunia panic akibat krisis global, sehingga kedua Presiden memilih focus pada isu-isu tersebut. Namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bila Irlandia Utara diabaikan (dalam arti Presiden AS berikutnya hanya memantau kelancaran investasi di kawasan itu) 'The Troubles' kedua akan terjadi. Kemungkinan besar akan lebih parah dari 'The Troubles' yang berakhir pada 1998 dan pekerjaan Presiden selanjutnya akan bertambah berat.

5.4. NOSI ETNISITAS DAN KESIMPULAN

Serangan-serangan teroris di Irlandia Utara oleh IRA dan grup pecahannya pada 2009 dan 2010 tampaknya tidak membawa *shock* yang signifikan bagi rakyat AS

pada umumnya. Generasi tua masyarakat keturunan Irlandia yang mendukung Partai Republik bahkan kemungkinan mengetahui serangan-serangan tersebut akan terjadi, paham betul latar belakang serangan dan menganggapnya normal karena bagian perjuangan melepaskan diri dari Inggris. Mereka juga mungkin setuju bahwa teroris IRA harus dibedakan dari teroris Al-Qaeda, seperti desakan pengurus organisasi-organisasi keturunan Irlandia di AS dan beberapa pejabat IRA, hanya karena para teroris IRA tidak menyerang dengan bom bunuh diri. Maka dari itu, tidaklah benar-benar mengejutkan bila Peter King sebagai anggota Kongres dari Partai Republik secara terang-terangan mendukung IRA dan tetap melaksanakan sidang radikalisasi warga Muslim meskipun sudah ditentang banyak pihak.

Seperti telah begitu sering dibahas dalam thesis ini, masyarakat keturunan Irlandia merupakan konstituen yang telah menjadi mayoritas di empat negara bagian sejak 1851. Sebab itu apapun yang orang-orang ini lakukan akan terlihat normal, termasuk mendukung IRA yang mereka anggap sedang berjuang melawan Inggris tidak peduli para anggota IRA membunuh banyak rakyat sipil tidak berdosa secara *indiscriminate*. Orang-orang ini jugalah yang menyumbang untuk Sinn Fein yang beberapa anggotanya datang ke AS untuk menggalang dana pada acara St. Patrick's Day. Mereka juga yang menonton musisi-musisi Irlandia terkenal seperti The Corrs yang menggelar konser di AS untuk mengumpulkan sumbangan bagi Irlandia Utara. Mereka tidak tahu apakah dana tersebut benar untuk kemanusiaan seperti pendidikan atau digunakan untuk serangan-serangan teroris, dan mereka tidak peduli.

Adalah juga normal jika organisasi-organisasi Islam dibubarkan, para penguasanya ditangkap dan aset-aset mereka dibekukan. Normal pula bila orang-orang berjilbab dan berkopiah menimbulkan paranoid sedemikian besar bagi kebanyakan warga AS yang kaukasia dan Protestan atau Katolik. Nosi etnisitas atau rasisme sudah ada sekian lama, dan bahkan sesama etnis saja meskipun berbeda bangsa bisa menimbulkan nosi etnisitas, seperti telah dibahas pada bab pertama. Serangan 9/11 hanya mengeskalasi nosi etnisitas, dan targetnya secara spesifik adalah warga Muslim, tidak peduli apapun etnisnya.

Hasil paparan bab ini bisa dengan mudah disimpulkan sebagai produk nosi etnisitas lagi, meskipun dengan implikasi larangan Bush Jr. pada Sinn Fein untuk menggalang dana pada St. Patrick's Day 2005. Namun jika diperhatikan lebih lanjut, nosi etnisitas kurang tepat dianggap sebagai dasar peran AS dalam proses perdamaian Irlandia Utara dengan *platform* perdagangan bebas.

Pertama, adanya kekuatan lobby dari konstituen keturunan Irlandia di AS yang untuk pertama kalinya tidak setuju dengan IRA yang terus berjibaku dengan unionist hingga jatuh banyak korban. Lobby ini kemudian mendorong pemerintah AS agar lebih keras menyerukan pelucutan senjata IRA. IRA pun lambat laun menuruti desakan AS ini. Kemudian ada pula para Duta Khusus untuk Irlandia Utara yang sebenarnya tidak terlalu tertarik pada kawasan ini atau tertarik hanya dari sisi ekonomi saja (sebenarnya tugas Duta Khusus lebih meliputi mengawasi investasi daripada politik). Tidak diketahui apakah mereka sadar batas tugas yang dibebankan pada mereka dari pemerintah AS tidak akan benar-benar memperbaiki Irlandia Utara, karena mereka semua (dari George Mitchell hingga Declan Kelly) berpendapat dengan keberhasilan ekonomi, Irlandia Utara dapat menjadi panutan bagi kawasan-kawasan yang ingin menerapkan proses perdamaian dari kelompok teroris seperti Basque Country dan Kolombia.

Terakhir, sikap Obama yang jelas terlihat tidak peduli, baik dari penolakannya mengunjungi Irlandia Utara maupun dari ketidaktahuannya bahwa berbagai serangan teroris telah meledak lagi di kawasan yang dulu merupakan kawasan industry sebelum Perang Kemerdekaan Irlandia 1919 sejak dia disumpah sebagai Presiden AS ke-43. Entah mengapa penulis melihat sikap Obama ini hampir mirip dengan sikap tidak peduli Bill Clinton terhadap Rwanda. Memang Obama akan tetap memastikan perekonomian Irlandia Utara berjalan lancar lewat Kelly dan Bill Clinton sebagai Duta Khusus tidak resmi, tapi hal ini mungkin dilakukannya sekadar untuk menyenangkan warga keturunan Irlandia dan menghindari 'The Troubles kedua' terjadi lebih cepat dari perkiraan.

Sebagai kesimpulan, dari perspektif deradikalisasi, tentu saja proses perdamaian di Irlandia Utara ini tidak menyentuh akar rumput. Jika dianalogikan, perlakuan AS terhadap Irlandia Utara seperti orang tua yang sekadar memberi nafkah anaknya secara fisik tapi tidak memberinya nafkah secara batin. Taraf hidup warga Irlandia Utara tidak akan turun, namun “api dalam sekam” yaitu permusuhan unionist dan republican, pro Inggris dan anti Inggris, Katolik dan Protestan akan terus berjalan hingga mencapai titik nadir dan akan jauh mengalahkan terorisme Al-Qaeda, jika pemerintah AS tetap mengabaikan akar konflik dan keadilan bagi korban.



BAB VI

RAS DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI: SEBUAH KESIMPULAN

Sejak terciptanya Dunia Baru, rasisme atau nosi etnisitas telah menjadi bagian yang tidak terelakkan dalam diplomasi. Meskipun ada faktor lain dalam masa-masa awal dunia baru yakni rasa nasionalisme dalam perluasan wilayah kekuasaan, yang oleh Chomsky diterjemahkan sebagai manifestasi keinginan untuk bertahan lalu meningkat menjadi keinginan untuk mendominasi, nosi etnisitas tetap menjadi faktor utama. Nosi etnisitas dalam sejarah AS disebut sebagai manifesto takdir (*manifest destiny*). Istilah tersebut pertama kali digunakan pada tahun 1845 oleh John O'Sullivan untuk mendukung aneksasi Presiden James Polk atas Texas dan Oregon County dari orang Meksiko dan Indian.¹ Manifesto takdir juga didukung oleh sebuah bagian dari Alkitab yang mengatakan bahwa orang-orang kulit hitam adalah keturunan Ham, putra Nabi Nuh yang dihukum Tuhan karena melihat ayahnya dalam keadaan telanjang. Karena itu, orang-orang kulit hitam ini dikutuk hingga anak cucunya menjadi budak. Manifesto takdir dikenal pula sebagai idealisme Victoria (*Victorian ideal*) yang intinya adalah putih itu suci dan bersih, sedangkan hitam merepresentasikan kotoran dan dosa (karena itu benua Afrika disebut juga benua gelap (*the dark continent*) yang tidak hanya menggambarkan masyarakatnya yang berkulit hitam tapi juga bodoh dan tidak sadar melakukan dosa).

Di awal abad ke-20, kita mengenal *white man's burden* yang pada dasarnya adalah orang-orang kulit putih yang merasa harus membawa orang-orang kulit berwarna pada peradaban, yaitu dengan memperkenalkan (bahkan memaksakan) cara hidup kulit putih. Dan pada dekade kedua abad ke-20, Presiden Woodrow Wilson, penggagas *League of Nations* yang kelak menjadi PBB, terkenal melakukan apa nantinya dikenal sebagai *Wilsonian Philosophy*, yakni penggunaan kekerasan dalam kebijakan-kebijakannya asal bertujuan baik.

¹John Snetsinger. "Race and Ethnicity" in *Encyclopedia of American Policy (Second Edition)*, ed. Louise B. Ketz, (New York: Charles Scribner & Sons Ltd, 2002), 299

Rasisme dapat ditemui dalam beberapa koloni AS seperti Haiti di Amerika Tengah. Menurut Snetsinger (2002), apa yang terjadi di Haiti dari 1915 hingga 1934 merupakan gabungan dari *white man's burden*, strategi politik dan rasisme murni. Di Haiti, penduduk asli dimasukkan kamp kerja paksa, dipukul, diteror lalu dipenjara tanpa pengadilan. Pada 1919, Angkatan Laut AS membunuh 2000 pekerja dari kalangan penduduk asli. Yang terjadi setelah itu adalah segregasi, dan penguasa AS memberi perlakuan lebih baik untuk mulatto, yakni keturunan campuran penduduk asli dan kulit putih, daripada orang asli Haiti. Untuk menjelaskan perlakuan terhadap penduduk asli Haiti ini, Menteri Luar Negeri Robert Lansing mengatakan, "*The African race had an inherent tendency to revert to savagery and to cast aside the shackles of civilization which are irksome to their physical nature. Of course there are many exceptions to this racial weakness, but it is true of the mass as we know from experience in Haiti.*" Di sini yang kita lihat adalah gabungan dari rasisme, *white man's burden* dan *Wilsonian Philosophy*.²

Rasisme terus menjadi elemen penting dalam berbagai kebijakan luar negeri AS setelah Perang Dunia I. Selain Haiti, pada masa Perang Dunia II kita bisa menelaah perlakuan AS terhadap Jepang. Setelah serangan Jepang ke Pearl Harbor, Hawaii, pada 7 Desember 1941 para warga keturunan Jepang yang telah lama tinggal di AS dan bahkan lahir di sana dianggap orang asing setelah tidak diberikan kewarganegaraan. Mereka bahkan ditempatkan di kamp konsentrasi karena dianggap memihak Jepang. Anggapan tersebut tidak pudar bahkan setelah mereka menawarkan diri berperang membela AS dan sampai menawarkan membentuk unit pasukan berani mati (semacam kamikaze) untuk AS.³

Di dalam negeri, setelah Perang Dunia II tentara non-Kaukasiayang pulang dengan selamat memang dihadaahi medali kepahlawanan, tapi mereka tidak bisa pergi ke tempat-tempat tertentu karena segregasi. Kebijakan AS (dalam hal ini

² *Ibid.*, hal 300

³ *Ibid.*

dalam negeri) setelah Perang Dunia II memang berubah, namun elemen rasisme tetap ada.⁴

Lepas Perang Dunia II, negara-negara Eropa yang dulu dikenal kuat dengan koloni-koloni yang tersebar di berbagai penjuru dunia tidak lagi kuat. Negara-negara non Kaukasia, terutama di Asia, merdeka. Para pemimpin negara-negara yang baru merdeka itu tidak mau berkiprah di dalam negeri saja. Mereka juga mau unjuk gigi di hadapan masyarakat internasional. AS sebagai kekuatan tunggal di dunia se usai Perang Dunia I berusaha melepaskan citra rasis yang identik dengan kekuatan colonial Eropa di masa lalu.⁵

Namun yang telah dibuktikan dalam thesis ini menunjukkan sebaliknya. AS tetap berpegang pada rasisme, atau dengan kata lain mempertahankan *white supremacy*. Pada bab pertama telah diajukan empat hipotesa. Keempat hipotesa tersebut adalah (1) AS akan ditinggalkan konstituen keturunan Irlandia yang merupakan mayoritas apabila AS memberi sanksi pada Irlandia Utara, (2) Sikap AS lebih lunak terhadap IRA atau pelanggaran HAM apa saja yang dilakukan negara kulit putih karena adanya *voluntary pluralism* (3) Selain rasisme, AS bersikap pilih kasih terhadap IRA meskipun IRA juga kelompok teroris seperti Al-Qaeda karena rasa persaudaraan yang kuat antara mayoritas kulit putih AS yang keturunan Irlandia dengan rakyat Irlandia Utara, dan (4) Perlakuan AS terhadap apapun yang berkulit putih, tidak hanya terorisme, adalah lebih baik dan hal tersebut tidak disebabkan oleh perdagangan bebas atau kepentingan lainnya, melainkan murni rasisme. Hipotesa yang terakhir ini adalah perlawanan dari teori Noam Chomsky yang mengatakan negara-negara saling menaklukan karena adanya keinginan untuk mendominasi, sebagai bentuk lebih lanjut dari keinginan untuk mempertahankan jenis. Teori tersebut didasari oleh teori biologi kontemporer Ernst Mayr yang menyatakan bahwa manusia bisa bertahan lebih lama dari spesies lainnya di jagat raya bukan karena seleksi alam, melainkan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi yang memungkinkan untuk melakukan berbagai cara untuk bertahan.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Pada bab kedua dipaparkan bahwa semasa Perang Dingin, satu-satunya negara Eropa yang diberi berbagai sanksi oleh AS adalah Rusia yang merupakan semacam kepala Blok Timur yang terdiri negara-negara komunis sosialis, melawan AS sebagai pemimpin negara-negara demokrasi kapitalis. Negara-negara pengikut Rusia seperti Polandia dan Ukraina tidak diberikan sanksi yang berarti. Sedangkan negara-negara Asia yang terlibat dalam Perang Dingin seperti Korea, Vietnam dan Cina justru dikenakan sanksi yang terangkum dalam *Trading with The Enemy Act 1950* dan berbagai sanksi lainnya yang berlanjut hingga Perang Dingin berakhir pada 1991. Hal ini tentu tidak adil, mengingat tidak ada alasan rasial yang menjadi penyebab Perang Dingin, pun keterlibatan Korea, Jepang dan Vietnam tidak disebabkan oleh alasan rasial.

Di luar konteks Perang Dingin, AS melakukan *state-sponsored terrorism* di beberapa lama negara di Amerika Selatan dan Amerika Tengah yang lemah, seperti Panama dan Dominika. *State-sponsored terrorism* itu sengaja dilakukan agar negara-negara tersebut menganut demokrasi yang nantinya akan mengakomodir segala kepentingan AS. Dan contoh *state-sponsored terrorism* AS tidak akan lengkap tanpa menyebut Israel yang selalu menyerang Palestina dengan dukungan AS. Dilihat dari *state-sponsored terrorism* ini, AS memenuhi kriteria negara jahat yang dirangkum dalam *National Security Strategy* meskipun secara tidak langsung karena AS mendanai serangan-serangan terorisme di negara-negara yang disebut di atas dari jauh, dan dengan demikian presiden-presiden AS seperti Bush Jr. dapat diajukan ke Mahkamah Internasional. Namun hal ini tidak pernah terjadi, bertentangan dengan apa yang terjadi menjelang persidangan trio pelaku bom Bali I, dimana AS ribut ketiga teroris ini segera diadilli.

Juga diluar konteks Perang Dingin, AS terkenal banyak memberikan sanksi pada negara-negara yang melakukan pelanggaran HAM. Negara-negara tersebut biasanya adalah negara non Kaukasia. Bab kedua membandingkan perlakuan AS di Myanmar dan Hungaria, dimana banyak terjadi pelanggaran HAM. AS memberikan berbagai sanksi, diantaranya pembekuan akses para pejabat junta di luar negeri dan penolakan ekspor Myanmar. Sementara di

Hungaria, satu-satunya sanksi adalah embargo senjata. Pemberian berbagai sanksi di negara-negara non-Kaukasia, baik di dalam atau di luar konteks Perang Dingin, dan standar ganda dalam *state-sponsored terrorism* membuktikan kebenaran hipotesa kedua, yakni AS lebih lunak terhadap IRA atau pelanggaran HAM apapun yang dilakukan negara-negara Kaukasia karena adanya *voluntary pluralism* dalam masyarakat kulit putih di dunia. *Voluntary pluralism* adalah keadaan dimana semua orang merasa sebagai bagian dari *civic culture* (kebudayaan warga), dimana mereka rela berpartisipasi dalam kebudayaan negara tempat tinggal, namun tidak merasa terancam dalam melakukan budaya negara nenek moyang mereka. *Voluntary pluralism* mudah terjadi pada orang-orang kulit putih, diantaranya karena mereka mempercayai bagian Kejadian dari Alkitab yang mengatakan orang kulit hitam adalah keturunan Ham yang dihukum Tuhan, serta rakyat dari negara yang kalah diperbolehkan diperbudak (yang ini adalah warisan budaya kolonialis Eropa).

Bab ketiga mensejajarkan nosi etnisitas dengan perdagangan bebas, karena adanya argumen bahwa AS membantu IRA lebih karena alasan perdagangan bebas daripada rasisme. Clinton, berbeda dengan Bush Jr. yang secara reaktif menjadikan terorisme sebagai agenda utama karena 9/11 dan melancarkan GWOT, memilih sendiri konflik Irlandia Utara sebagai agenda utama. Di Irlandia Utara, Clinton mengundang banyak pengusaha AS dan Eropa untuk berinvestasi dengan dalih mengupayakan perbaikan ekonomi di Irlandia Utara agar tercipta perdamaian. Dalam investasi tersebut (yang dilakukan Clinton sebagai salah satu upaya memajukan perekonomian dalam negeri), Clinton berupaya menyenangkan partai sayap politik IRA, Sinn Fein, dengan harapan Sinn Fein akan menjinakkan IRA. Upaya menyenangkan Sinn Fein itu termasuk membiarkan Gerry Adams, ketua Sinn Fein, membuka kantor perwakilan di Washington. Di sini sangat besar kemungkinan Sinn Fein menggalang dana untuk IRA dari masyarakat AS melalui kantor IRA di Washington itu. Dalam bab ketiga juga ada perbandingan perlakuan Clinton terhadap Rwanda yang pada saat kepresidenannya terjadi *state-sponsored terrorism* oleh pemerintahan yang didominasi suku Hutu terhadap suku Tutsi. Clinton membiarkan saja itu terjadi, salah satunya dengan tidak mengakui apa yang terjadi di Rwanda adalah genosida, agar AS tidak perlu bertanggung jawab

pada PBB. Alasan Clinton adalah bahwa jangankan untuk berinvestasi di Rwanda, untuk memelihara tentara penjaga perdamaian PBB untuk Rwanda UNAMIR sudah memakan banyak biaya. Jadi sekalipun benar ada pertimbangan ekonomi dalam kebijakan luar negeri Clinton berinvestasi secara ekonomi dan kemanusiaan di Irlandia Utara (diantaranya adalah karena pasar Irlandia Utara tidak jauh berbeda dengan AS), membiarkan rakyat Rwanda yang dilanda konflik yang lebih berat mati adalah perwujudan rasisme. Bab ini membuktikan hipotesa terakhir, yaitu AS membiarkan IRA lebih karena rasisme daripada kepentingan lainnya seperti perdagangan bebas.

Hipotesa pertama justru dibuktikan dalam bab keempat, dimana diceritakan masyarakat Irlandia yang tiada henti melobi pemerintah AS agar memperhatikan Irlandia Utara, setelah tayangan 14 orang ditembak dalam sebuah demonstrasi di Derry disiarkan di AS. Di sini jugalah hipotesa ketiga terbukti karena tayangan tersebut berhasil menggugah rasa persaudaraan keturunan Irlandia di AS dengan masyarakat Katolik di Irlandia Utara. Pemerintah AS memang patut mendengarkan konstituen keturunan Irlandia karena mereka adalah mayoritas. Yang unik justru adalah presiden-presiden AS tidak ada yang berani menindaklanjuti lobi keturunan Irlandia yang disampaikan melalui wadah INS sampai Clinton naik pada awal 1993. Alasan para pendahulu Clinton ini adalah keengganan untuk mengusik Inggris yang merupakan sekutu terkuat mereka. Bagi Inggris persoalan Irlandia Utara merupakan masalah internal, dan AS tidak ingin mengintervensi. Bill Clinton adalah presiden AS pertama yang menjadikan Irlandia Utara sebagai agenda utama. Jika Clinton tidak melakukan sesuatu terhadap konflik di Irlandia Utara, mungkin pemerintah tidak akan ditinggalkan konstituen keturunan Irlandia, namun mereka akan tetap melobi menuntut Irlandia Utara diperhatikan.

6.1. HAM, RASISME DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI

AS telah menciptakan idealisme baru dalam kebijakan-kebijakan luar negeri pasca Perang Dunia II. Idealisme tersebut mencakup nilai-nilai fundamental HAM yang diabadikan dalam *The United Nations Charter of Human Rights* (Piagam HAM PBB). Salah satu isi piagam tersebut adalah menjamin

HAM setiap orang, pria dan wanita, dalam negara besar maupun kecil. Piagam tersebut juga menjamin hubungan yang hangat antar negara berlandaskan penghormatan terhadap kesetaraan hak, kebebasan dan semangat bekerja keras.⁶

Tentu saja tidak semua pemimpin negara tunduk pada Piagam HAM PBB. Setiap hari dimana-mana ada laporan mengenai diskriminasi, kekerasan terhadap kaum yang termarginalisasi dan tidak adanya kemauan orang-orang kulit putih untuk lebih mengenal teman-temannya dari ras lain. Presiden Dwight Eisenhower pun merasa perlu menyatakan simpatinya terhadap kasus dimana para diplomat non-Kaukasia ditolak makan di restoran tertentu atau menginap di hotel tertentu di daerah-daerah yang menggalakkan segregasi seperti Alabama, pada 1957. Padahal orang-orang seperti para diplomat itu, selain datang dari kelas menengah ke atas, juga memperjuangkan kepentingan AS di kancah internasional. Namun Eisenhower tidak melakukan tindakan lebih jauh selain menyatakan simpati, sehingga segregasi tetap berlanjut sampai 1960-an.⁷

Tapi ditengah berbagai laporan mengenai ketidakpatuhan terhadap Piagam HAM PBB, sesekali pemerintah AS bisa bertindak tegas terhadap sesama negara mayoritas kulit putih. Hal tersebut ditunjukkan dalam pertikaian Inggris dan Prancis dalam kasus nasionalisasi Kanal Suez oleh Mesir pada 1956. Presiden Eisenhower meleraikan kedua negara dengan mengancam apabila mereka tidak berdamai AS akan menjatuhkan sanksi politik dan ekonomi.⁸

Karena banyaknya kejadian tentang pelanggaran Piagam HAM PBB dan sangat sedikitnya laporan tentang sikap non-rasis AS seperti dipaparkan di atas, kegiatan lobi kelompok etnis harus tetap berjalan agar apa yang dirumuskan piagam PBB tersebut bisa menjadi kenyataan dan merata di seluruh dunia. Ada beberapa faktor yang dapat mentralkan atau menghilangkan kesempatan lobi kelompok etnis untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri. Jika opini publik menentang kebijakan yang diajukan suatu lobi, atau jika suatu kelompok non-etnis melobi untuk kepentingan mereka yang bertentangan dengan tujuan lobi

⁶ *Ibid.*, hal 301

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

sebuah kelompok etnis, atau bila sebuah kelompok etnis lain memperjuangkan perkara lain, pengaruh kelompok etnis pertama bisa berkurang.⁹

Hal pertama yang menetralkan lobi sebuah kelompok etnis dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri adalah ketidaktahuan masyarakat awam mengenai isu yang diangkat, sehingga tidak akan ada keberatan. Salah satu kunci kesuksesan lobi etnis Yahudi dalam terciptanya Israel adalah bahwa saat itu publik awam tidak peduli dengan pentingnya sebuah negara Yahudi bagi warga Yahudi di AS. Mungkin ketidakpedulian itu dikarenakan mereka tidak mengikuti kontroversi Palestina. Dalam survey yang dilakukan *National Opinion Research Poll Center* pada Mei 1946, hanya 45% responden yang mengetahui bahwa Inggris mempunyai mandat untuk Palestina, dan survey dari badan yang sama beberapa bulan kemudian membuktikan 49% responden tidak mengikuti wacana dibentuknya negara Yahudi.¹⁰

Biasanya masyarakat hanya mengikuti berita mengenai isu internasional jika isu ini berdampak penting pada kehidupan sehari-hari di AS, seperti Perang Vietnam dimana para pemuda mendadak diharuskan mengikuti wajib militer untuk kemudian dikirim ke Vietnam. Isu-isu internasional biasanya tidak menarik bagi orang awam di AS, dan hal ini masih berlangsung hingga sekarang. Banyak orang muda AS yang bersikap seolah-olah kehidupan di luar AS tidak ada, dan ini memberikan kontribusi bagi keberlangsungan sikap rasisme mereka. Dengan kata lain, mereka rasis karena mereka tidak tertarik atau tidak mau belajar apa yang terjadi di dunia di luar AS.

Begitu parahnya ketidaktertarikan publik AS tentang isu-isu luar negeri, sehingga pada 1964 hanya 58% responden *National Opinion* survey mengetahui AS adalah anggota NATO. Sisanya malah mengira Rusia juga anggota NATO, di tengah Perang Dingin. Kemudian hanya 50% responden pada sebuah survey tahun 1978 mengetahui bahwa AS mengimpor minyak. Ketidakpedulian massa akan isu-isu internasional memberikan keuntungan besar bagi kelompok etnis, karena

⁹ *Ibid.*, hal 303

¹⁰ *Ibid.*

tidak ada yang menentang isu yang diketengahkan kelompok lobi ini agar dijadikan kebijakan luar negeri.¹¹

Lobi sebuah komunitas etnis sudah pasti tidak akan berhasil jika publik menentang isu yang dibawanya. Saat etnis Yahudi melobi pemerintah AS agar mendukung pembentukan Israel, satu-satunya hal yang tidak disetujui oleh masyarakat tidak diterima oleh pemerintah. Tidak lama setelah Israel dideklarasikan pada 14 Mei 1948, negara baru itu meminta Presiden Truman membantu dalam tiga hal, pertama agar Truman mengakui keberadaan de jure Israel, kedua agar Israel dipinjamkan US\$100 juta. Truman mengabulkan kedua permintaan ini. Ketiga, Israel meminta Truman mengangkat embargo senjata di Timur Tengah yang diberikan Dewan Keamanan PBB sehingga Israel bisa membeli senjata dari sana. Truman diperingatkan Departemen Luar Negeri bahwa menuruti keinginan ketiga Israel berarti tidak menghargai usaha PBB mendamaikan Timur Tengah. Publik ternyata setuju dengan Departemen Luar Negeri, dan hal ini dibuktikan oleh survey *National Opinion Research Center* pada 1 Juli 1948 yang memperlihatkan 82% responden tidak menyetujui permintaan Israel agar embargo senjata ke Timur Tengah diangkat.¹²

Faktor kedua yang mengurangi pengaruh lobi kelompok etnis dalam kebijakan luar negeri adalah apabila ada kelompok non-etnis yang memperjuangkan suatu kepentingan dan bertekad akan mempengaruhi kebijakan luar negeri agar memihak mereka. Lalu faktor ketiga adalah apabila sebuah kelompok etnis bentrok dengan kelompok etnis lainnya yang merupakan musuh lama kelompok etnis yang pertama. Contoh faktor ketiga ini terjadi pada 1935 saat Benito Mussolini mengirimkan tentara ke Ethiopia dalam misi memperluas koloni Italia. Dapat ditebak bahwa keturunan Italia di AS melobi presiden agar mendukung Mussolini dan tidak memberi sanksi. Presiden Franklin Delano Roosevelt menentang tindakan Mussolini, dan akibatnya komunitas Italia marah pada Roosevelt dan partai asalnya, Partai Demokrat. Sementara itu warga kulit hitam tentu saja memperjuangkan Ethiopia. Lester Taylor, ketua *The New African International League*, mengirimkan surat pada Departemen Luar Negeri. Surat

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hal 303-304

tersebut menyakan kekecewaan atas reaksi departemen yang tidak seperti diharapkan.¹³

Dari sudut pandang calon legislatif, membawa isu yang diperjuangkan sebuah kelompok minoritas dalam kampanye tidak akan membuat elektabilitas seorang calon berkurang. Selain calon itu bisa mendulang suara dari kelompok etnis yang kepentingannya dia promosikan, calon tersebut juga tidak akan kehilangan suara dari kelompok etnis yang kepentingannya tidak dia masukkan ke dalam agenda kampanye. Truman telah membuktikan kebenaran hal ini saat dia berkampanye untuk menjadi presiden. Truman mempromosikan kepentingan etnis Yahudi akan sebuah negara sendiri, yang kelak menjadi Israel. Truman rupanya sadar betul akan kekuatan ekonomi kelompok etnis minoritas ini.¹⁴

6.2. MULTIKULTURALISME DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI

Tidak bisa disangkal bahwa ketika orang mendengar kata “Amerika Serikat” yang terbayang mengenai penduduknya adalah orang-orang kulit putih, Anglo-Saxon (Eropa Barat, biasanya Inggris) dan Protestan, meskipun sudah banyak diketahui pula bahwa di AS berbagai jenis etnis lainnya berdiam. Ciri-ciri seperti Kaukasia, Anglo-Saxon dan Protestan ini juga diterjemahkan sebagai kultur AS, dan memang nilai-nilai yang dominan adalah nilai-nilai Eropa yang telah bertahan selama berabad-abad. Nilai-nilai inilah yang digunakan untuk menilai para imigran yang datang ke AS di masa lalu. Karena para pendatang non-Anglo-Saxon, seperti imigran dari Eropa Timur dan Eropa Selatan, tidak akrab dengan nilai-nilai Anglo-Saxon, terciptalah program yang terkenal sebagai “Amerikanisasi”. Para imigran non Anglo-Saxon didoktrin bahwa AS adalah satu bangsa dengan satu budaya yang harus diadaptasi oleh semua orang, tidak peduli apapun etnis dan negara atau budaya asalnya.¹⁵

Sebelum kejatuhan Uni Soviet, terlihat urgensi menjaga satu budaya (*one common culture*) sehingga apapun yang tidak bisa diidentifikasi sebagai Anglo-Saxon terlihat sebagai ancaman. Hal ini kemudian pecah, sehingga

¹³ *Ibid.*, hal 304

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*, hal 304-305

memunculkan wacana mengenai seberapa rela rakyat AS, dari etnis apapun, rela berpegang sepenuhnya pada nilai-nilai Anglo-Saxon. Wacana lainnya yang muncul adalah bagaimana agar semua rakyat AS dari berbagai etnis tetap bersatu, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri.¹⁶

Perang Dunia I melemahkan kekuatan kolonial Eropa dan memperkenalkan ide Presiden Wilson mengenai kemandirian, dan Perang Dunia II betul-betul menghancurkan kekuatan kolonial Eropa, dimana negara-negara yang dulunya dijajah Eropa merdeka dan negara-negara ini ingin berkiprah di panggung internasional. AS kemudian menyesuaikan dengan keadaan dengan membuka jalur imigrasi dan tidak lagi bersikap memusuhi imigran-imigran non-Eropa. Tapi orang-orang kulit putih di AS tidak mau berasimilasi karena budaya mereka begitu berbeda dengan etnis lain dan dianggap lebih superior.¹⁷

Dengan menolak asimilasi dan menawarkan wacana AS bukan sebagai suatu bangsa dengan budaya tunggal tapi sebuah negara dengan berbagai bangsa, para pengusung multikulturalisme berharap diterimanya pluralisme dapat menghilangkan nosi hegemoni. Menurut multikulturalis, pada dasarnya sejarah AS tidak pernah melibatkan hanya satu suku bangsa, tapi bermacam-macam. Bahkan pada tahap paling awal saja sudah ada orang-orang kulit putih dan Indian.¹⁸

Jika sudah begini, bagaimana cara melindungi kepentingan nasional dalam pembentukan kebijakan luar negeri? Di masa lalu, kelompok-kelompok etnis yang bertujuan melobi kepentingan agar dijadikan kebijakan luar negeri harus menyesuaikan dengan berbagai standar nasional. Samuel Huntington dalam *“Clash of Civilizations and the Remaking of New World Order”* (1997) menulis, *“They (multiculturalists) deny the existence of a common culture in the United States, denounce assimilation and promote the primacy of racial, ethnic and other sub-national cultural identities and groupings.”* Pendapat Huntington itu disetujui oleh para pengkritik teori multikulturalisme, karena dalam pembentukan

¹⁶ *Ibid.*, hal 305

¹⁷ *Ibid.*, hal 305-306

¹⁸ *Ibid.*, hal 306

kebijakan luar negeri, jika dalam multikulturalisme setiap etnis boleh mengajukan proposal kebijakan luar negeri yang memenangkan kepentingannya, itu berarti etnis lain di AS harus tunduk pada kebijakan itu.¹⁹ Tony Smith dalam “*Foreign Attachments*” (1994) mengatakan multikulturalisme lebih meningkatkan kesadaran akan identitas etnis daripada rasa kesatuan dengan AS. Smith mengatakan juga dia takut pengaruh besar AS di dunia dan sumber daya AS akan digunakan untuk kepentingan masing-masing kelompok etnis, yang akan berbuah perpecahan. Smith tidak menyalahkan kelompok etnis yang berjuang untuk kepentingannya, namun dia menyarankan hendaknya dalam memperjuangkan kepentingan, suatu etnis juga mempertimbangkan kepentingan nasional. Terakhir, Smith berargumentasi bahwa meskipun sulit untuk didefinisikan, AS tetap membutuhkan kepentingan nasional dalam kancah internasional. Masalahnya, siapa yang merepresentasikan AS? Ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab multikulturalis. Menurut Smith lagi, seseorang haruslah merasa dia seorang Amerika terlebih dahulu, baru anggota etnis tertentu.

6.3 PEMBELAJARAN BAGI INDONESIA

Seperti telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dari thesis ini, sebagian besar tindakan yang dilakukan AS didasari oleh rasisme. Jadi bagi Indonesia sebagai negara, kebijakan-kebijakan luar negeri AS menyangkut hubungan bilateral Indonesia dan AS tidak akan benar-benar dimaksudkan untuk membantu Indonesia. Untuk itu, sebaiknya pemerintah Indonesia tidak terlalu berharap pada AS dan mulai secara perlahan melepas ketergantungan pada negara yang sering dijuluki “*land of the free*” tersebut.

Untuk orang-orang Indonesia yang tinggal di AS, baik yang berstatus warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara AS, dalam melobi pemerintah AS bisa memanfaatkan sikap acuh tak acuh mayoritas masyarakat AS terhadap dunia luar, dalam menciptakan citra bagus bagi Indonesia. Para diplomat, duta besar atau organisasi-organisasi Indonesia di sana bisa mencontoh langkah Duta

¹⁹ Samuel Huntington, *Clash of Civilizations and the Remaking of New World Order*. Touchstone (New York: Touchstone, 1997), 52-54

Besar Indonesia untuk AS Dino Patti Djalal yang mengadakan program memperkenalkan angklung pada masyarakat AS.²⁰

Tindakan Djalal dalam memperkenalkan angklung pada masyarakat AS itu sebenarnya adalah sebuah langkah lobi untuk menghentikan Malaysia yang pada saat itu hendak mengklaim angklung sebagai warisan budayanya. Meskipun belakangan diketahui Negeri Jiran itu tidak melakukan lobi untuk menggerakkan pemerintah AS agar membantu mendaftarkan angklung ke *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations* (UNESCO) sebagai warisan budayanya, paling tidak Indonesia telah melakukan suatu langkah untuk mengedukasi publik AS (dan akhirnya membentuk opini) bahwa angklung sejatinya milik Indonesia.

Perlu dijalin kerja sama antara pemerintah Indonesia di tanah air dan warga Indonesia yang berdiam di AS mengenai bagaimana AS bisa membantu Indonesia, terlepas dari basis rasisme yang diartikan bantuan tersebut tidak akan benar-benar menguntungkan Indonesia. Bila dilihat dari paparan bentuk kerjasama yang dijalin AS dan Indonesia sejauh ini di bab ketiga, terlihat adanya pola AS memberi bantuan hanya saat ada peristiwa besar, misalnya tsunami. Hal ini bisa diatasi dengan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan organisasi-organisasi Indonesia di AS. Keduanya dapat saling mendukung dalam menciptakan hubungan baik antara pemerintah AS dan masyarakat Indonesia di sana, dimana organisasi-organisasi Indonesia bisa menjaga sebuah *presence* tanpa menjadi dominan seperti India dan Taiwan.

Sayangnya, sampai saat ini belum ada kelompok lobi masyarakat Indonesia di AS yang serius seperti The Irish National Caucus. Yang ada baru organisasi pelajar seperti Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat (PERMIAS) yang hanya mewadahi kegiatan-kegiatan mahasiswa Indonesia di AS. Menurut Dino Pati Djalal, diaspora Indonesia di luar negeri kurang diakui sehingga mereka belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan

²⁰Victoria Sidjabat, "Ensambel Angklung Washington Pecahkan Rekor Dunia," *Tempo* (2011), diakses pada 24 April 2012, pukul 09:00, <http://www.tempo.co/read/news/2011/07/13/112346375/Ensambel-Angklung-Washington-Pecahkan-Rekor-Dunia>.

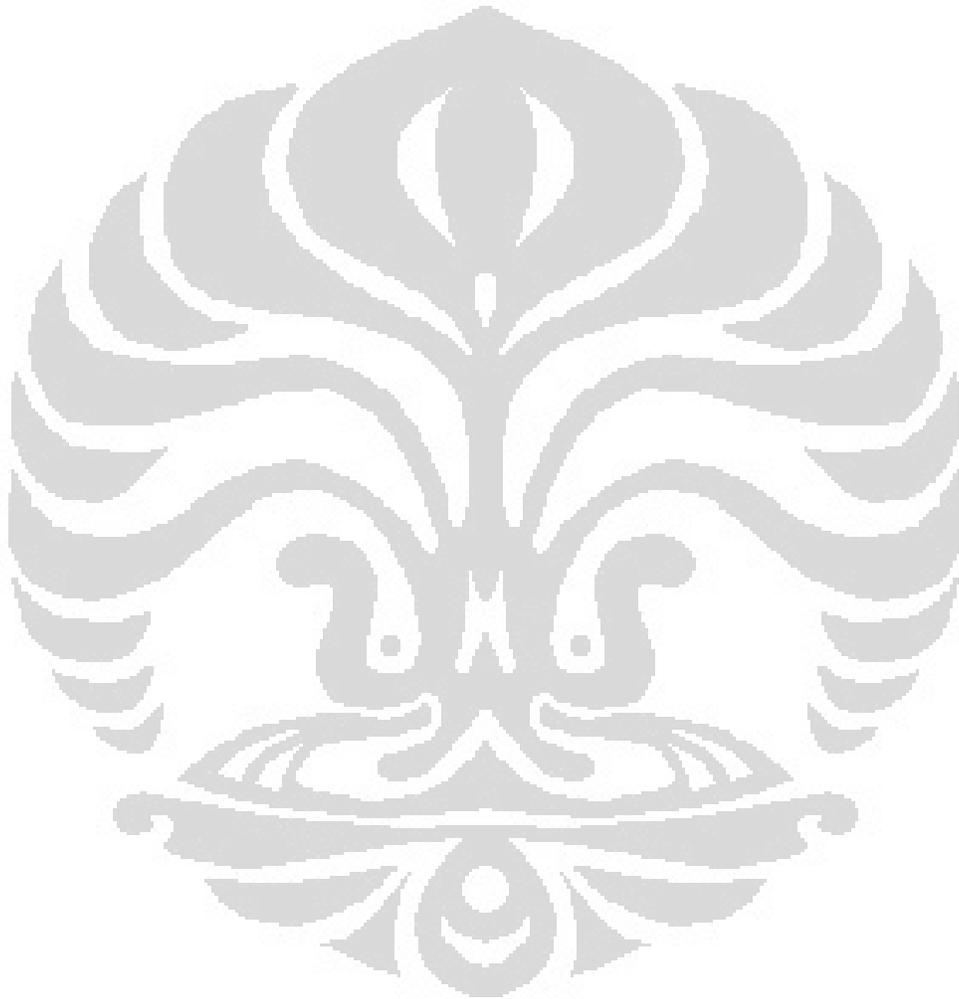
hubungan Indonesia dan negara-negara luar pada umumnya (AS dan Indonesia khususnya).²¹ Hal ini amat disayangkan, mengingat ada banyak tokoh Indonesia yang mendulang sukses di luar negeri, diantaranya petinggi *World Bank* dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta penulis dan pengusaha Jennie S. Bev. Barulah pada 6 Juli 2012 diadakan *Congress of Indonesian Diaspora* di Los Angeles, AS, selama tiga hari hingga 9 Juli 2012. Kongres ini tidak hanya dihadiri masyarakat dan tokoh Indonesia di AS, tapi juga mereka yang berdiam di luar AS seperti penyanyi Anggun. Diharapkan dengan kongres diaspora Indonesia pertama ini, rakyat Indonesia di dalam dan luar negeri dan pemerintah Indonesia sadar akan pentingnya kelompok lobi diaspora dalam mewujudkan hubungan antara negara yang saling menguntungkan.

Pelajaran berikutnya yang dapat diambil dari hubungan AS dan Irlandia Utara adalah bahwa keamanan masyarakat secara ekonomi saja tidak cukup dalam meredam terorisme. Deradikalisasi tentulah harus menyentuh akar rumput, yaitu akar paling dalam yang menjadi sumber pertikaian kaum republik dan *unionist*. Jika hal ini dipindahkan ke dalam konteks Indonesia, usaha deradikalisasi haruslah menasar apa yang menjadi akar terdalam kelompok-kelompok Islam garis keras yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Sejauh ini memang program deradikalisasi yang dirumuskan Dr. Petrus Golose dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah menasar akar rumput, namun dalam prakteknya deradikalisasi gaya BNPT sejauh ini masih jauh dari berhasil.

Terakhir, yang tak kalah penting diperhatikan oleh pemerintah Indonesia adalah suara korban. Memang sudah bagus pemerintah Indonesia memberikan hukuman mati pada teroris, tapi adanya sebuah seminar di Universitas Indonesia pada 2011 yang mengundang Asosiasi Korban Pengeboman Indonesia (ASKOBI), yang mana satu-satunya wadah korban terorisme di Indonesia ini mengatakan mereka harus menanggung sendiri biaya pengobatan mengingatkan bahwa pemerintah sama sekali belum memperhatikan suara korban. Biaya perawatan yang harus ditanggung sendiri oleh para korban bom itu berbanding

²¹ Armando Siahaan. "Indonesian Diaspora Gathers in The US." *The Jakarta Globe*, 6 Juli 2012, hal. 3

terbalik dengan janji-janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu pengobatan gratis bagi para korban terorisme. Bantuan seluruh lapisan masyarakat, terutama media dan pemerintah, sangat penting dalam menyuarakan aspirasi korban terorisme dan bukan malah mengkerdikan mereka.



DAFTAR PUSTAKA

LBUKU

- Archdeacon, Thomas J., *Becoming American: An Ethnic History*. New York: The Free Press, 1983
- Baker, Ross K. McWilliams, Gerald M., and Pomper, Wilson C. *American Government*. New York: Macmillan Publishing Co., 1983
- Brown, David M. Franck and Irene M. *Facts About American Immigration*. New York: The H.W. Wilson Company, 2001.
- Chomsky, Noam. *Hegemony and Survival: America's Quest for Global Dominance*. New York: Metropolitan Books, 2003.
- Cronin, Mike. *Irish History for Dummies*. Sussex: John Wiley & Sons. Ltd, 2011.
- Daulay, Richard M. *Religion in Politics: George W. Bush and War on Terror*. Jakarta: Penerbit Libri, 2010
- Fuchs, Lawrence H. *American Kaleidoscope: Race, Ethnicity and The Civic Culture*. New Hampshire: The University Press of New England, 1991.
- Gaddis, John Lewis. *A Cold War: A New History*. New York: Penguin Press, 2005.
- Hil, Richard. Otterman, Michael and Wilson, Paul. *Erasing Iraq: The Human Costs of Carnage*. London: Pluto Press, 2010.
- Hoffman, Bruce. *Inside Terrorism*. New York: Columbia University Press, 2006.
- Huntington, Samuel. *Clash of Civilizations and The Remaking of New World Order*. New York: Touchstone, 1997.
- Lynch, Timothy J. *Turf War: The Clinton Administration and Northern Ireland*. England: Ashgate Publishing Limited, 2004.
- Katznelson, Ira. *When Alternative Action Was White: An Untold Story of Racial Inequality in Twentieth Century America*. New York: WW Norton & Company, 2006.
- Manheim, Jarol B. *Strategic Public Diplomacy and American Foreign Policy: The Evolution of Influence*. New York: Oxford University Press, 1998.

- Miller, Kerby A. *Emigrants and Exiles: Ireland and The Irish Exodus to America*. New York: Oxford University Press, 1983.
- Moloney, Ed. *The Secret History of IRA*. London: Penguin Books, 2003.
- McVea, David. *Making Sense of The Troubles: The Story of The Conflict in Northern Ireland*. New York: New Amsterdam Books, 2002.
- Napoleoni, Loretta. *Terror Incorporated: Tracing The Dollars Behind The Terror Networks*. Toronto: Seven Stories Press, 2005.
- Said, Edward. *Orientalism*. New York: Vintage, 1994.
- Sarote, Mary Elise. *1989: The Struggle to Create Post Cold War Europe*, (New Jersey: Princeton University Press, 2009.
- Saxton, Alexander. *The Rise and Fall of The White Republic: Class Politics and Mass Culture in Nineteenth-Century America*. Finland: Werner Soderstorm Oy, 2003.
- Shanahan, Timothy. *The Provisional Irish Republican Army and The Morality of Terrorism*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009.
- Thomson, Joseph E. *American Policy and Northern Ireland: A Saga of Peacebuilding*. Connecticut: Praeger Publishers, 2001.

II. DOKUMEN DAN NASKAH AKADEMIK

- Office of Foreign Assets Control. What You Need to Know About US Sanctions: Cote D'Ivoire. (US Department of the Treasury) 2006.*
- Office of Foreign Assets Control. What You Need to Know About US Sanctions: Balkans. (US Department of the Treasury) 2001.*
- Office of Foreign Assets Control. What You Need to Know About US Sanctions: Belarus. (US Department of the Treasury) 2006.*

III. KARYA ILMIAH

- Chen, Gabriel. "A Glass Half Full: The Indonesia –US Relations in The Age of Terror." *The Duke Chronicle* 27 (2005), diakses pada 14 April 2012, <http://www.duke.edu/~gwc/indonesia.htm>

- Clancy, Mary-Alice. "An Examination of The Bush Administration and The 'Internationalization' of Northern Ireland." *Ethnopolitic Papers* 6 (2010), diakses pada 17 Juni 2012, <http://www.ethnopolitics.org/ethnopolitics-papers/EPP006.pdf>
- MacGinty, Roger. "American Influences on Northern Ireland Peace Process." *The Journal of Conflict Studies* 27 (1997): 1-14, diakses pada 16 April 2012, <http://journals.hil.unb.ca/index.php/jcs/article/view/11750/12521>.
- Mohammad-Ayub, Aminah. "The Lobbying Game of The Indian and Pakistani Diasporas in The US." *Sciences Po Center of Indian and South Asian Studies Journal* 2 (2001): 1-16, diakses pada 19 April 2012, <http://www.ceri-sciences-po.org/archive/jan01/lobbying.pdf>
- Young, Lauren. "The Design of Absent Crisis: The Clinton Administration on 1994 Rwandan Genocide" *Student Pulse* 2 (2010): 1-4, diakses pada 18 April 2012, <http://www.studentpulse.com/articles/233/2/the-design-of-absent-crisis-the-clinton-administration-on-the-1994-rwandan-genocide>
- Weiner, Allen S. "War, Just War or International Fight Against Terrorism?" *Center on Democracy, Development and The Rule of Law Stanford Institute of International Studies* 47 (2005): 1-16, diakses pada 20 Juni 2011, http://iis-db.stanford.edu/evnts/4282/Weiner_sep05.pdf.

IV. ARTIKEL dan PUBLIKASI ELEKTRONIK

- Arthur, Paul. "The End of IRA's 'Long War.'" *Open Democracy*, 29 Juli 2005, diakses pada 15 Juni 2012. http://www.opendemocracy.net/democracy-protest/IRA_2711.jsp
- Chick, Kristen. "Real IRA Bombing Meant to Derail Last Step to N. Ireland Peace." *The Christian Science Monitor*, 12 April 2010, diakses pada 17 Juni 2012. <http://www.csmonitor.com/World/terrorism-security/2010/0412/Real-IRA-bombing-meant-to-derail-last-step-of-N.-Ireland-peace>
- Cullen, Kevin. "America and The Conflict." *Public Broadcasting Service*, 7 Juli 1998, diakses pada 15 Juni 2012. <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/ira/reports/america.html>
- Daly, Lee. "Northern Ireland and The American Connection." *Global Affairs*, 14 Agustus 2008, diakses pada 17 Juni 2012. <http://www.globalaffairs.es/en/northern-ireland-and-the-american-connection>.
- Dobriansky, Paula J. "How Northern Ireland Turned The Corner." *The Wall Street Journal*, 22 April 2010, diakses pada 17 Juni 2012.

<http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704671904575193982797989238.html>

Duffy, Jonathan. "Rich Man in New York." *BBC News*, 26 September 2001, diakses pada 7 November 2011. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1563119.stm>

Hartman, Rachel Rose. "Rep. Peter King Defends IRA Support, Radical Muslim Hearings." *Yahoo News*, 12 Maret 2011, diakses pada 21 Februari 2012. <http://news.yahoo.com/blogs/ticket/rep-peter-king-defends-ira-support-islamic-radicalism-20110309-081347-431.html>

Fahrentold, David A, and Michelle Boorstein. "Rep. Peter King's Muslim Hearings: A Key Moment in An Angry Conversation." *The Washington Post*, 9 Maret 2011, diakses pada 23 Februari 2012. <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/03/09/AR2011030902061.html>

Fitzpatrick, Jim. "How Declan Kelly Helped Bring US Investments to NI." *BBC News*, 11 Mei 2011, diakses pada 18 Juni 2012. <http://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-13359794>

Lane, Max. "East Timor: Australia's Double Betrayal." *Green Left*, 17 November 2000, diakses pada 13 April 2012. <http://www.greenleft.org.au/node/30299>

O'Shea, Kerry. "President Obama Will Visit Northern Ireland if Re-elected, First Minister Says." *Irish Central*, 22 Maret 2012, diakses pada 18 Juni 2012. <http://www.irishcentral.com/news/President-Barack-Obama-will-visit-Northern-Ireland-if-re-elected-says-First-Minister-143797186.html>

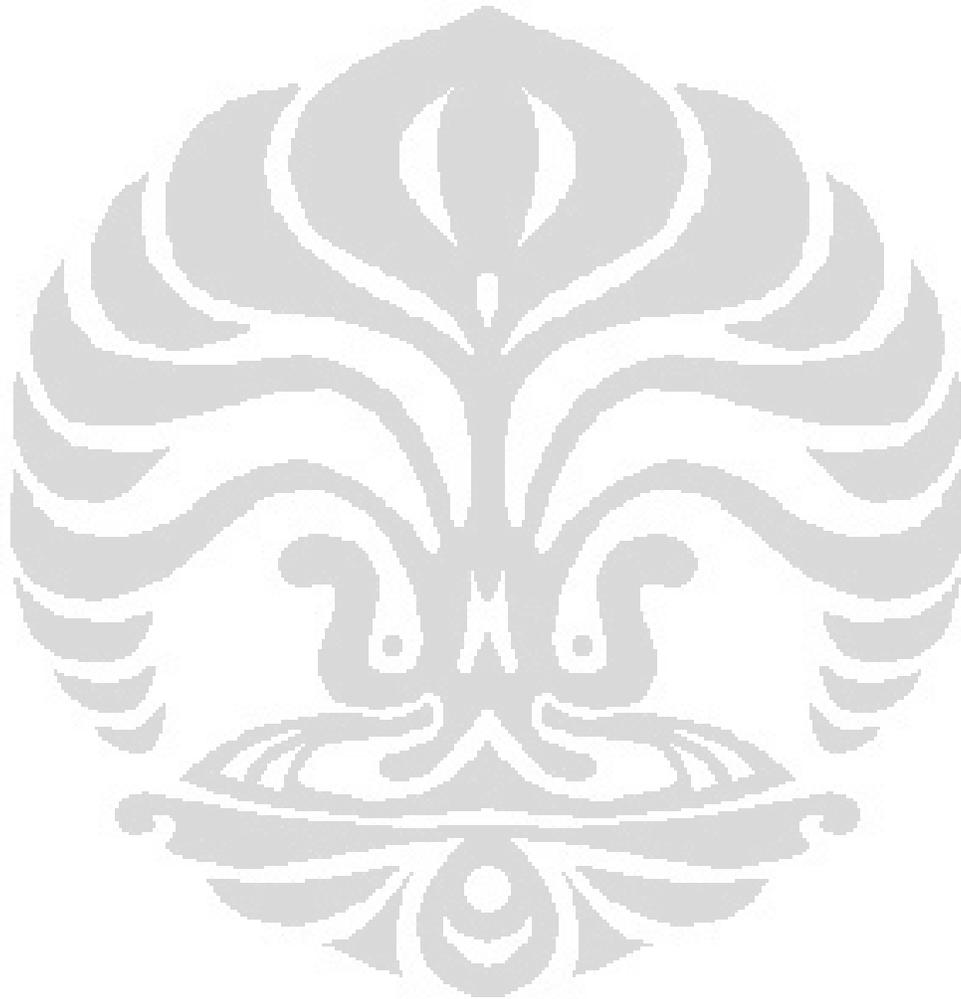
Potter, Will. "Homeland Security Says Timothy McVeigh Wasn't A Terrorist but A Peace Activist." *The Herald Standard*, 27 Oktober 2008, diakses pada 12 April 2012. http://www.heraldstandard.com/site/news.cfm?newsid=20151835&BRD=2280&PAG=461&dept_id=480247&rfi=6

Saleh, Heba. "Islamists Ahead in Early Egypt Poll Count." *The Financial Times*, 30 November 2001, diakses pada 13 April 2012. <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/403961ec-1b2b-11e1-8b11-00144feabdc0.html#axzz1sxFnNBDg>

Saslow, Eli. "Muslim Activists in Minnesota Struggle as One-Man Counter Againts The Lure of Terrorism." *The Washington Post*, 10 Juli 2011, diakses pada 23 Februari 2011. http://www.washingtonpost.com/national/muslim-activist-in-minnesota-struggles-as-one-man-counter-against-lure-of-terrorism/2011/07/04/gIQAwNH53H_story.html

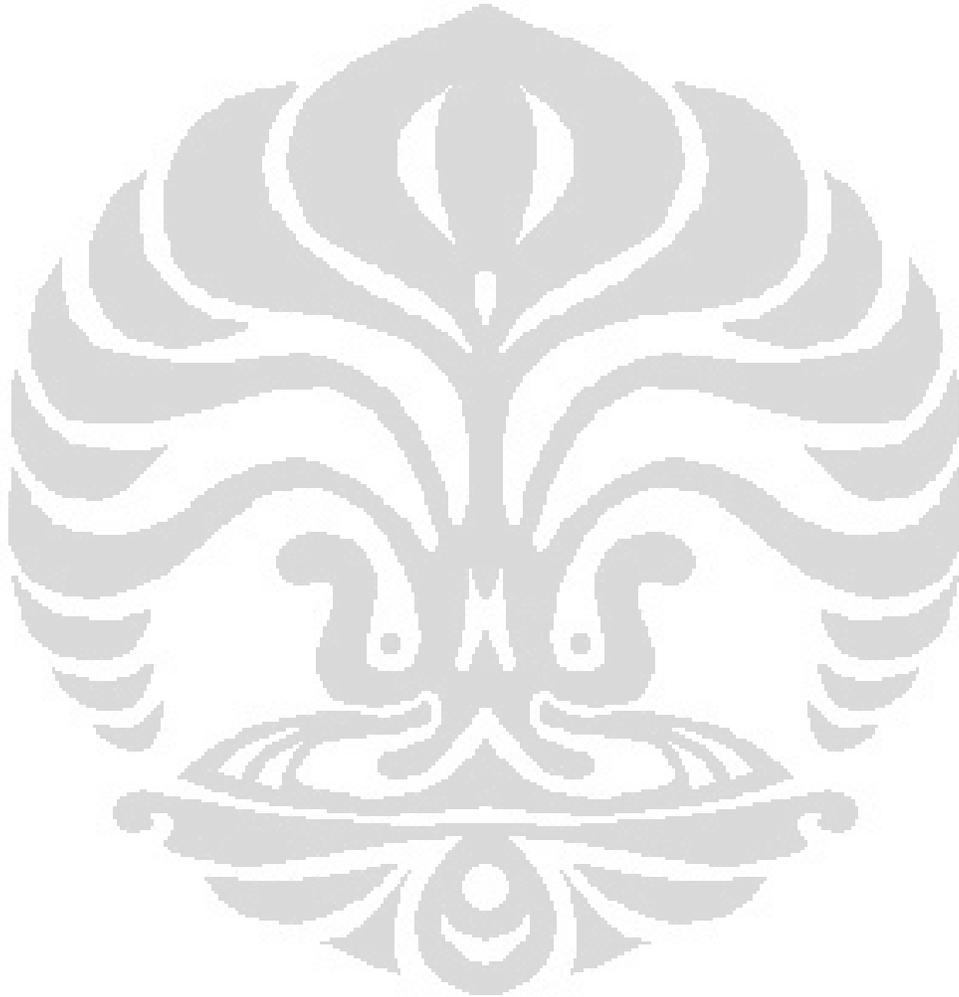
Sidjabat, Victoria. "Ensambel Angklung Washington Pecahkan Rekor Dunia." *Tempo*, 13 Juli 2011, diakses pada 24 April 2012.
<http://www.tempo.co/read/news/2011/07/13/112346375/Ensambel-Angklung-Washington-Pecahkan-Rekor-Dunia>

Wansai, Sai. "Ethnic Conflict in Burma: Historical Information, Cause of Conflict and Contemporary Politics." *Peace Hall*, 27 Januari 2005, diakses pada 25 Desember 2010.
<http://www.peacehall.com/news/gb/english/2004/01/200401270544.shtml>.



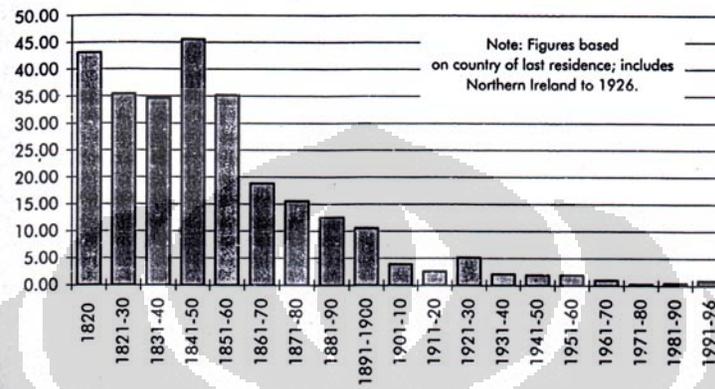
LAMPIRAN

Persentase imigran dari Irlandia per dekade, 1820-1996 (grafik 2.8) dan jumlah imigran dari Irlandia per dekade, 1820-1996 (grafik 2.9).

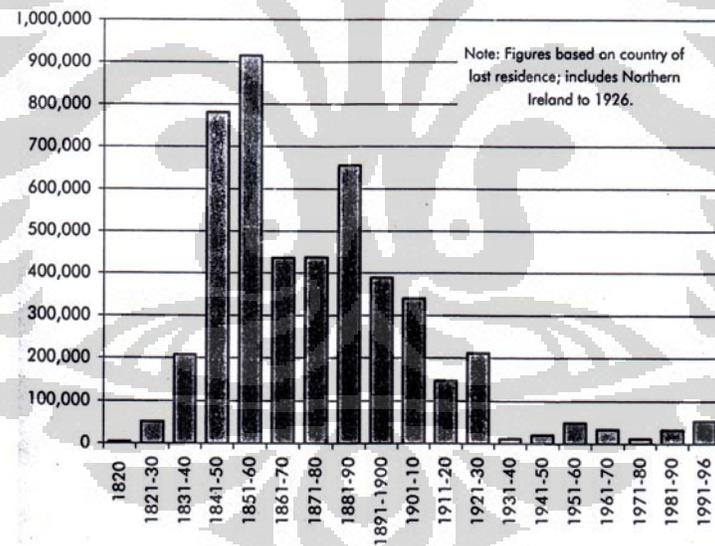


Immigrants from Ireland 111

Graph 2.8: Percentage of Immigrants from Ireland in Total U.S. Immigration by Decade, 1820–1996



Graph 2.9: Number of Immigrants from Ireland by Decade, 1820–1996



Persentase orang Irlandia yang lahir di luar negeri, 1850-1990.

114 Facts About American Immigration

Graph 2.10: Percentage of Foreign-Born Immigrants from Ireland by Decade in Total U.S. Population at End of Decade, 1850-1990

